



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN;
STUDI DESKRIPTIF PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
(AREA DEVELOPMENT PROGRAM - ADP)
WAHANA VISI INDONESIA
DI KELURAHAN CILINCING JAKARTA UTARA**

TESIS

**HENDI JULIUS
NPM 1006744080**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
DESEMBER 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN;
STUDI DESKRIPTIF PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
(AREA DEVELOPMENT PROGRAM - ADP)
WAHANA VISI INDONESIA
DI KELURAHAN CILINCING JAKARTA UTARA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Kesejahteraan Sosial**

**HENDI JULIUS
NPM 1006744080**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
DESEMBER 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Hendi Julius

NPM : 1006744080

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20/12-12.....

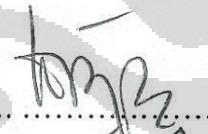
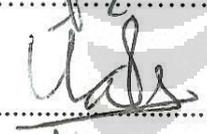
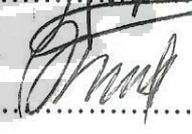
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Hendi Julius
NPM : 1006744080
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan;
Studi Deskriptif Program Pengembangan Wilayah
(Area Development Program - ADP)
Wahana Visi Indonesia
di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Triyanti Anugrahini, S.Sos, M.Si (.....) 
Penguji : Prof. Isbandi Rukmito Adi, PhD (.....) 
Penguji : Bagus Aryo, PhD (.....) 
Penguji : Arif Wibowo, S.Sos, SH, MHum (.....) 

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Desember 2012

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya semata-mata yang membuat saya berkesempatan mengikuti pendidikan pasca sarjana ini dan akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda **Arnah Aspan** serta istri tercinta **Christine Johana** dan kedua permata hatiku **Keziaputri** dan **Jeannette** yang telah terus mendukung dalam doa dan memberi semangat saya dalam mengikuti seluruh proses belajar dan menyelesaikan pendidikan ini, terima-kasih telah bersabar menghadapi saat-saat sulit yang mana membuat kalian menjadi sedikit diabaikan. Tesis ini saya persembahkan untuk kalian berempat, orang-orang yang paling berharga dalam hidupku.

Terima-kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Ibu Triyanti Anugrahini, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Prof. Isbandi Rukminto Adi, PhD; bapak Bagus Aryo, PhD dan bapak Arif Wibowo, S.Sos, SH, M.Hum atas masukan-masukannya untuk menyempurnakan tesis ini;
3. Seluruh staf pengajar dan karyawan pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah menolong saya untuk menimba ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial;
4. Ibu Grace Hukom dan bapak Charles Sinaga, pimpinan Wahana Visi Indonesia yang telah memberikan keleluasaan bagi saya untuk bisa mengikuti pendidikan pasca sarjana ini sambil melakukan tugas pekerjaan sehari-hari;

5. Sdr. Yacobus Runtuwene dan seluruh staf Wahana Visi Indonesia ADP Cilincing yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Seluruh sahabat dan rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Angkatan 2010 dan 2011 serta tim Urban Jakarta – Wahana Visi Indonesia yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap kiranya Allah Bapa di Surga berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Desember 2012

Hendi Julius

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendi Julius

NPM : 1006744080

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial

Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan, Studi Deskriptif Program Pengembangan Wilayah (ADP) Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Desember 2012

Yang Menyatakan


Hendi Julius

ABSTRAK

Nama : Hendi Julius
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan:
Studi Deskriptif Program Pengembangan Wilayah
(Area Development Program - ADP) Wahana Visi Indonesia
di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara

Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

Kata kunci:
Pemberdayaan, partisipasi / keterlibatan warga

ABSTRACT

Name : Hendi Julius
Study Program : Post Graduate Program in Social Welfare
Title : Urban Poor Community Empowerment, Descriptive Study of Area Development Program (ADP) Wahana Visi Indonesia in Cilincing village, North Jakarta

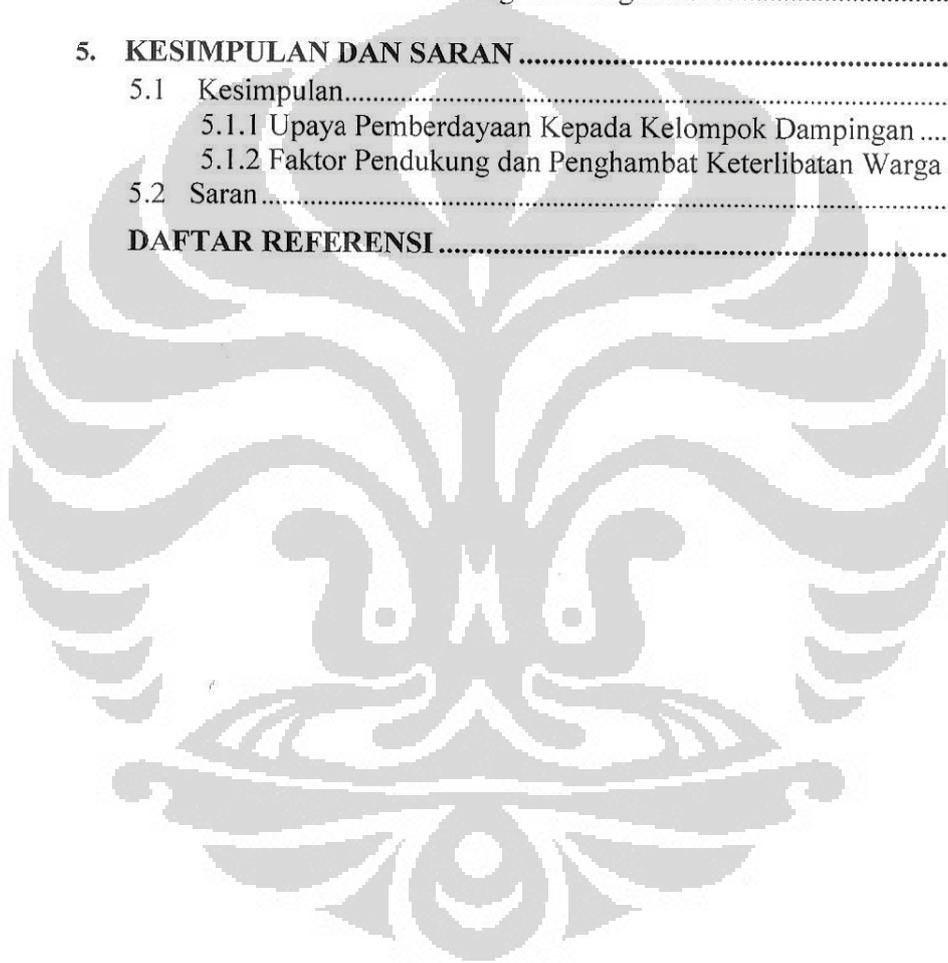
The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group's participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transission phase.

Key words :
Empowerment, community participation / involvement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Pendekatan Penelitian.....	13
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.....	14
1.5.4 Teknik Pemilihan Informan.....	14
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.6 Teknik Analisa Data.....	18
1.5.7 Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian.....	19
1.5.8 Keterbatasan Penelitian.....	20
1.6 Sistematika Penulisan.....	20
2. KEMISKINAN, PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	22
2.1 Kemiskinan.....	22
2.2 Pembangunan yang Berpusat pada Manusia.....	26
2.3. Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2.3.1. Pengertian, Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat ...	30
2.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses dan Program.....	32
2.3.3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	37
2.3.4. Indikator pemberdayaan masyarakat.....	40
2.4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.....	46
2.5 Dinamika Kelompok dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	52
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ADP CILINCING	56
3.1. Deskripsi Wilayah Pelayanan Wahana Visi Indonesia.....	56
3.1.1 Deskripsi Kelurahan Cilincing.....	56
3.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	58
3.2 Gambaran Umum Wahana Visi Indonesia dan ADP Cilincing.....	61

3.2.1	Sasaran, Tujuan dan Ruang Lingkup ADP Cilincing	62
3.2.2	Tahapan Program	71
4.	UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLIBATAN WARGA DAMPINGAN.....	77
4.1	Temuan Lapangan	77
4.1.1	Upaya Pemberdayaan Masyarakat ADP Cilincing.....	77
4.1.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga	132
4.2.	Pembahasan.....	145
4.2.1	Upaya Pemberdayaan Masyarakat.....	145
4.2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat	159
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	171
5.1	Kesimpulan.....	171
5.1.1	Upaya Pemberdayaan Kepada Kelompok Dampingan	171
5.1.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga	174
5.2	Saran.....	176
	DAFTAR REFERENSI	180



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Populasi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Global.....	1
Gambar 2.1	Skema Tahapan dalam Intervensi Pengembangan Masyarakat.....	36
Gambar 3.1	Peta Kecamatan Cilincing.....	56
Gambar 3.2	Permasalahan Sampah dan Kondisi Drainase yang Buruk.....	60
Gambar 3.3	Aneka Kegiatan Pelatihan Pengembangan Ekonomi.....	64
Gambar 3.4	Aneka Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak.....	66
Gambar 3.5	Kegiatan Penyadaran dan Pencegahan HIV & AIDS.....	68
Gambar 3.6	Kegiatan Pengelolaan Sponsorship.....	71
Gambar 3.7	Siklus Manajemen Program dan Proyek WVI.....	75
Gambar 4.1	Ruang Pertemuan Gedung Srikandi.....	87
Gambar 4.2	Pertemuan Rutin Kader.....	102
Gambar 4.3	Kegiatan Pelatihan Konseling untuk Kader.....	104
Gambar 4.4	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan.....	109
Gambar 4.5	Kegiatan Simpan Pinjam ASCA.....	117
Gambar 4.6	Kegiatan Pameran Produk Kelompok Usaha Dampingan ADP...	118
Gambar 4.7	Skema Tahapan Program Pemberdayaan ADP Cilincing.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perubahan Kondisi Masyarakat.....	8
Tabel 1.2	Kelompok Dampungan ADP Cilincing.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Kelompok Dampungan di Kelurahan Cilincing.....	11
Tabel 1.4	Informan Penelitian.....	16
Tabel 2.1	Dimensi dan Karakteristik Kemiskinan Perkotaan.....	24
Tabel 2.2	Pengertian Pemberdayaan.....	31
Tabel 2.3	Indikator Pemberdayaan.....	41
Tabel 2.4	Perbandingan Antara Partisipasi Sebagai Cara dan Tujuan.....	48
Tabel 4.1	Tahapan dan Dinamika Kegiatan Program Pemberdayaan ADP	123
Tabel 4.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga.....	143



DAFTAR TABEL

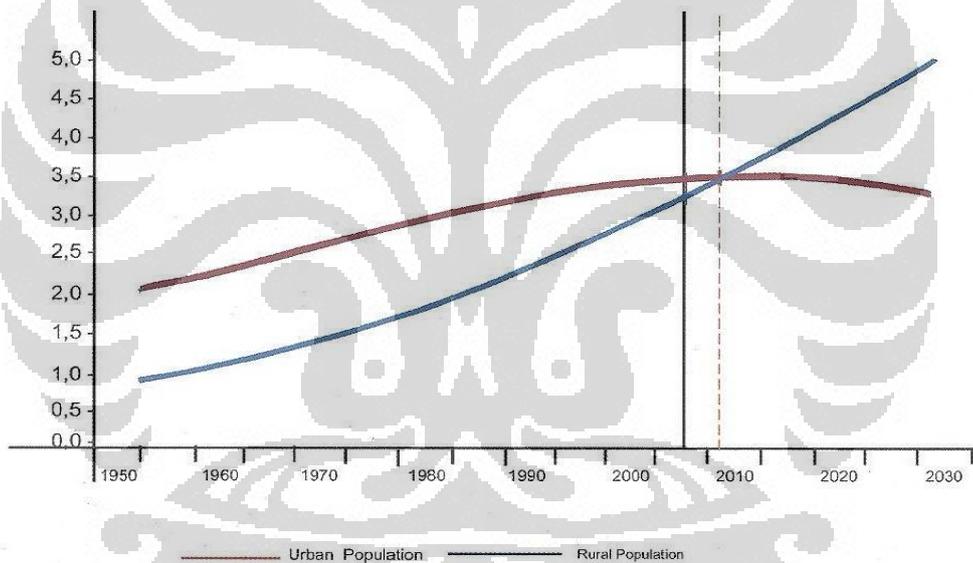
Tabel 1.1	Perubahan Kondisi Masyarakat.....	8
Tabel 1.2	Kelompok Dampungan ADP Cilincing.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Kelompok Dampungan di Kelurahan Cilincing.....	11
Tabel 1.4	Informan Penelitian.....	16
Tabel 2.1	Dimensi dan Karakteristik Kemiskinan Perkotaan.....	24
Tabel 2.2	Pengertian Pemberdayaan.....	31
Tabel 2.3	Indikator Pemberdayaan.....	41
Tabel 2.4	Perbandingan Antara Partisipasi Sebagai Cara dan Tujuan.....	48
Tabel 4.1	Tahapan dan Dinamika Kegiatan Program Pemberdayaan ADP	123
Tabel 4.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga.....	143



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota-kota di Dunia Ketiga berlangsung dengan amat pesat dimana setiap tahunnya berjuta-juta orang pindah dari desa ke kota. Laporan dari UN-Population Division 2005 menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Mei 2007, 50% populasi dunia ada di perkotaan atau sekitar 3.3 milyar jiwa dan diperkirakan pada tahun 2030, 80% populasi dunia atau 4 milyar jiwa akan menempati kota-kota di negara berkembang.



Gambar 1.1 Populasi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Global, 1950 - 2030

Sumber : UN Population Division, 2005

Bagi negara sedang berkembang, kebijakan pembangunan yang mengabaikan sektor pertanian telah menimbulkan kemandekan atau tidak memadainya pertumbuhan di daerah pedesaan. Di pihak lain kebijakan mengimpor teknologi padat modal secara besar-besaran untuk mencapai industrialisasi dengan segera telah menyebabkan pertumbuhan kesempatan kerja di kota tidak sesuai dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Ada ribuan

petani di pedesaan yang kehilangan tanah karena diterapkannya mekanisasi pertanian sebelum waktunya atau mengerjakan tanah pertanian yang sangat sempit akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Gejala ini menyebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran yang tentu saja harus diimbangi dengan kemampuan kota untuk menyediakan kesempatan kerja dan sarana pelayanan pokok seperti sanitasi, kesehatan, perumahan dan transportasi yang memadai bagi penduduknya yang bertambah dengan sangat pesat. Ketidakmampuan kota-kota untuk menanggulangi hal tersebut telah menciptakan kondisi yang disebut oleh Todaro dan Stillkind (1981) dalam Maning (1985) sebagai urbanisasi berlebih (*over-urbanization*).

Sebagai akibat dari urbanisasi berlebih tersebut maka akan meningkat jumlah pengangguran di perkotaan dan pada saat yang sama pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan dan transportasi yang memadai dan akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan seperti tumbuhnya daerah kumuh dan miskin, pencemaran udara, kebisingan, kemacetan lalu-lintas, kriminalitas dan lain-lain. Di seluruh dunia hampir 1 dari 3 penghuni perkotaan tinggal di wilayah perkampungan kumuh perkotaan '*slum*' (United Nations, 2005).

Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia sendiri merupakan salah-satu tingkat pertumbuhan yang tercepat di dunia. Berdasarkan laporan Mercy Corps (2008) yang mengutip laporan BPS 2007 bahwa angka pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1.1% per tahun sementara angka pertumbuhan penduduk di perkotaan Indonesia mencapai 3.3% per tahun dan khusus untuk Jakarta mencapai 1,06% per tahun. Sekitar 50% atau 114 juta jiwa penduduk tersebut tinggal di perkotaan. Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kota terbesar di Indonesia. Berdasarkan Sensus Penduduk BPS, jumlah penduduk Jakarta terus meningkat dari 2,7 juta di tahun 1960 menjadi 4,6 juta di tahun 1971, lalu 6,5 juta di tahun 1980, dan 8,3 juta di tahun 1990. Pada tahun 2011 telah mencapai 9,729 juta jiwa dan dengan luas wilayah 662,33 km² berarti kepadatannya mencapai 14,69 ribu penduduk / km² yang menjadikannya provinsi dengan wilayah penduduk terpadat di Indonesia (Biro Pusat Statistik DKI Jaya, 2012). Dengan kehadiran kota satelit di sekitar Jakarta

seperti Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor, pada siang hari jumlah ini diperkirakan meningkat mencapai 13 juta jiwa karena banyak warga yang tinggal di kota-kota tersebut bekerja di Jakarta.

Bila kita merujuk kepada kota Jakarta, bahwa sangatlah benar secara fisik kota ini berkembang dengan sangat pesat dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara semarak, jalan-jalan dipagari dengan gedung-gedung bertingkat, mall, plaza dan hotel berbintang serta jalanan disesaki oleh berbagai kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Secara ekonomi, sekitar 70 – 80 % uang yang beredar secara nasional, masih berputar-putar di Jakarta (Yustiana/Biar 2006) sehingga menjadikan Jakarta bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan, pusat jasa, pusat pendidikan, pusat industri, pusat investasi, dan segalanya. Kondisi ini pastinya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang yang mengharapkan mendapatkan bagian rezeki dari situasi tersebut. Namun tidak semua pendatang tersebut memiliki keterampilan yang memadai untuk dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan formal yang tersedia di Jakarta. Selanjutnya mereka inilah yang mengisi pekerjaan di sektor informal sebagai buruh kasar, pedagang asongan, pemulung, tukang sapu jalan dan lain-lain.

Dengan penghasilan yang terbatas bahkan cenderung kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik pangan, sandang dan papan, mereka inilah yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat miskin perkotaan dan di balik gedung-gedung tinggi yang berkilauan, mereka menempati pemukiman kumuh yang ada di sepanjang bantaran sungai Ciliwung, di tepi jalan kereta api dan di kolong jembatan. Banyak di antara warga kota yang tidak beruntung ini hidup di bawah standar kehidupan sosial yang normal dimana BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta bulan Maret 2011 tercatat 363,4 ribu jiwa (3.75%) dengan garis kemiskinan pada Rp 355,480 per kapita. Adapun wilayah kota administrasi Jakarta Utara menempati posisi kedua untuk jumlah terbesar penduduk miskin yang mencapai 76,200 jiwa sesuai dengan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2010 (BPS Prov DKI Jaya, 2010).

Pemerintah sendiri telah terus menerus mengupayakan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Salah satunya

adalah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dimana ada empat instrument utama penanggulangan kemiskinan tersebut yakni (Instrument, 2011):

- a. Instrumen utama pertama (klaster I) adalah bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuan yang hendak dicapai dari klaster ini adalah mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi
- b. Klaster II adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai melalui klaster ini adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Klaster III adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Adapun tujuan dari klaster ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- d. Klaster IV merupakan upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat yang dilakukan melalui berbagai program seperti: Program Rumah Sangat Murah; Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; Program Air Bersih Untuk Rakyat; Program Listrik Murah dan Hemat dan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan pada instrument kluster di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu bertumpu kepada upaya memberdayakan masyarakat sehingga warga memiliki daya dan kemampuan untuk terlibat aktif dan pada akhirnya dapat menentukan sendiri kehidupannya dengan memanfaatkan program-program yang dikelola oleh pemerintah. Ada berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah baik yang telah dilaksanakan di masa lalu seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (P2K), maupun yang masih berlangsung sampai saat ini seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Proyek Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan lain-lain menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana secara spesifik dinyatakan dalam instrument klaster II dan III di atas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menetapkan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program prioritas daerah yang menjadi bagian dalam apa yang disebut Program *Dedicated* yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektoral, berskala besar dan memberikan urgensi yang tinggi serta memberikan dampak yang luas kepada masyarakat dan bersifat *multiyears*. Program *Dedicated* ini terdiri atas dua program yakni program pertama bersifat pembangunan fisik seperti pembangunan dan pengembangan sarana pengendalian banjir, perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pemukiman dan penyediaan air bersih), pengelolaan bencana serta antisipasi perubahan iklim. Yang kedua adalah program di bidang sosial, dimana program *Dedicated* ini meliputi upaya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan (Bappeda DKI Jakarta, 2011). Adapun upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) berupa penyediaan Dana Bergulir melalui Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) senilai total Rp 271,577,125,000 (2008-2010) maupun Dana Bina Fisik dan Sosial senilai total Rp 88,000,000,000 (Pemprov DKI Jakarta, 2010).

PPMK yang dimulai sejak tahun 2001 ini dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan warga kota Jakarta dan menjadikan mereka lebih berdaya serta tidak bergantung kepada pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Tiga pilar utama PPMK adalah Bina Ekonomi berupa pemberian dana pinjaman bergulir kepada warga yang membutuhkan, Bina Fisik dan Lingkungan berupa dana hibah yang disalurkan kepada warga untuk memperbaiki sarana-prasarana di RW mereka dengan cara gotong royong serta Bina Sosial berupa hibah yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan keterampilan bagi para warga yang belum mempunyai pekerjaan tetap atau

mereka yang membutuhkan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian dan hidup mereka.

Temuan evaluasi terhadap pelaksanaan PPMK pada periode 2001 – 2005 yang dilaksanakan oleh UKM Center Fakultas Ekonomi UI menunjukkan bahwa mayoritas responden (92,55%) yang berasal dari 267 kelurahan menyatakan pendapatannya meningkat (UKM Center FE-UI, 2006). Pencapaian lainnya setelah PPMK berjalan hampir 10 tahun adalah terjadinya proses pembelajaran berdemokrasi yang didapat oleh warga Jakarta dimana warga di setiap kelurahan yang berpartisipasi dalam PPMK dilibatkan dalam musyawarah menentukan prioritas utama yang perlu dilaksanakan dalam lingkungan mereka dan selanjutnya melakukan pengambilan keputusan bersama dalam kelompok. Warga disadarkan bahwa demokrasi menuntut keterbukaan, transparansi dan tanggungjawab. Proses ini mempertemukan anggota warga satu sama lain sehingga fungsi Rukun Warga sebagai jaringan sosial yang mengikat semua warga dihidupkan kembali oleh PPMK (Mirah, 2010). PPMK ini diimplementasikan di DKI Jakarta bersamaan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat berskala nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Selain pemerintah maka upaya menanggulangi masalah kemiskinan tersebut juga melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang salah satu di antaranya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi Non Pemerintah di Indonesia yang berbentuk LSM biasanya adalah sebuah organisasi massa yang memberikan perhatian pada upaya pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak serta turut berperan aktif dalam memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Karenanya visi dari LSM adalah memperkuat masyarakat sipil dengan program kemasyarakatan yang mendasar dan melakukan aktivitas advokasi pada tingkat akar rumput. LSM juga turut ambil bagian melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia di mana salah satu di antara LSM tersebut adalah Wahana Visi Indonesia (WVI).

Bila beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan SMERU (2011) tentang Monitoring Rumah Tangga Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat di 3 kelurahan di Jakarta maupun penelitian INFID (2012) tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat lebih menyoroti kepada upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program pemerintah seperti PNPM Mandiri, P2KP dan PPMK maka penelitian ini mencoba melihat bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh WVI di salah-satu wilayah damingannya di Jakarta. Temuan SMERU (2011) menyebutkan bahwa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, PPMK dan P2KP kurang begitu dikenal keberadaannya oleh rumah tangga sasaran di wilayah penelitian sekalipun beberapa di antara mereka terlibat sebagai pekerja proyek sehingga hasil yang diharapkan dari program pemberdayaan tersebut belum terwujud secara optimal. Sementara temuan INFID (2012) menyatakan bahwa pelaksanaan proyek PNPM tidak berdampak kepada peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin di wilayah penelitian karena lebih berfokus kepada terlaksananya program bukan kepada pembangunan manusianya. Sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana kondisi warga dampingan yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh WVI.

1.2 Perumusan Permasalahan

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian pada pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan melalui berbagai kegiatan membantu masyarakat. Adapun di wilayah Kecamatan Cilincing, WVI melaksanakan program pengembangan masyarakat yang disebut *Area Development Program* (ADP) di empat kelurahan yakni Cilincing, Kalibaru, Semper Barat dan Marunda yang terdiri atas program pemberdayaan kesehatan masyarakat dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah meningkatnya kondisi kesehatan ibu dan anak balita dan meningkatnya penghasilan warga masyarakat serta terbukanya akses yang lebih luas bagi kelompok usia produktif kepada kesempatan kerja dan usaha sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan anak laki-laki dan perempuan di wilayah dampingan.

Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan akan berlangsung sampai dengan tahun 2015. Fokus utama dalam program yang dilaksanakan oleh WVI tersebut adalah upaya penyadaran dan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan lapangan selama proses berlangsung. Adapun kelompok sasaran yang menjadi target dari kegiatan penguatan kapasitas adalah para kader kesehatan masyarakat dan para pengusaha mikro. Kegiatan penguatan kapasitas dilakukan bekerjasama dengan berbagai lembaga baik institusi pemerintah maupun swasta seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota serta Puskesmas, lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan keterampilan, lembaga keuangan mikro serta konsultan usaha. Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini diharapkan para kader kesehatan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kegiatan posyandu dan kelas ibu hamil serta kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Sementara para pengusaha mikro dapat mengelola dan mengembangkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penghasilan.

Setelah hampir satu dekade lebih tim WVI menjalankan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak maupun pengembangan ekonomi, tampaknya intervensi ADP Cilincing bersama-sama dengan intervensi dari pihak lainnya di wilayah sasaran turut berkontribusi pada perubahan-perubahan masyarakat dampingan sebagaimana hasil evaluasi yang secara berkala dilakukan oleh tim WVI di lapangan seperti tertera pada tabel 1.1. berikut

Tabel 1.1 Perubahan Kondisi Masyarakat

Bidang	2005	2008
Pendidikan:		
Anak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun	44,4 %	79,3%
Kesehatan :		
• anak usia 6-18 tahun tidak pernah sakit diare dalam 2 minggu terakhir menjelang survey dilakukan	85,5%	96,9%
• anak tidak pernah sakit demam berdarah dalam setahun terakhir	94,6%	99,2%

• anak tidak pernah sakit ISPA dalam setahun terakhir	76,7%	80,8%
Pengembangan Ekonomi: Tingkat pengeluaran keluarga lebih besar dari USD 1 per hari per anggota keluarga atau Rp 1,500,000 per bulan untuk kk dengan 5 jiwa	24,5%	14,1%

Sumber : WVI 2005; 2008

Berdasarkan tabel di atas maka intervensi program ADP berkontribusi terhadap meningkatnya proporsi anak usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun maupun meningkatnya kondisi kesehatan anak. Akan tetapi secara ekonomi, intervensi program ADP belum mampu menghasilkan peningkatan daya beli dari keluarga miskin yang menjadi dampingan program sebagaimana harapan dari dilaksanakannya upaya pemberdayaan ekonomi tersebut.

Dari sisi keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan program ADP, maka berdasarkan data profil ADP Cilincing tahun 2012 terdapat 95 kelompok kader posyandu, 10 kelompok kader kelas ibu hamil dan 13 kelompok usaha bersama di empat wilayah kelurahan dampingan ADP Cilincing sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Kelompok Dampingan ADP Cilincing

No	Keterangan	Kel. Cilincing	Kel. Kalibaru	Kel. Semper Barat	Kel. Marunda
1	Jumlah posyandu dampingan	24	25	27	19
2	Jumlah kader posyandu aktif di posyandu dampingan	120	75	81	90
3	Jumlah kelompok pos ibu hamil dampingan	4	2	3	1
4	Jumlah kader pendamping pos bumil	10	6	8	3
5	Jumlah kelompok usaha bersama dampingan	5	4	1	3
6	Jumlah anggota aktif kelompok usaha dampingan	20	5	2	10

Sumber : WVI, 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kader pendamping untuk kegiatan posyandu dan kelas ibu hamil serta anggota kelompok usaha lebih

banyak terdapat di kelurahan Cilincing dibandingkan kelurahan lainnya. Antusiasme kader tersebut juga terlihat dari peran yang mereka lakukan di kegiatan pendampingan ADP di mana ada yang melakukan peran baik sebagai kader di posyandu maupun di kelas ibu hamil. Pada saat yang sama selain terlibat dalam kegiatan program ADP, kader tersebut juga terlibat aktif dalam kegiatan program kesehatan pemerintah seperti menjadi kader jumantik (juru pemantau jentik) ataupun kader RW Siaga. Kehadiran kader ini menjadi motor penggerak aktivitas di lapangan karena mereka yang dalam kesehariannya adalah warga setempat di lokasi dampingan. Di tahun 2008 ada total 71 kelompok kader posyandu yang terlibat dalam pendampingan ADP dan jumlah tersebut meningkat menjadi 95 kelompok di tahun 2012.

Sementara itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan ADP melalui kegiatan pelatihan usaha kecil, pengelolaan ekonomi rumah tangga maupun pengembangan usaha tersebut nampaknya menunjukkan kondisi yang berbeda dibandingkan dengan upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat bila dilihat. Hal ini ditunjukkan dari hasil TDI survey dimana pada tahun 2005 hanya 13,7% warga dampingan yang terlibat dalam kelompok usaha kecil (WVI, 2005) dan di tahun 2008 menjadi 37,6% (WVI, 2008). Tercatat ada 19 kelompok usaha kecil yang didampingi oleh ADP di tahun 2008 tersebut dan dari jumlah tersebut berkurang sehingga hanya mencapai 12 kelompok di tahun 2012.

Khususnya di wilayah kelurahan Cilincing yang menjadi lokasi penelitian ini maka ditemukan juga kondisi dimana keterlibatan warga dampingan lebih tinggi pada kegiatan di bidang kesehatan dibandingkan di bidang ekonomi, sekalipun pendampingan kelompok kesehatan baru dilakukan secara intensif sejak tahun 2007 sementara untuk kelompok usaha sudah dilakukan sejak masa awal program ADP dijalankan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.3 berikut. Terjadi peningkatan partisipasi di kelompok kesehatan sementara hal sebaliknya terjadi pada kelompok ekonomi.

Tabel 1.3 Jumlah Kelompok Dampungan di kel. Cilincing

Tahun	Ekonomi	Kesehatan
2003	2 KUB (88 anggota)	-
2004	13 KUB (182 anggota)	-
2005	11 KUB (237 anggota)	-
2006	5 KUB (72 anggota)	-
2007	5 KUB + 9 KPK (142 anggota)	22 posyandu (78 kader)
2008	5 KUB + 7 KPK (129 anggota)	22 posyandu (88 kader)
2009	5 KUB + 5 KPK (83 anggota)	22 posyandu + 2 pos bumil (95 kader)
2010	5 KUB + 6 KPK (62 anggota)	24 posyandu + 3 pos bumil (108 kader)
2011	5 KUB + 5 KPK (45 anggota)	24 posyandu + 3 pos bumil (121 kader)
2012	5 KUB + 3 KPK (34 anggota)	24 posyandu + 4 pos bumil (130 kader)

Sumber :telah diolah kembali

Kondisi di atas tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena sekalipun sudah hampir 12 tahun program ADP berlangsung di wilayah dampungan dan sejauh ini tim ADP telah mengupayakan keterlibatan aktif warga dampungan dalam berbagai tahap program seperti identifikasi permasalahan, perumusan rencana kegiatan dan pelaksanaannya, namun pada kenyataannya terdapat perbedaan cukup signifikan dalam tingkat keterlibatan warga pada kegiatan pemberdayaan ekonomi maupun kesehatan yang dilakukan oleh tim ADP Cilincing tersebut. Padahal peran aktif masyarakat merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Adanya partisipasi menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan dari warga dampungan untuk melakukan suatu perubahan bagi dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. Semakin banyak warga yang terlibat aktif maka menunjukkan adanya kepemilikan terhadap proses pemberdayaan yang sedang dibangun maupun tujuan yang ingin dicapai oleh pemberdayaan itu sendiri.

Untuk mendalami lebih jauh hal-hal yang berhubungan dengan ini maka penulis mencoba melihat kembali upaya pemberdayaan yang telah dilakukan WVI kepada warga dampungan khususnya pada kelompok sasaran pendampungan dari kegiatan penguatan kapasitas yakni kelompok kader kesehatan masyarakat dan kelompok pengusaha serta bagaimana upaya pemberdayaan itu dilakukan.

Selanjutnya juga akan didalami hal-hal apa saja yang mempengaruhi keterlibatan kelompok sasaran dalam upaya pemberdayaan tersebut. Untuk kebutuhan penelitian ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemberdayaan tersebut dilaksanakan kepada kelompok dampingan (di bidang kesehatan dan peningkatan ekonomi) tersebut dan dinamika kelompok yang terjadi ?
- b. Hal apa saja yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bagaimana upaya pemberdayaan tersebut dilaksanakan kepada kelompok dampingan (di bidang kesehatan dan peningkatan ekonomi).
- b. Menganalisis hal apa saja yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan tersebut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi WVI khususnya ADP Cilincing dalam mengembangkan strategi implementasi programnya di masa mendatang khususnya lagi dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat miskin dalam konteks perkotaan untuk pelayanan WVI di wilayah perkotaan lainnya sehingga pada akhirnya dapat memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat yang dilayani.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar-belakang dan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh WVI serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, maka pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif sendiri merupakan salah satu pendekatan yang dipakai dalam penelitian sosial di samping pendekatan kuantitatif, pendekatan emansipatoris dan pendekatan feminis (Alston & Bowles, 1998, p. 1) . Rubin & Babbie (2001, p. 44) menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha menemukan makna terdalam dari pengalaman khusus manusia dan bertujuan untuk menghasilkan observasi yang secara teoritis lebih kaya dan tidak mudah direduksi dalam bentuk angka. Oleh karena itu pendekatan kualitatif ini menghasilkan data berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

1.5.2 Jenis Penelitian

Untuk menggambarkan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia kepada kelompok dampingan di bidang kesehatan dan pengembangan ekonomi serta menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Neuman (2006, p. 33 – 35) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ingin menggambarkan suatu hal dengan kata-kata dan menyampaikan suatu profil, tipe-tipe klasifikasi dan gambaran besar dari langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Sementara itu berdasarkan jangka waktu informasi yang dipakai dalam penelitian ini maka digunakan penelitian *cross sectional* yakni penelitian yang menyelidiki informasi dari banyak kasus pada suatu kurun waktu tertentu saja (Neuman, 2006, p. 36-40). Untuk itu maka peneliti menyelidiki informasi secara mendalam

dari informan mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program ADP selama periode tahun 2001 – 2012.

1.5.3 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pada penelitian ini lokasi pengumpulan data adalah di kelurahan Cilincing di mana WVI melakukan program pemberdayaan masyarakat. Lokasi ini dipilih karena:

- Kelurahan Cilincing merupakan wilayah pertama dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat perkotaan WVI
- Jumlah kelompok dampingan WVI yang paling besar di kecamatan Cilincing sehingga intensitas pendampingan WVI lebih tinggi

Sementara waktu pengumpulan data dilakukan pada periode bulan Mei – November 2012.

1.5.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih peneliti harus dapat memberikan gambaran mengenai upaya pemberdayaan yang dilakukan WVI kepada kelompok dampingan serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan WVI. Untuk itu ada tiga kelompok informan yang menjadi sumber informasi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Lembaga pelaksana program :

Informan dari lembaga pelaksana program adalah petugas lapangan proyek ADP Cilincing yang mendampingi warga sasaran, baik yang bekerja langsung maupun tidak langsung di lapangan. Informan tersebut dapat menjelaskan secara rinci rangkaian kegiatan program pemberdayaan kesehatan dan ekonomi yang terjadi di lapangan

b. Masyarakat:

Informan dari masyarakat adalah anggota masyarakat yang terlibat sebagai warga dampingan ataupun mitra dalam rangkaian kegiatan program pemberdayaan kesehatan dan ekonomi masyarakat ADP Cilincing. Informan

tersebut dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam rangkaian kegiatan program pemberdayaan kesehatan dan ekonomi di lapangan

c. Pemerintah:

Informan dari pemerintah adalah staf institusi pemerintah yang terlibat sebagai mitra WVI dalam rangkaian kegiatan program pemberdayaan kesehatan dan ekonomi masyarakat ADP Cilincing. Informan tersebut dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam rangkaian kegiatan program pemberdayaan kesehatan dan ekonomi di lapangan

Sampel adalah sekumpulan kecil kasus, orang atau kejadian yang dipilih oleh peneliti dari suatu kumpulan kasus yang lebih besar dan digeneralisir kepada populasi. (Neuman, 2006, p. 219). Untuk penelitian kualitatif ini maka digunakan *non probability sampling* (sampel ditentukan tidak secara acak) atau *non random sampling* dengan teknik pemilihan sampel secara *purposive sample*. Dengan teknik ini maka peneliti dari awal telah memilih atau menetapkan sejumlah sampel untuk sebuah tujuan tertentu. Untuk itu sebelum peneliti menetapkan sampel terpilih maka peneliti harus memiliki pengetahuan pendahuluan yang memberikan petunjuk tentang kelompok atau individu tertentu yang penting dan tepat bagi penelitian tersebut. (Alston & Bowles, 1998, p. 92). Kelompok atau individu yang akan memberikan informasi di atas disebut informan yang artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait dengan tujuan penelitian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan informan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menemui Program Manager ADP Cilincing dan berdasarkan keterangan dari Program Manager ADP Cilincing diperoleh keterangan tentang siapa saja di lembaga WVI yang terlibat dalam program pemberdayaan kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat yakni selain program manager juga ada petugas fasilitator lapangan yang melakukan pendampingan sehari-hari kepada warga serta petugas monitoring dan evaluasi yang melakukan monitoring dan pendokumentasian kegiatan pemberdayaan di lapangan serta secara berkala memberikan masukan atau evaluasi terhadap pencapaian kegiatan.

- b. Dari wawancara dengan petugas fasilitator lapangan, diperoleh secara spesifik warga dampingan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana untuk kegiatan kesehatan adalah kader-kader kesehatan di posyandu dan kelas ibu hamil. Sementara untuk kegiatan pengembangan ekonomi adalah anggota kelompok usaha. Di samping informan yang berasal dari warga dampingan, petugas fasilitator lapangan menyebutkan juga keterlibatan tim penggerak PKK kelurahan, aparat RT / RW dan KSM Program Masyarakat Cilincing (PMC) dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Adapun KSM PMC tersebut adalah mitra ADP yang memayungi aktivitas kelompok usaha di wilayah dampingan. Sementara dari pihak pemerintah setempat ada petugas kelurahan maupun petugas puskesmas yang selama ini turut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

Total ada 19 informan yang ditemui untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4 Informan Penelitian

Informasi yang diharapkan	Informan		Jumlah
- Kegiatan pemberdayaan kesehatan dan ekonomi ADP Cilincing beserta proses yang terjadi di lapangan - Dukungan dan hambatan dalam keterlibatan program	WVI	Program Manager ADP Cilincing Petugas Fasilitator Lapangan Petugas Monitoring dan Evaluasi	1 orang 5 orang 2 orang
	Masyarakat	Kader kesehatan posyandu Anggota kelompok usaha kecil Ketua Rt / Rw wilayah dampingan Tim Penggerak PKK Kelurahan KSM Program Masyarakat Cilincing	3 orang 3 orang 2 orang 1 orang 1 orang
	Pemerintah	Puskesmas Kelurahan Cilincing	1 orang

Sumber : Wawancara dengan Program Manager dan Petugas Fasilitator Lapangan ADP

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diambil untuk keperluan penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen.

Adapun urutan pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan metode studi literatur dan dokumen terlebih dahulu dengan tujuan untuk memperoleh data awal terkait program ADP Cilincing dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan observasi kepada para informan yang telah ditentukan.

a. Studi literatur dan dokumentasi

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori dan penjelasan yang berkaitan dengan kerangka pemikiran permasalahan penelitian berdasarkan studi perpustakaan atas literatur ilmiah yang ada sementara studi dokumentasi dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan dan mempelajari dokumen-dokumen, laporan-laporan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari WVI dan kantor kelurahan Cilincing.

b. Wawancara mendalam

Untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata sebagai sumber utama penelitian ini maka dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dan semi terstruktur. Wawancara seperti ini bertujuan untuk melihat suatu kondisi dari mata informan sebanyak mungkin, mengeksplorasi pemikiran dan perasaannya dan memahami secara menyeluruh pandangan-pandangannya. Yang paling utama dalam wawancara mendalam ini adalah mendapatkan kondisi sesungguhnya dari seseorang yang diwawancarai termasuk penggunaan kata dan tata bahasanya (Alston & Bowles, 1998, p. 120) Adapun informan yang diwawancarai secara mendalam adalah meliputi semua informan yang ditetapkan di dalam tabel 1.4, diawali dengan mewawancarai staf WVI kemudian dilanjutkan dengan wawancara warga dampingan yang merupakan bagian dari kelompok kesehatan dan ekonomi serta wawancara dengan pihak pemangku kepentingan setempat.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi dan benda serta rekaman gambar. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan:

- Melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai aktivitas pemberdayaan kesehatan dan ekonomi masyarakat di wilayah penelitian

- Melakukan rekaman gambar yang dirasa perlu dan mendukung data penelitian

1.5.6 Teknik Analisa Data

Analisa data terdiri dari mengorganisir data; membaca keseluruhan informasi dan memberi kode; selanjutnya peneliti mengembangkan dan menggambarkan suatu acuan yang menerangkan keadaan sosial, sejarah, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi peristiwa. (Alston & Bowles, 1998, p.193-195). Proses analisa dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah data yang diperoleh di lapangan dari berbagai sumber atau informasi baik melalui wawancara individual, observasi maupun dokumen. Data-data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah kemudian dianalisa.

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengorganisasikan data, dimana data yang terkumpul dari obyek penelitian merupakan data mentah yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan transkrip wawancara. Data yang terhimpun kemudian diorganisasikan dan diseleksi berdasarkan kebutuhan fokus penelitian.
- Pengelolaan data meliputi mereview data, menyatukan data, memformulasikan kategori dan mengorganisasikan menjadi kategori yang sama atau dikodekan serta menghubungkan informasi dengan data non interview.
- Verifikasi dan penafsiran data, berupa upaya untuk mencari suatu hubungan persamaan atau kesimpulan yang muncul seiring dengan semakin banyaknya dukungan data yang diperoleh, termasuk di dalamnya mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan dan penjelasan yang dibutuhkan dalam pembahasan, kemudian ditafsirkan sesuai dengan pola-pola yang ditemukan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengelolaan data berupa penjelasan rinci berdasarkan teori yang diperoleh dari berbagai literatur dengan data yang diperoleh dari lapangan.
- Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melakukan generalisasi dari hasil verifikasi dan penafsiran.

1.5.7 Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif terdapat standar khusus yang perlu dipenuhi sehingga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri. Lincoln dan Guba (Marshall & Rossman, 1989, p.144-147) beserta Krefting (1991, p. 214-222) menyebutkan setidaknya terdapat empat standar atau kriteria utama yang dapat menjamin kepercayaan dan kebenaran hasil penelitian, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Maka beberapa teknik digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini yakni

- Untuk memenuhi standar kredibilitas, dilakukan teknik triangulasi pada metode dan sumber data sehingga kebenaran data yang diperoleh melalui suatu metode atau dari suatu sumber data dapat dicek dengan data yang diperoleh melalui metode dan sumber data yang lain. Hal ini antara lain dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan yang sama untuk beberapa informan yang berbeda sehingga jika ditemukan jawaban yang berbeda maka akan dilakukan pengecekan ulang atas hasil temuan. Selain itu dapat dilakukan juga teknik *prolonged engagement* yakni tidak terburu-buru membawa data untuk dianalisa sebelum tercipta *rapport* waktu pengambilan data di lapangan. Dalam hal ini dilakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh dalam suatu kurun waktu tertentu sehingga diperoleh informasi yang ‘apa adanya’, mendalam dan berkaitan dengan topik penelitian.
- Untuk memenuhi standar dependabilitas maka teknik yang dipergunakan adalah triangulasi, dimana data yang didapat dalam peneliti selama meneliti kemudian dicek dan ricek untuk mendapatkan data akhir penelitian yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Untuk memenuhi standar konfirmabilitas pada penelitian maka dilakukan dengan cara melibatkan seseorang yang independen yang melakukan review terhadap proses penelitian dan mutu hasil penelitian dengan memperhatikan catatan / rekaman data lapangan. Dalam hal ini maka pembimbing thesis melakukan penilaian atau review terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.5.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ADP Cilincing serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan di dalamnya ini menghadapi kondisi yang berpotensi menyebabkan keterbatasan atau biasanya hasil penelitian yakni adanya hubungan struktural antara informan dari lembaga pengelola program dengan peneliti, dimana peneliti juga merupakan staf Wahana Visi Indonesia yang turut mensupervisi manajemen ADP Cilincing. Kekhawatiran bahwa informasi yang disampaikan oleh staf ADP Cilincing tersebut kurang menggambarkan situasi sesungguhnya yang terjadi di lapangan akan dikonfrontir atau ditriangulasi dengan keterangan dari informan lainnya yang bukan staf lembaga program. Sehingga dengan cara ini kredibilitas informasi dapat tetap dipertahankan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi atas lima bab. Bab pertama berisikan latar-belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, termasuk di dalamnya adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data dan analisa data serta teknik meningkatkan kualitas penelitian.

Bab dua adalah bagian yang berisi kerangka pemikiran. Ada empat konsep pemikiran yang digunakan sebagai kerangka pemikirannya yang juga digunakan sebagai alat menganalisa hasil temuan yakni kemiskinan dan hubungannya dengan upaya pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam konsep pemberdayaan manusia sebagai upaya mengatasi kemiskinan dibahas tentang pengertian, tujuan dan sasaran pemberdayaan manusia, pemberdayaan sebagai proses dan program beserta tahapan-tahapannya, strategi pemberdayaan manusia dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat tercapainya tujuan dari upaya pemberdayaan. Pada bagian ini tahapan dalam program pemberdayaan menurut Adi serta tiga langkah pemberdayaan masyarakat dari Kartasasmita menjadi kerangka pemikiran untuk membahas hasil temuan lapangan terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Pada bagian partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dibahas tentang karakteristik tipologi partisipasi, manfaat partisipasi serta faktor-faktor yang mendukung serta menghambat partisipasi masyarakat dengan merujuk

kepada teori partisipasi menurut Ife yang menjadi kerangka pemikiran membahas hasil temuan penelitian tentang keterlibatan warga dampingan dalam upaya pemberdayaan.

Bab tiga adalah gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan tentang geografis kelurahan Cilincing, kondisi lingkungan dan demografis masyarakat serta sosial dan budayanya. Gambaran umum tentang Wahana Visi Indonesia yang berisi tentang latar-belakang keberadaan Wahana Visi Indonesia beserta program utama yang dilakukannya di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia melalui program pengembangan masyarakat ADP Cilincing serta tahapan-tahapan dalam implementasi ADP Cilincing.

Bab empat terdiri atas dua bagian yakni bagian pertama adalah hasil temuan penelitian berupa bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat berlangsung terhadap kelompok dampingan di bidang kesehatan dan pengembangan ekonomi dalam tiap tahapan program ADP serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam upayan pemberdayaan masyarakat tersebut. Bagian berikutnya adalah pembahasan hasil temuan yang menguraikan analisis terhadap data lapangan yang telah digambarkan pada bagian temuan pada bab empat. Analisis didasarkan pada kerangka teori yang telah dipaparkan pada bab dua. Analisis tersebut akan diuraikan berdasarkan upaya pemberdayaan yang berlangsung dalam setiap tahapan program serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bab lima berisikan kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan tentang hasil penelitian secara keseluruhan dan saran yang diajukan berdasarkan hasil temuan lapangan.

BAB 2 KEMISKINAN, PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1 Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional. Untuk itu Spicker (2006) mengelompokkan berbagai definisi kemiskinan dari kalangan ahli di dunia barat tersebut dalam 4 kluster besar sebagaimana tertera di bawah ini:

a. Kemiskinan sebagai konsep material

Kemiskinan konteks ini berbicara tentang tiga hal yakni (1) ketidakmampuan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar, (2) adanya pola kekurangan fisik dan mental yang parah, dan (3) kondisi kekurangan tersebut diakibatkan oleh terbatasnya sumber daya

b. Kemiskinan sebagai keadaan ekonomi

Dalam kluster ini kemiskinan dihubungkan dengan tiga hal yakni (1) adanya suatu standar kehidupan tertentu yang menentukan seseorang miskin atau tidak, (2) ketidaksetaraan (*inequality*) dimana orang miskin dianggap tidak setara dibandingkan dengan orang lainnya dan (3) posisi ekonomi atau kepemilikan sumber daya yang berbeda menjadi indikator untuk menentukan posisi sosial seseorang atau kelompok.

c. Kemiskinan sebagai keadaan sosial

Kemiskinan sebagai keadaan sosial ini berhubungan dengan (1) pengelompokan berdasarkan status sosial / kelas sosial, (2) ketergantungan kepada pihak lainnya, (3) kekurangan rasa aman yang mendasar, (4) kekurangan kemampuan untuk menikmati hak (*entitlement*) yang mendasar dan (5) pengabaian (*exclusion*) untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan normal.

d. Kemiskinan sebagai sebuah penilaian moral

Kemiskinan merupakan suatu hal yang membawa implikasi dan kewajiban moral bahwa sesuatu harus dilakukan untuk meresponi kondisi kemiskinan tersebut. Jadi bila kita mendeskripsikan seseorang atau sekelompok orang miskin maka ini berimplikasi bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan terhadap kelompok orang miskin tersebut. Maka kemiskinan merupakan kondisi kesulitan yang tidak bisa diterima (*unacceptable hardship*).

Di Indonesia, acuan yang digunakan adalah sesuai dengan kriteria Biro Pusat Statistik dimana kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yakni sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2,100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. Sementara itu secara internasional umumnya digunakan acuan Bank Dunia yang menetapkan kemiskinan absolut atau mutlak adalah hidup dengan pendapatan di bawah 1 USD per hari. Cara pengukuran yang merujuk kepada suatu standar garis kemiskinan ini disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Sementara kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan pihak lainnya (Sumodiningrat, Santoso, & Maiwan, 1999, p. 3).

Di samping itu Setiadi dan Kolip (2011) menyebutkan bahwa terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab dan asal mula kemiskinan yakni (1) kemiskinan alamiah yakni kondisi miskin karena tidak memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai maupun disebabkan oleh faktor alami seperti cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam (2) kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang terjadi karena faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan (3) kemiskinan kultural yang mengacu kepada sikap dan gaya hidup seperti malas, tidak disiplin dan boros.

Lewis dalam Suparlan (1993, p. 5) menambahkan bahwa kemiskinan kultural cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi sebagai berikut (1) sistem ekonomi dan produksi yang berorientasi pada keuntungan (2) tingginya tingkat pengangguran bagi tenaga tidak trampil (3) rendahnya upah buruh (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral serta (6) kuatnya nilai-nilai pada kelompok kelas yang berkuasa yang menekankan pada penumpukan harta kekayaan dan adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil dari ketidakmampuan pribadi atau pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. Adapun ciri-ciri dari pengaruh kemiskinan kultural ini pada warga miskin menurut Lewis adalah (1) kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin terhadap lembaga masyarakat karena perasaan ketakutan, kecurigaan maupun apatis (2) pada tingkat komunitas lokal, secara fisik ditemui di pemukiman padat, penuh sesak dan kumuh dan rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti (3) pada tingkat keluarga, ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurangnya pengasuhan oleh orangtua, hidup bersama atau kawin bersyarat, dan kecenderungan ke arah keluarga matrilineal (4) pada tingkat individu, ciri-ciri yang utama adalah kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri.

Matriks berikut menunjukkan dimensi dan karakteristik kemiskinan di perkotaan

Tabel 2.1 Dimensi dan Karakteristik Kemiskinan di Perkotaan

Dimensi	Karakteristik
Pendapatan tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan konsumsi kebutuhan pokok yang tidak memadai - Masalah hutang dengan bunga tinggi
Kepemilikan asset yang tidak memadai, tidak stabil atau beresiko	<ul style="list-style-type: none"> - Asset termasuk material dan non material (perumahan, pendidikan, dll) - Asset perorangan, rumahtangga dan komunitas
Perumahan yang tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas buruk

	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan tinggi - Lingkungan tidak aman
Prasarana infrastructure yang tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pipa air minum, sanitasi, drainase, pembuangan sampah, jalan dan trotoar, listrik
Pelayanan publik dasar yang tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pendidikan, kesehatan, transportasi - Pelayanan kondisi darurat - Penegakan hukum, akte tanah - Akses micro finance
Jaring Pengaman Sosial Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, makanan, dll
Perlindungan hukum bagi kelompok miskin tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Hak politik dan sipil - Perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi - Perlindungan terhadap tindakan kekerasan dan kriminilitas
Kurangnya perwakilan dan suara politik	<ul style="list-style-type: none"> - Sedikit atau tidak ada kemungkinan memperoleh hak, mengajukan tuntutan, mendapatkan kesempatan yang adil atau respon yang memadai - Tidak adanya perangkat untuk memastikan akuntabilitas dari instansi pemerintah, LSM, badan bantuan dan swasta

Sumber : Satterthwaite, 2001, 137 - 157

Kondisi kemiskinan tersebut tentu saja membutuhkan upaya penanggulangan secara konseptual, di mana menurut Wrihatnolo (2007, p. 33-34) ada empat jalur strategi pelaksanaannya yakni (1) perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup berkelanjutan lewat penciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang mendukung (2) pemberdayaan masyarakat melalui upaya penguatan kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar (3) peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan (4) perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman

dan perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar dan penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

Untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut maka menurut Kartasasmita (1996) diperlukan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan baik yang sifatnya tidak langsung, yakni kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan yakni adanya stabilitas ekonomi, sosial dan politik dan kebijakan ini erat hubungannya dengan strategi pertama penanggulangan kemiskinan yakni adanya perluasan kesempatan. Yang berikutnya adalah adanya kebijakan yang ditujukan langsung kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah agar terjadi perbaikan pada kondisi kehidupan mereka melalui tersedianya program pembangunan sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini berkaitan dengan strategi perluasan kesempatan maupun strategi perlindungan sosial. Sementara untuk menjamin kelancaran terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut maka perlu tersedia kebijakan khusus untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri maupun aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang konsisten dan berkesinambungan.

2.2 Pembangunan yang Berpusat pada Manusia

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana dan terukur yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bernegara yakni masyarakat yang makmur dan sejahtera secara adil dan merata. Kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi yang diukur dengan tingkat produksi, pengeluaran dan pendapatan, sementara tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek non ekonomi seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Menurut Hadad sebagaimana dikutip Adi (2008) menyebutkan ada lima pendekatan utama yang terkait dengan pembangunan ekonomi yakni pendekatan pertumbuhan, pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma

ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok dan pendekatan kemandirian. Sementara itu pendekatan pembangunan sosial pada intinya adalah pembangunan yang berpusat pada manusia dimana upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat difokuskan kepada upaya pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri. Adapun pendekatan pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang menekankan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan atau memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih menjadi andalan berbagai negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya *Gross National Product* (GNP) per kapita dan diharapkan kenaikan GNP tersebut akan dinikmati masyarakat luas dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan ekonomilainnya sehingga diharapkan masalah pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi dengan sendirinya. Akan tetapi pada kenyataannya sekalipun terjadi peningkatan GNP tersebut tetapi tetap terjadi kondisi ketimpangan dan kesenjangan pada negara-negara berkembang karena proses industrialisasi yang gencar dilakukan pada negara berkembang mengakibatkan adanya ketergantungan negara-negara tersebut dengan negara maju dalam hal teknologi dan kapital. Upaya untuk mendistribusikan pemerataan pendapatan lewat penyediaan lapangan kerja yang memanfaatkan teknologi tinggi yang bersifat padat modal juga tidak berjalan dengan baik karena hanya tenaga kerja yang berpendidikan dan berketerampilan yang dapat diserap oleh lapangan kerja tersebut sementara mereka yang tidak berpendidikan dan berketerampilan yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja tetap berada di luar jangkauan distribusi kesejahteraan nasional. (Wrihatnolo, 2007, p. 53)

Nampaknya pendekatan pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan kemiskinan sehingga di awal 1980an mulai dikenal suatu pendekatan pembangunan baru yakni pembangunan sosial. Pada awalnya pendekatan ini sering dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi yang menjadi andalan utama pembangunan. Pendekatan pembangunan sosial merupakan konsep pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan dimana pembangunan ini dilakukan untuk

saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi (Midgley, 1995, p. 25). Konsep pendekatan pembangunan ini mengintegrasikan antara proses pembangunan sosial dan ekonomi yang saling melengkapi satu sama lain dimana pembangunan sosial tidak dapat berjalan baik tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi akan tidak memiliki arti apa-apa bila tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat sebagai suatu kesatuan. Midgley (1995) mengemukakan bahwa ada tiga strategi besar implementasi pembangunan sosial tersebut yakni (1) melalui individu di mana individu-individu secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat (2) melalui komunitas di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama mengembangkan komunitas lokalnya (3) melalui pemerintah di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah.

Karena tujuan dari pembangunan sosial itu sendiri adalah meningkatkan taraf hidup manusia maka UN-ESCAP melihat bahwa sesungguhnya pembangunan sosial itu adalah pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dimana upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat difokuskan kepada upaya pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri (Adi, 2008, p. 67). Dalam konsep pembangunan yang berpusat pada manusia maka pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian maupun sumber utama pembangunan. Korten (2001, p. 84) menyatakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada manusia memandang inisiatif dan kreatifitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Korten mengemukakan ada tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu (1) pentingnya dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri (2) adanya kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin dan (3) adanya kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha

membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal. Dari penjelasan di atas maka pembangunan yang berpusat pada manusia tersebut menempatkan upaya pemberdayaan manusia untuk memampukan masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan untuk memenuhi kesejahteraan material dan spiritualnya.

Selain konsep pembangunan yang telah disebutkan di atas, dikenal juga adanya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yakni konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan ini berangkat dari keprihatinan atas isu kerusakan lingkungan hidup yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu konsep pembangunan berkelanjutan memperhatikan keselarasan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (Wrihatnolo, 2007; Huraerah, 2008)

Dari berbagai konsep pembangunan di atas terlihat bahwa tujuan pembangunan hendaknya tidak semata-mata untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan dan berkurangnya angka kemiskinan. Menurut Midgley (1995, p. 14), pembangunan harus dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia, terkelolanya dengan baik permasalahan sosial dan optimalisasi pemanfaatan kesempatan-kesempatan sosial yang terjadi. Hal ini berarti pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling melengkapi dengan pembangunan sosial dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Korten dalam Adi (2008, p. 70) bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan maka pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi manusia. Upaya pemberdayaan masyarakat menjadi hakekat dari pembangunan yang berpusat pada manusia dimana konsep pembangunan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internalnya dalam pengambilan keputusannya melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan non material yang penting melalui partisipasi langsung yang demokratis dan pengalaman pembelajaran sosial. Konsep

pemberdayaan ini yang menurut Friedman (1992, p. vii) menjadi dasar dari konsep pembangunan alternatif untuk meresponi gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. Pengertian, Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris untuk kata '*empowerment*' yang berarti pemberian kuasa atau peningkatan kuasa kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Freire (1973, p.5) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah alat untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ife (2006, p.65-66) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan daya dari kelompok atau individu yang kurang beruntung sehingga menolong mereka untuk dapat berkompetisi dengan pihak lainnya secara lebih efektif. Shardlow dalam Adi (2008, p. 78) menyebutkan bahwa pemberdayaan itu membahas tentang bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sejalan dengan itu Payne dalam Adi (2008, p. 77) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menolong klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek dari hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui pemindahan daya dari lingkungan kepada klien. Shrewsbury dalam Shera & Wells. (1999, p. 14) menyebutkan bahwa pemberdayaan juga memampukan seseorang untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan terhubung dengan pihak lainnya dengan cara yang produktif dan saling menguntungkan. Pemberdayaan di sini diartikan sebagai upaya menyiapkan masyarakat untuk dapat memiliki sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu untuk menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu

sendiri. Tabel 2.2 berikut menunjukkan beberapa pengertian pemberdayaan dari uraian di atas:

Tabel 2.2 Pengertian Pemberdayaan

No	Penulis	Pengertian Pemberdayaan
1	Ife (2006)	Proses untuk meningkatkan daya dari kelompok atau individu yang kurang beruntung sehingga menolong mereka untuk dapat berkompetisi dengan pihak lainnya secara lebih efektif.
2	Shardlow (1998)	Proses bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.
3	Payne (1997)	Proses yang bertujuan untuk menolong klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek dari hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan
4	Shrewsbury (1987)	Proses memampukan seseorang untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan terhubung dengan pihak lainnya dengan cara yang produktif dan saling menguntungkan
5	Freire (1973)	Alat untuk membebaskan orang-orang yang tertindas

Sumber : diolah kembali

Sasaran pemberdayaan pada umumnya adalah mereka yang tergolong miskin atau masyarakat golongan ekonomi lemah, kelompok masyarakat dalam kondisi marjinal. Menurut Hulme & Turner dalam Prijono (1996, p.62-63) mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara local maupun nasional. Ife (2006) mengemukakan juga bahwa kelompok kurang beruntung menjadi sasaran dari proses pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan daya dari kelompok tersebut. Proses pemberdayaan pada kelompok-kelompok kurang beruntung tersebut dilakukan mulai dari tataran kebijakan dan perencanaan, tindakan sosial dan politik, hingga secara langsung melalui upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran.

Dari beberapa pengertian di atas maka pemberdayaan erat kaitannya dengan upaya memampukan individu maupun masyarakat untuk ambil bagian dalam proses memperbaiki kesejahteraan hidupnya melalui proses pembelajaran dan interaksi dengan pihak lainnya. Dalam kajian tentang pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui ADP Cilincing ini maka konsep pemberdayaan yang merupakan sinergi antara konsep pemberdayaan menurut Shardlow, Payne dan Shrewsbury di atas yang akan menjadi rujukan yakni upaya untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada seseorang atau kelompok yang lemah atau miskin sehingga pada akhirnya orang atau kelompok tersebut menyadari potensi yang ada pada dirinya dan akhirnya mampu untuk melakukan tindakan untuk melepaskan dirinya dari kelemahan atau kemiskinan tersebut.

2.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses dan Program

Untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yakni masyarakat menjadi lebih berdaya maka memerlukan rangkaian proses yang panjang dan berkesinambungan bahkan berlangsung sepanjang hidup seseorang atau sekelompok masyarakat. Untuk itu Hogan dalam Adi (2008, p. 85) menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu siklus yang berkesinambungan dan terdiri atas lima tahapan utama yakni:

- a. Mengidentifikasi kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan yang terjadi
- b. Mencari tahu mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan tersebut
- c. Mengidentifikasi suatu masalah yang menjadi akar penyebab penidakberdayaan tersebut
- d. Mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan atas kondisi ketidakberdayaan tersebut
- e. Membangun rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya untuk mewujudkan perubahan tersebut .

Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat bukanlah merupakan suatu proses yang hanya berlangsung pada suatu waktu saja, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan sepanjang masyarakat masih ingin melakukan perubahan. Dalam proses pemberdayaan ini dikaji juga faktor-faktor yang menyebabkan suatu

kelompok masyarakat menjadi kurang berdaya demikian juga potensi keberdayaan yang dimilikinya sehingga proses pemberdayaan mengoptimalkan potensi tersebut untuk mengatasi faktor-faktor yang menimbulkan kondisi kurang berdaya tersebut. Kartasmita (1996) menyebutkan bahwa potensi keberdayaan masyarakat sebagai unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan maupun mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Unsur-unsur yang menjadi sumber keberdayaan masyarakat di sini antara lain adalah nilai kesehatan, pendidikan, prakarsa, kreativitas, kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan lain-lain.

Sementara itu Prijono dan Pranarka (1996, p. 63). menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan ini secara operasional memiliki dua kecenderungan yakni kecenderungan primer yaitu pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi; dan kecenderungan sekunder yakni menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui pilihan dialog. Umumnya untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan penting untuk terjadi upaya penyadaran dan pendidikan agar masyarakat memahami kondisi, permasalahan dan potensi yang dimilikinya, dan selanjutnya mampu mengelola kekuasaan atau kekuatan yang diberikan kepadanya.

Selain sebagai suatu proses, upaya pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Adi, 2008, p. 84). Umumnya sebagai suatu program maka pelaksanaannya terdiri atas tahapan-tahapan kegiatan mulai dari proses persiapan, identifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh warga sasaran, perumusan rencana intervensi, implementasi, monitoring dan evaluasi sampai dengan terminasi (Adi, 2008)

Adi (2008, p.245-246) menyebutkan bahwa dalam proses persiapan di dalamnya terdapat tahap persiapan petugas yakni tenaga *community worker* yang

akan bertugas di wilayah sasaran untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat di lapangan. Selain persiapan petugas juga dilakukan persiapan lapangan yakni melakukan studi kelayakan terhadap wilayah yang akan dijadikan sasaran. Selanjutnya petugas berusaha untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait dan pada saat yang sama menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal dan warga sasaran. Komunikasi yang baik pada tahap awal akan mempengaruhi keterlibatan warga pada fase berikutnya dimana pada fase ini dikenal sebagai fase *engagement* dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga dan mengembangkan kontak ini, petugas lapangan juga menawarkan bentuk kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

Pada tahap berikutnya yakni tahap *assessment*, Adi (2008, p.247-248) menyebutkan bahwa pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah baik kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) maupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed need*). Pengkajian ini dapat dilakukan secara individual maupun dalam kelompok. Pada tahap ini petugas sebagai pelaku perubahan berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh warga sasaran. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini dapat dilakukan berbagai teknik misalnya dengan diskusi kelompok, curah pendapat, *participatory rural appraisal(PRA)* , *participative learning and action(PLA)* , dan lain-lain. Dalam proses *assessment* ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Di samping itu pada tahap ini petugas lapangan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya yakni tahap perencanaan.

Selanjutnya pada tahap perencanaan, Adi (2008, p.249) menyebutkan bahwa dalam tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif akan meminta warga untuk memikirkan tentang masalah yang sedang mereka hadapi serta bagaimana cara mengatasinya dengan mengidentifikasi beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program dan kegiatan yang akan dikembangkan juga harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan, sehingga diminimalkan

program yang bersifat amal dan insidental agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

Tahap berikutnya menurut Adi (2008, p. 250) adalah tahap pemformulasian rencana aksi dimana petugas lapangan akan membantu masing-masing kelompok sasaran untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Dalam tahap pemformulasian rencana aksi ini, diharapkan petugas lapangan dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek dari apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

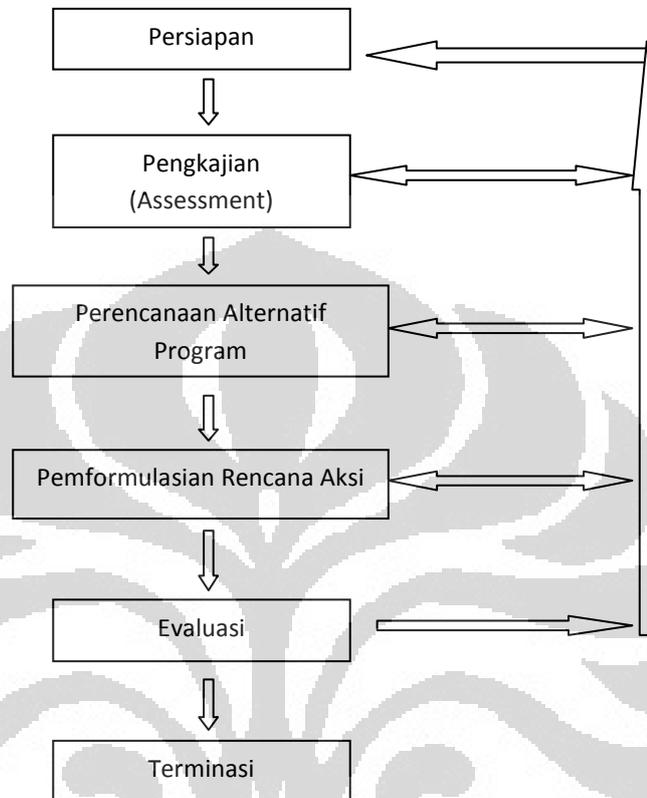
Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program dan kegiatan dimana segala sesuatu yang sudah direncanakan akan diimplementasikan di lapangan. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena segala sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan yakni petugas lapangan dengan warga masyarakat atau kerjasama antar warga (Adi, 2008, p. 251).

Proses pelaksanaan di lapangan perlu diawasi baik oleh petugas lapangan maupun warga yang disebutkan sebagai tahap evaluasi (Adi, 2008, p. 252-253). Evaluasi ini perlu dilakukan bersama-sama dengan warga sehingga dapat membentuk sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka waktu panjang diharapkan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri.

Sementara tahap terakhir adalah tahap terminasi (Adi, 2008, p. 257) dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dapat terjadi karena proyek sudah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan ataupun anggaran yang tersedia sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang bersedia melanjutkan. Jadi seringkali terminasi terjadi bukan karena masyarakat dianggap sudah mandiri.

Tahapan di atas merupakan tahapan siklikal yakni berputar seperti spiral guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada. Meskipun

demikian, siklus dapat berbalik di beberapa tahapan lainnya yang digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2.1 Skema Tahapan dalam Intervensi Pengembangan Masyarakat

Sumber : Adi, 2008

Keseluruhan tahapan tersebut juga telah memiliki jangka waktu pelaksanaan tertentu. Selama jangka waktu pelaksanaan program masih tersedia atau program masih terus berlanjut maka ini merupakan kesempatan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Untuk itu agar program pemberdayaan tersebut dapat membuat masyarakat lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan maka program pemberdayaan harus direncanakan sedemikian rupa dengan melibatkan kelompok masyarakat sasaran maupun kelompok lainnya yang terkait dengan program tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan tersebut difokuskan kepada upaya untuk

membangun kapasitas dari kelompok masyarakat sasaran untuk mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam lingkungan mereka sesuai dengan tema program, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia baik yang ada pada kelompok masyarakat sasaran maupun external dan pada akhirnya kelompok sasaran mampu mengelola permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Di saat program pemberdayaan selesai dan para petugas pelaku perubahan yang berasal dari luar masyarakat baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah telah meninggalkan lokasi layanan, maka pemberdayaan sebagai proses diharapkan tetap berlangsung pada kelompok sasaran. Dalam hal ini, masyarakat juga telah mampu menjalin hubungan dengan sumber-sumber daya eksternal yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dan masyarakat juga sudah mampu menggali potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri guna dikombinasikan dengan sumber daya eksternal tersebut.

2.3.3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita (1996, p.159-160) menyatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga langkah yakni pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Landasan berpikir di sini adalah setiap manusia memiliki potensi. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun potensi itu serta berupaya untuk mengembangkannya. Langkah kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individual anggota masyarakat tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja-keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Disamping itu pemberdayaan berbicara tentang upaya pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta meningkatnya peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat. Yang

ketiga, pemberdayaan berarti melindungi dimana dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah merupakan hal yang hakiki dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti menutup diri dari interaksi, karena hal itu justru akan melunglaikan yang lemah, akan tetapi melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bertujuan akhir untuk memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Kartasmita (1996, p. 163) juga menegaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tersebut harus mengikuti pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dari berbagai proyek pembangunan dengan cara sebagai berikut:

- a. Upaya pemberdayaan itu harus terarah dimana proyek pembangunan sengaja dirancang untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat dan dilakukan pemihakan kepada pihak yang memerlukan.
- b. Proyek pembangunan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- c. Upaya pemberdayaan menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan lingkup bantuan akan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
- d. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial.

Sejalan dengan itu Suharto (2005, p. 67) menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang

disebutnya 5P yakni Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:

- a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dimana mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat
- b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan ; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha

Sementara Ife (2006, p. 74) menyebutkan bahwa strategi dalam memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung atau miskin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dengan cara mengubah struktur dan institusi-institusi yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan serta munculnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pada pentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan keberdayaan yang lebih efektif dimana masyarakat dilibatkan untuk melakukan aksi-aksi langsung.

- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya proses pendidikan, sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan. Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan berbagai aktivitas sebagai upaya menuju suatu perubahan

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam setiap strategi pemberdayaan, maka harus terjadi upaya untuk mengalihkan kekuasaan agar masyarakat memiliki daya atau kemampuan. Mengingat kelompok masyarakat miskin memiliki sumber daya yang terbatas, maka proses pemberdayaan dilakukan dengan cara pendidikan kesadaran agar masyarakat menyadari kondisi dan permasalahan kemiskinan yang dialaminya yang dapat mengganggu kehidupannya dan selanjutnya adanya pemberian stimulus melalui latihan yang bersifat partisipatoris pada tingkat komunitas local yang menolong masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara yang praktis. Adanya kesadaran ini diharapkan dapat menimbulkan suatu aksi yang dapat membuat kelompok miskin keluar dari kondisi kemiskinan yang menekan mereka. Oleh karena itu proses pemberdayaan bukan berarti meniadakan masalah, akan tetapi pemberdayaan tersebut mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar dapat bersikap proaktif dan tanggap terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang terjadi.

2.3.4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui apakah suatu upaya pemberdayaan tersebut telah berhasil meningkatkan keberdayaan seseorang atau sekelompok orang maka Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang disebut *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yakni : ; kekuasaan di dalam (*power within*), ‘kekuasaan untuk’ (*power to*), ‘kekuasaan atas’ (*power over*), ‘kekuasaan dengan’ (*power with*). Tabel 2.3 merupakan rangkuman dari indikator pemberdayaan tersebut.

Tabel 2.3 Indikator Pemberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
<p>Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
<p>Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan termasuk melek huruf • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatanformalyan g merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
<p>Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya • Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya • Kontrol atas asset produktif dan kepemilikan keluarga • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik

	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar 		
<p>Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern • Mampu memberi gaji terhadap orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untk memperoleh dukungan pada saat krisis • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hikum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber : Suharto, 2005 ; 65

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat yakni:

- Adanya peningkatan kesadaran diri dari individu atau kelompok akan potensi yang dimilikinya serta kesadaran akan hak dasar yang seharusnya dia peroleh
- Adanya kemauan yang kuat dari individu atau kelompok untuk berubah dan terlibat aktif dalam upaya perubahan tersebut
- Tersedianya akses, kesempatan dan sarana untuk meningkatkan kemampuan diri dan kelompok.
- Adanya solidaritas sosial di antara individu dan antar kelompok masyarakat untuk menghadapi bersama-sama hambatan-hambatan ke arah kemajuan

Watson dalam Adi (2008) juga menyebutkan adanya faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan dari upaya pemberdayaan tersebut yakni:

- a. Faktor penghambat dari mentalitas individu (Adi, 2008, p.259)
 - Homeostatis yakni dorongan dari dalam individu yang menstabilkan dorongan dari luar yang menyebabkan upaya penguatan kapasitas yang

diberikan dalam waktu singkat kepada individu belum tentu dapat membuat perubahan permanen

- Kebiasaan di mana individu cenderung untuk bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan sehingga perubahan yang dirasakan menimbulkan kondisi ketidaknyamanan akan cenderung dihindari.
- Hal yang utama (*primacy*), di mana bila suatu tindakan yang dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi situasi tertentu, maka ia akan cenderung mengulangnya pada saat yang lain ketika berhadapan dengan situasi yang sama.
- Penyeleksian persepsi dan ingatan atas suatu objek sikap yang sudah terbentuk, akan menyebabkan seseorang menyesuaikan tindakannya saat bertemu dengan objek sikap tersebut.
- Ketergantungan kepada pihak lain menyebabkan terhambatnya proses perubahan karena upaya untuk membangun kemandirian tersebut akan memakan waktu lebih lama
- Superego yang dominan mengakibatkan seseorang cenderung tidak mau menerima hal-hal yang baru sehingga terhambatnya suatu inovasi yang coba diperkenalkan pelaku perubahan kepada masyarakat.
- Rasa tidak percaya diri yang membuat seseorang tidak meyakini akan potensi dan kemampuan dirinya dan menghambat dirinya berkembang atau berubah ke arah yang lebih baik
- Rasa tidak aman dan regresi yang menyebabkan seseorang cenderung untuk menolak suatu pembaharuan karena perubahan tersebut dirasakan akan meningkatkan kecemasan dan ketakutan mereka.
- Adanya faktor predisposisi yakni suatu yang muncul sebelum sebuah perilaku terjadi yang menjadi landasan rasional atau motivasional dari perilaku tersebut. Kondisi ini turut mempengaruhi penerimaan seseorang kepada suatu upaya pembaharuan

- b. Faktor penghambat dari sistem sosial (Adi, 2008, p. 267)
- Kesepakatan terhadap norma tertentu yang tidak sejalan dengan perubahan yang diharapkan sehingga menyulitkan pelaku perubahan untuk merombak norma
 - Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya yang tidak sejalan dengan perubahan yang diharapkan sehingga masyarakat sulit untuk berubah
 - Kelompok kepentingan yang memiliki tujuan yang berbeda dengan perubahan yang diharapkan terjadi karena demi mengamankan atau menyelamatkan kepentingan mereka maka menolak terjadinya perubahan.
 - Adanya nilai-nilai tertentu yang dianggap suci oleh suatu komunitas sehingga upaya mengenalkan suatu inovasi baru yang dianggap berbenturan dengan hal-hal yang suci tadi mendapatkan penolakan dari masyarakat.
 - Adanya penolakan terhadap orang luar karena merasa terganggu atau curiga kepada orang asing yang menjadi agen pelaku perubahan
 - Adanya faktor penguat perubahan pada pihak-pihak yang terkait dengan komunitas sasaran yang mempengaruhi perilaku komunitas sasaran sehingga terjadi penolakan kepada perubahan yang diharapkan.
 - Adanya faktor pemungkin perubahan yakni faktor yang mengikuti suatu perilaku dan menyediakan imbalan yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku atau bertahannya suatu perilaku.

Oleh karena itu sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu perubahan yang ingin dicapai oleh proses pemberdayaan masyarakat adalah rekomendasi yang diberikan Watson dalam Adi (2008, p. 275) untuk mengurangi faktor penghambat tersebut yakni:

- Perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan tidak dianggap sebagai perubahan yang dilakukan pihak luar namun masyarakat merasa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan tersebut karena program benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakatlah yang seharusnya menjadi pelaku perubahan utama.
- Perubahan yang terjadi harus dapat mengurangi beban yang dirasakan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan norma dan nilai masyarakat

- Ada hal-hal baru yang dikembangkan lewat upaya pemberdayaan dan menarik minat masyarakat serta tidak membuat masyarakat merasa terancam otonomi dan keamanannya
- Masyarakat dilibatkan sejak proses identifikasi masalah dan program dibangun berdasarkan diskusi dan kesepakatan bersama
- Kelompok yang mendukung upaya perubahan dapat meyakinkan kelompok yang menentang karena menyadari bahwa tujuan perubahan itu untuk kepentingan dan kebaikan semua pihak.
- Adanya kesempatan bagi warga masyarakat untuk memberikan masukan dan mendapatkan kejelasan atas inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman dan ketidakmengertian warga
- Masyarakat bersedia mempercayai seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses perubahan tersebut serta mendukung hubungan yang terbangun di antara berbagai pihak tersebut
- Pihak pengelola program selalu membuka diri untuk mengkaji ulang dan memperbaiki programnya bila dalam perjalanan proses pemberdayaan tersebut terjadi pengalaman-pengalaman atau kondisi yang kurang menyenangkan.

Markum (2009) menambahkan bahwa dari sisi psikologis ada beberapa kendala pada orang miskin dalam menyikapi perubahan tersebut. Mengingat orang miskin adalah orang yang mengalami kondisi deprivasi (*deprivation*). Artinya, akses orang miskin terhadap berbagai fasilitas layanan umum (kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, lembaga keuangan, dan lain-lain) sangat terbatas, bahkan tertutup. Orang miskin juga tidak bisa mengendalikan nasibnya atau hari depannya (*uncontrollability*) karena, selain merupakan kelompok minoritas, juga posisi tawarnya (*bargaining power*) lemah. Akibat dari kondisi orang miskin yang tidak bisa menguasai atau mengendalikan kondisi lingkungannya (tidak memiliki posisi tawar yang kuat, peraturan yang merugikan orang miskin, dan harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau), orang miskin menjadi tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan merasa tidak berdaya (*helpless*). Selanjutnya, kondisi ini diikuti oleh sikap mereka yang pasif (*passivity*), tidak acuh atau tidak peduli

terhadap lingkungan sekitarnya (*apathy*), dan akhirnya orang miskin akan tetap berada dalam kondisi deprivasi.

Oleh karena itu pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat miskin tersebut adalah penting untuk merubah cara berpikir (*mind-set*) mereka. Kondisi ketidakberdayaan (*helpless*), bersikap pasif (*passivity*) dan tidak peduli (*apathy*) terhadap lingkungan sekitarnya harus diputus agar mereka tidak selamanya terjerat dalam kondisi kemiskinan. Penyadaran akan potensi yang mereka miliki melalui pemberdayaan tersebut akan membuat warga miskin tersebut meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu (*self-efficacy*), yang selanjutnya akan tumbuh harga dirinya (*self-esteem*). Dengan dimilikinya keyakinan untuk mampu melakukan sesuatu dan harga diri, diharapkan orang miskin akan menjadi tahan banting, tidak mudah menyerah dan dapat bangkit kembali (*self-reliance*) tatkala orang miskin menghadapi situasi yang sulit dan berat dalam rangka meraih perubahan yang mereka harapkan.

2.4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Ada keterkaitan yang erat antara pemberdayaan dengan partisipasi dimana menurut Craig dan May dalam Hikmat (2004, p. 3) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi ini akan meningkatkan rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Dengan semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang maka akan semakin baik kemampuan berpartisipasinya. Ife (2006, p. 145). menyebutkan bahwa partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya maka semakin ideal kepemilikan masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan.

Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan". Mikkelsen (2005,p.53-54) menambahkan bahwa partisipasi sesungguhnya adalah berasal dari masyarakat dan dikelola oleh

masyarakat itu sendiri dan hal ini menjadi tujuan dalam suatu proses demokrasi. Selanjutnya Mikkelsen menyampaikan bahwa istilah partisipasi dan partisipatoris biasanya digunakan dalam beberapa makna berikut yakni (a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;(b) partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan;(c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang berarti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;(d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local dan dampak-dampak sosial;(e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; dan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan.

Dari beberapa pengertian partisipasi di atas, dapat disusun suatu rumusan atau konsep bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah ikut mengambil bagian secara aktif dalam menentukan hal-hal yang menyangkut diri atau mempengaruhi hidupnya di dalam suatu kelompok tertentu.

Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam upaya pemberdayaan masyarakat dimana Mikkelsen (2005, p. 65): menyebutkan partisipasi dapat berfungsi sebagai alat / instrument pemberdayaan dan partisipasi sebagai tujuan pemberdayaan

- Partisipasi sebagai instrument / alat bila partisipasi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan normatif seperti keadilan sosial, persamaan dan demokrasi. Partisipasi dipandang juga sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan
- Partisipasi sebagai tujuan dimana partisipasi diarahkan sebagai tujuan yang menghasilkan pemberdayaan dimana setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Sementara itu Oakley dalam Ife (2006, p. 150) juga menyebutkan partisipasi baik sebagai cara maupun sebagai tujuan dan perbandingan di antara keduanya sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4 Perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan

Partisipasi sebagai Cara	Partisipasi sebagai Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> • Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya • Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek • Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri • Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian • Partisipasi umumnya jangka pendek • Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti • Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan • Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi, bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya • Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini • Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang • Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis

Sumber : Ife, 2006; 150

Oleh karena itu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pendekatan pembangunan yang berbasis manusia maka konsep partisipasi harus mencakup keduanya yakni baik partisipasi sebagai instrument / alat maupun partisipasi sebagai tujuan yang menghasilkan pemberdayaan sehingga dalam proses pembangunan terjadi perkembangan dan peningkatan kapasitas manusia, tidak semata-mata sebagai objek pelaksana namun mempunyai hak atas

kehidupannya dan hak menentukan jalan hidupnya yang dalam hal ini memerlukan adanya proses perubahan sikap dan perilaku.

Menurut Prety (1995), ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu :

- a. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah dimana masyarakat hanya menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi.
- b. Partisipasi informatif. Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan.
- c. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.
- d. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.
- e. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
- f. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
- g. Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Menurut Hikmat (2004) ada beberapa manfaat dari partisipasi yakni:

- Merupakan strategi yang potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat
- Bank Dunia percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya membangkitkan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri yaitu melalui semangat wiraswasta (semangat bersaing, mengambil resiko dan inovatif)
- Partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan, urbanisasi dan industrialisasi
- Partisipasi masyarakat merupakan jaminan terhadap pembangunan yang berkelanjutan karena pembangunan dilakukan atas kesadaran masyarakat sendiri.
- Dengan adanya partisipasi masyarakat memberi peluang pada masyarakat kecil (kelompok akar rumput) melalui organisasi-organisasi masyarakatnya untuk memperoleh keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi.

Tentu saja dalam melihat keterlibatan masyarakat tersebut ada saja hal-hal yang dapat mendorong maupun menghambat partisipasi baik yang datangnya dari masyarakat sendiri maupun pihak luar yang terlibat dalam proses pemberdayaan tersebut. Menurut Ife (2006,p.157-158) ada beberapa kondisi yang dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat yakni:

- Masyarakat akan berpartisipasi jika merasa kegiatan tersebut bermanfaat bagi mereka. Untuk itu masyarakat perlu memahami terlebih dahulu permasalahan mereka dan permasalahan tersebut menjadi prioritas untuk ditanggulangi.
- Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka yakin bahwa partisipasi mereka dalam suatu kegiatan akan membawa perubahan yang berarti ke arah yang lebih baik bagi kehidupan mereka
- Bahwa ada berbagai perbedaan partisipasi dalam masyarakat sesuai dengan kondisi / lingkungan masyarakat setempat dengan perbedaan kepentingan,

bakat dan keterampilan. Semua kemampuan masyarakat tersebut harus diperhitungkan untuk mendorong kemampuan partisipasi masyarakat.

- Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka diberi kesempatan dan didukung untuk berpartisipasi.
- Masyarakat akan berpartisipasi jika didukung oleh struktur dan prosedur, misalnya prosedur pertemuan dan pengambilan keputusan yang berasal dari konteks budaya setempat. Oleh karena itu seorang agen perubahan tidak harus menolak atau merubah struktur dan kebiasaan masyarakat setempat.

Selanjutnya Soetrisno (1995, p. 224) mengemukakan bahwa melalui partisipasi akan menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat untuk merancang skenario program sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga dapat menciptakan sistem evaluasi terhadap program yang dijalankan. Apapun yang telah dilakukan dapat menjadi umpan balik bagi masyarakat dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan program tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat selain memberikan manfaat juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat dalam meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

Selain faktor pendorong tersebut di atas, Ife (2006) menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi sebagaimana disimpulkan di bawah ini:

- Tidak terciptanya suasana kondusif bagi berkembangnya partisipasi masyarakat seperti adanya dominasi peranan pihak elit, misalnya dalam identifikasi permasalahan sehingga mengabaikan perspektif masyarakat local. Selain itu tidak tersedianya secara memadai sarana / media lokal untuk mewedahi aspirasi masyarakat.
- Faktor struktural dan kultural masyarakat dimana ide, saran, pendapat yang disampaikan dalam forum yang dihadiri oleh para elit pimpinan local tidak tersalurkan karena struktur yang berkembang cenderung mendorong masyarakat untuk mengikuti dan menyetujui apa yang disampaikan oleh para elit tersebut. Selain itu adanya pengalaman, ide, saran dan pendapat masyarakat yang tidak pernah terwujudkan dalam program membuat masyarakat enggan untuk terlibat dalam program berikutnya.

- Adanya aturan dari organisasi yang menyebabkan perbedaan antara apa yang mau dicapai oleh organisasi dengan tujuan masyarakat. Disamping itu masih adanya cara pandang internal organisasi yang menganggap pengetahuan professional pakar lebih hebat dibandingkan dengan apa yang diketahui rakyat lokal

Menurut Tjokroamidjojo (1993, p. 226) menyebutkan faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah:

- Faktor kepemimpinan dimana untuk menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pemimpin dan kualitas kepemimpinan yang mendukung
- Faktor komunikasi dimana gagasan-gagasan, ide-ide dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat
- Faktor pendidikan dimana dengan tingkat pendidikan yang memadai maka individu akan dapat memberikan partisipasi yang diharapkan

Sementara menurut Sastropetro (1988, p. 22) faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri atas:

- Pendidikan, kemampuan baca tulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri
- Penginterpretasian yang keliru terhadap ajaran agama
- Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan lembaga dalam melakukan upaya pemberdayaan sehingga menimbulkan persepsi yang keliru
- Tidak tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan

Faktor-faktor tersebut satu sama lain saling mempengaruhi dalam menghadirkan hambatan maupun pendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

2.5 Dinamika Kelompok dalam Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan menurut pandangan Suharto (2005,p.66-67) dapat dilakukan pada tingkatan individual (*micro level*), keluarga atau kelompok (*mezzo level*), maupun pada tingkatan yang lebih luas seperti masyarakat (*macro level*). Sementara menurut Hulme & Turner dalam Prijono (1996, p. 63), pemberdayaan

sifatnya individu sekaligus kolektif karena menyangkut perubahan hubungan kekuasaan antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin maka Kartasmita (1996, p. 163) menambahkan bahwa upaya pemberdayaan sebaiknya menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan akan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Schopler dan Galinsky dalam Kirst-Ashman (2008, p. 45) menyebutkan bahwa ada empat alasan mengapa kelompok sangat relevan dengan pekerjaan sosial. Yakni pertama, kelompok memberikan ruang bagi individual untuk saling berbagi minat dan tujuan yang sama serta menyediakan dukungan, informasi dan motivasi bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok, pengaruh terhadap lingkungan sosial akan lebih besar daripada dilakukan seorang individu. Kedua, kelompok memperkuat potensi kreatif dan pemecahan masalah karena melalui kelompok, anggota dapat saling bertukar ide, gagasan dan pendapat, menganalisa masalah yang sedang mereka hadapi, memperoleh pengalaman baru dan mengembangkan pendekatan-pendekatan baru terhadap suatu isu. Terpaparnya anggota kelompok dengan berbagai perspektif yang berbeda dari anggota lainnya akan mendorongnya timbulnya ide dan kreativitas. Alasan ketiga mengapa kelompok itu penting adalah karena dengan bekerja dalam kelompok maka anggota akan saling mempengaruhi satu sama-lain. Setiap anggota kelompok dituntut tanggungjawabnya untuk memastikan suatu pekerjaan terlaksana. Dengan cara ini anggota kelompok dapat saling memperkuat satu sama lain untuk menghasilkan kemajuan dan mencapai tujuan kelompok. Dan alasan keempat mengapa bekerja dalam kelompok itu penting oleh karena pada saat kelompok melakukan perencanaan, intervensi ataupun pengambilan keputusan, kelompok memberikan cara yang paling efisien untuk berkomunikasi, menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan.

Menurut Cramer dalam Hutchison (2003, p. 437) kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain, menganggap dirinya

adalah bagian dari suatu kelompok, saling bergantung dan bergabung bersama untuk mencapai suatu tujuan atau memenuhi suatu kebutuhan dan dipengaruhi oleh sekumpulan aturan dan norma. Sementara Brigham dalam Walgito (2007, p. 8) menyebutkan bahwa kelompok adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta diikat oleh kepentingan atau tujuan bersama. Dalam kaitan dengan pengertian kelompok, kita dapat melihat adanya interaksi, saling bergantung, pengaruh dan pencapaian suatu tujuan bersama.

Dalam pekerjaan sosial, Zastrow (2006) menyebutkan ada berbagai jenis kelompok yakni (1) kelompok percakapan sosial (*sosial conversation group*), yakni kelompok yang hubungannya terbangun atas dasar percakapan antara orang-orang yang tidak terlalu saling mengenal dan hanya sekedar untuk membangun hubungan dengan pihak lain (2) kelompok rekreasi atau penguatan kapasitas (*recreation / skill building group*), yakni kelompok yang bertujuan menikmati waktu berekreasi bersama atau melakukan kegiatan penguatan kapasitas dengan cara yang santai dan menyenangkan (3) kelompok pendidikan (*education group*) yang bertujuan untuk belajar suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu (4) kelompok tugas (*task group*) yakni kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dan akan bubar setelah tugas diselesaikan (5) kelompok penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan (*problem solving and decision making group*), dimana kadang-kadang kelompok ini dianggap bagian dari kelompok tugas (6) kelompok fokus (*fokus group*) yang bertujuan untuk mendiskusikan isu atau topik tertentu (7) kelompok tolong menolong (*self-help and mutual aid group*) yang bertujuan untuk saling tolong menolong diantara anggotanya mengatasi permasalahan pribadi atau sosial. (8) kelompok sosialisasi (*sosialization group*) yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk sikap dan perilaku anggota kelompok agar dapat lebih diterima secara sosial di masyarakat. (9) kelompok penanganan (*treatment group*), umumnya terdiri dari anggota yang memiliki masalah pribadi, perilaku atau emosional yang parah sehingga pemimpin kelompok harus memiliki kecakapan konseling dan memimpin yang kuat serta mampu secara akurat menanggapi respon dari anggota kelompok atas hal yang sedang dibicarakan (10) kelompok pelatihan sensitivitas dan encounter (*sensivity*

and encounter training) dimana anggota kelompok ini berinteraksi satu sama lain dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran antar pribadi.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat maka bentuk kelompok pendidikan dan tolong menolong sering dipakai sebagai sarana interaksi antara anggota masyarakat. Lewat kelompok tersebut para pelaku perubahan memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada warga dampingan. Saat terjadi permasalahan maka hal tersebut dibicarakan dalam pertemuan kelompok untuk mencari jalan keluar berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh warga ataupun dukungan dari pihak-pihak lainnya.

Walgito (2007) menyebutkan beberapa alasan lainnya mengapa seseorang bergabung dalam kelompok yakni

- Untuk mencapai suatu tujuan yang secara individu sulit dicapai
- Untuk memenuhi kebutuhan psikologis seperti rasa aman bergabung dalam satu kelompok maupun fisiologis (secara tidak langsung), contohnya saat seseorang bergabung dengan kelompok usaha dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, yang akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis.
- Kelompok dapat mendorong pengembangan konsep diri dan meningkatkan harga diri seseorang,
- Kelompok dapat memberikan pengetahuan dan informasi bahkan keuntungan ekonomis

Berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya seseorang masuk dalam kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik yang bersifat material maupun non material.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bagaimana kelompok menjadi media yang efektif dalam melakukan perubahan pada masyarakat karena kelompok menjembatani interaksi antar individu sehingga terbangun ikatan yang kuat antara anggota untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling berbagi informasi dan pengetahuan, menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan bersama serta bekerjasama dalam upaya pencapaian tujuan.

BAB 3

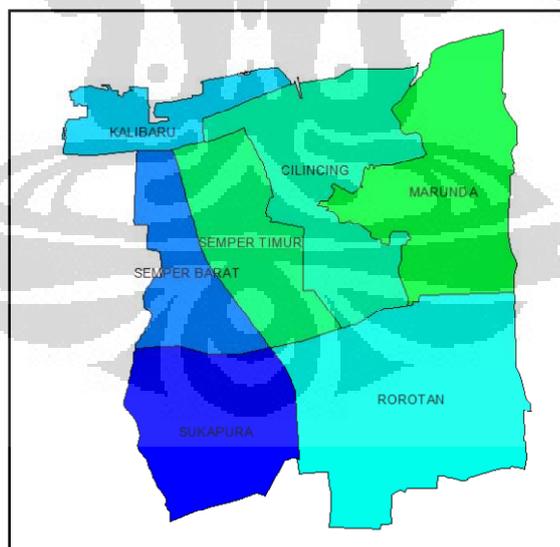
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ADP CILINCING

3.1. Deskripsi Wilayah Pelayanan Wahana Visi Indonesia

3.1.1. Deskripsi Kelurahan Cilincing

Kelurahan Cilincing terdiri atas 10 RW dan 133 RT, merupakan salah-satu dari tujuh kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Cilincing dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Banglio, Laut Jawa dan wilayah kelurahan Kalibaru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Gubug Genteng dan wilayah kelurahan Rorotan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Baru Kelurahan Kalibaru dan Jl. Pedongkelan Kelurahan Semper Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Patok Pilar Tapal Batas Kali Blencong dan wilayah kelurahan Marunda



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Cilincing

Sumber : Cilincing dalam Angka 2011

Untuk menuju ke kelurahan Cilincing dapat dicapai dari sisi timur melalui jalan tol lingkar luar Cakung – Cilincing ataupun dari sisi barat melalui jalan Raya Cilincing. Perjalanan menuju kelurahan Cilincing dapat ditempuh dengan menggunakan aneka moda transportasi seperti taksi, angkot dan mikrolet dan dari pusat kota Jakarta dalam hal ini Tugu Monumen Nasional (Monas) dapat ditempuh dalam waktu 40 menit dengan kondisi lalu-lintas lancar.

Dari sisi topografi, wilayah kelurahan Cilincing terletak di daerah pesisir dengan ketinggian 0,25 – 0,50 m dari permukaan laut. Hampir seluruh wilayah kelurahan Cilincing merupakan daerah rawan banjir. Seperti di Rw 01, 02, 03, 04, hujan deras kurang lebih setengah jam, sudah cukup untuk menggenangi jalanan sekitar dan masuk ke pekarangan rumah sedalam 20 cm. Hal ini dikarenakan permukaan wilayah tersebut yang paling rendah dan begitu terjadi hujan deras ditambah dengan pasang naik air laut akan mengakibatkan banjir. Bila banjir sudah menggenangi Jalan Cakung-Cilincing akan menyebabkan kemacetan panjang yang luar biasa terutama pada hari Selasa dan Jumat yang merupakan jadwal bongkar muat kontainer di pelabuhan Tanjung Priok.

Keadaan tanah di wilayah kelurahan Cilincing merupakan tanah kering yang tidak dapat ditanami karena mengandung kadar garam tinggi. Hal ini dikarenakan lapisan tanah yang membentuk daratan berupa endapan yang tidak padat sehingga terjadi rembesan air laut yang bercampur dengan air tanah. Kondisi ini juga menyebabkan air tanah yang ada dalam lapisan tanah tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai air minum. Karena tidak semua wilayah kelurahan Cilincing dapat mengakses jalur air bersih PDAM, maka untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut warga harus membelinya dari pedagang air pikulan.

Hampir 40% lahan di wilayah kelurahan Cilincing digunakan untuk pemukiman dan sebagian besar dari rumah tinggal tersebut merupakan bangunan semi permanen dan sementara. Bangunan semi permanen dan sementara ini dapat dengan mudah ditemui di sekitar wilayah bantaran Kali Banglio dan Kali Blencong. Pada wilayah pantai sepanjang 4 km merupakan kawasan industri dan sepanjang 1 km merupakan tempat pelelangan ikan oleh para nelayan tradisional, tepatnya di pinggir muara Cakung Drain.

3.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Masyarakat di kelurahan Cilincing cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Bugis dan sebagainya terlebih di daerah industri KBN banyak didatangi tenaga kerja dari luar Jakarta bahkan dari luar pulau Jawa, Interaksi masyarakat sejauh ini berjalan harmonis walaupun dengan latar belakang budaya yang berbeda. Keberadaan majelis taklim menjadi salah satu wadah interaksi antar warga khususnya kaum ibu selain kegiatan PKK. Di samping itu juga ada perkumpulan olahraga badminton dan volley serta sepakbola yang diikuti oleh para pemuda. Sejak dua tahun terakhir ini, pihak kecamatan Cilincing secara rutin selalu menyelenggarakan Festival Cilincing yakni kegiatan bazaar dan pementasan seni budaya lokal yang diisi dengan penampilan kelompok seniman lokal maupun pameran produk industri rumah tangga seperti makanan ringan dan kerajinan tangan.

Kegiatan masyarakat di kelurahan Cilincing dalam kesehariannya sudah dimulai sejak pukul 5 pagi. Semua warga sibuk memulai aktivitasnya sehari-hari. Ada yang bersiap-siap untuk berangkat bekerja baik sebagai karyawan, pegawai negeri maupun TNI demikian juga anak-anak yang akan ke sekolah. Ada di antara anak-anak itu yang diantar oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya dengan menggunakan sepeda motor menuju sekolahnya dan ada juga yang memanfaatkan jasa angkutan umum yang hilir mudik di sepanjang jalan raya cilincing maupun jalan-jalan yang menghubungkan antar kelurahan di kecamatan Cilincing tersebut. Umumnya anak-anak bersekolah tidak jauh dari tempat tinggal mereka karena untuk tingkat SD di wilayah kelurahan Cilincing saja ada 12 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. Belum lagi SD yang ada di wilayah kelurahan tetangga. Demikian juga untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni SMP dan SMU, ada cukup banyak sekolah di wilayah kelurahan Cilincing. Namun ada satu kekhawatiran yang diungkapkan oleh warga terkait dengan situasi lalu lintas di jalan raya Cilincing yang selalu dilewati oleh kendaraan truk kontainer besar yaitu tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Hampir setiap minggu selalu ada saja kasus kecelakaan lalu-lintas antara pengendara sepeda motor dengan truk kontainer yang mengakibatkan korban luka-luka atau meninggal dunia yang

terjadi di jalan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan warga selalu ekstra hati-hati bila melintasi jalan tersebut.

Sebagian besar masyarakat kelurahan Cilincing yakni 40,36% bekerja di bidang industri sebagai karyawan atau buruh sedangkan pada urutan berikutnya adalah sebagai pedagang kecil / mikro dan nelayan. Mayoritas merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Karena wilayah ini berdekatan dengan Kawasan Berikat Nusantara maupun dengan pelabuhan Tanjung Priok, maka banyak warga yang bekerja di tempat tersebut mencari tempat tinggal petak kontrakan di Cilincing yang rata-rata berkisar Rp 200,000 – Rp 300,000 per bulan. Bila bekerja sebagai karyawan pabrik maka umumnya mereka menerima upah sesuai upah minimum regional (UMR) yang berkisar Rp 1,500,000 perbulan, tetapi bagi warga yang hanya menjadi buruh bongkar muat pelabuhan atau berstatus tenaga *outsourcing* acapkali menerima upah lebih kecil dari UMR. Demikian juga warga yang bekerja sebagai nelayan maka pendapatan mereka sangat bergantung dengan agen penjualan ikan di tempat pelelangan ikan dimana harga masih ditentukan oleh agen tersebut. Misalkan harga ikan dijual nelayan seharga Rp 12,000, maka agen dapat menjualnya ke pedagang di pasar seharga Rp 17,000, yang selanjutnya dijual kembali ke konsumen seharga Rp 20,000. Bila nelayan bisa menjual ikan langsung kepada pedagang di pasar maka mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Dengan pendapatan yang terbatas tersebut maka kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang dan pangan menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini juga yang akhirnya turut mempengaruhi tingginya angka putus sekolah dimana anak-anak nelayan tidak bisa meneruskan pendidikan mereka sampai ke bangku SMU (program bantuan pemerintah untuk pendidikan – BOS, hanya berlaku sampai dengan tingkat pendidikan SMP). Dampak dari banyaknya anak putus sekolah adalah meningkatnya angka pengangguran. Banyaknya anak putus sekolah juga menyebabkan mereka rentan akan bahaya narkoba.

Selain itu dijumpai juga masalah lingkungan yakni sampah yang bertumpukan di jalan, di saluran drainase dan juga bermuara di ujung kali dan di tepi laut. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah. Akibat dari buruknya pengelolaan sampah ini menyebabkan

dampak seperti lingkungan yang kotor, penyebaran penyakit dan banjir. Kondisi drainase yang buruk juga menyebabkan aliran air di got terhambat dan saat hujan deras terjadi beberapa waktu sudah menyebabkan genangan air ke permukaan jalan. Gambar berikut menunjukkan masalah sampah yang ditemui di muara kali dan tepi laut (3.2.a) serta kondisi drainase yang buruk (3.2.b).



Gambar 3.2 Permasalahan Sampah dan Kondisi Drainase yang Buruk

Sumber : dokumentasi penelitian

Di bidang kesehatan, kelurahan Cilincing hanya memiliki fasilitas kesehatan berupa 2 puskesmas dan 5 balai pengobatan yang dilayani oleh 4 dokter praktek dan 11 bidan untuk melayani 43,217 jiwa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi-cuci-kakus maka 60,3 % keluarga mendapatkannya dari membeli air pikulan dan sisanya memperoleh akses kepada jaringan PAM.

Di bidang sosial, untuk fasilitas peribadatan warga tersedia sejumlah 13 mesjid, 24 mushola, 5 gereja dan 1 klenteng. Sementara fasilitas olahraga dan hiburan tersedia 7 lapangan bulutangkis dan 8 lapangan bola voley, 1 taman terbuka dan 15 diskotik. Untuk sarana pendidikan tersedia 9 taman kanak-kanak untuk 938 murid, 18 sekolah dasar untuk 4539 murid, 8 sekolah menengah pertama untuk 3488 murid dan 2 sekolah menengah atas untuk 497 murid.

Di bidang ekonomi, terdapat 2 unit bank dan 10 koperasi simpan-pinjam dan serba usaha yang beranggotakan 2454 orang. Sementara untuk fasilitas pasar ada 1 pasar inpres, 1 pasar lingkungan, 2 lokasi pedagang kaki lima yang menampung 141 orang pedagang, 29 swalayan dan 2 buah warung serba

ada. Setidaknya terdapat 11 perusahaan industri besar, 10 sedang, 3 kecil, dan 7 industri rumah-tangga di wilayah kelurahan Cilincing ini.

3.2 Gambaran Umum Wahana Visi Indonesia dan ADP Cilincing

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah sebuah yayasan nasional yang bekerja di bidang sosial kemanusiaan dan merupakan mitra utama dari organisasi kemanusiaan global World Vision. Sebagian besar implementasi pelayanan pengembangan masyarakat World Vision di Indonesia dijalankan dalam kemitraan dengan WVI. Didasari atas nilai-nilai kristiani untuk melayani yang miskin dan tertindas, WVI dibentuk pada tahun 1995 dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Semua program diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, WVI menjalankan program-program pengembangan jangka panjang selama 10 hingga 15 tahun dimana staf-staf WVI secara intensif mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. WVI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra lokal dalam pelaksanaan berbagai program pelayanannya. Sebagian besar program dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara komprehensif. Program-program ini diarahkan agar terus berkelanjutan dan menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat yang dilayani. Bentuk-bentuk program meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Saat ini WVI melayani di 9 provinsi (Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua) dan 36 kabupaten di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2012 ini ada sekitar 40 program pengembangan masyarakat terpadu di sembilan provinsi tersebut.

Ada tiga bidang program utama yang dilakukan oleh WVI yakni Tanggap Darurat, Advokasi dan Pengembangan Masyarakat. Program Tanggap Darurat umumnya bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang

menjadi korban bencana alam ataupun konflik. Program Advokasi berfokus kepada upaya membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mendorong pemerintah memenuhi kewajibannya dalam bidang kesejahteraan sosial. Sementara Program Pengembangan Masyarakat merupakan upaya pemberdayaan berbasis komunitas yang bersifat jangka panjang yakni 10 - 15 tahun. Sementara kegiatan WVI berfokus kepada sektor berikut yakni Pendidikan Anak, Nutrisi dan Kesehatan Ibu serta Balita, Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Pencegahan HIV & AIDS. Dalam melaksanakan programnya tersebut maka WVI mendapatkan dukungan pendanaan dari donatur dalam dan luar negeri yang dikelola oleh World Vision Indonesia. Adapun penulisan thesis ini difokuskan pada upaya pemberdayaan melalui program pengembangan masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak serta penguatan ekonomi di wilayah kecamatan Cilincing, khususnya kelurahan Cilincing.

3.2.1 Sasaran, Tujuan dan Ruang Lingkup ADP Cilincing

WVI memulai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Cilincing sejak tahun 2001 dengan nama Program Pembangunan Wilayah (*Area Development Program-ADP*) Cilincing. ADP Cilincing ini dilaksanakan secara bertahap di mana di tahun 2001 dilaksanakan di kelurahan Cilincing dan Kalibaru dan kemudian diperluas layanannya di kelurahan Semper Barat dan Marunda dimulai sejak tahun 2005. Program pengembangan masyarakat tersebut merupakan tindak-lanjut dari program tanggap darurat (*Cilincing Emergency Response* tahun 1999 - 2000) untuk menolong warga masyarakat yang menjadi korban akibat krisis moneter 1998 di mana banyak warga kehilangan pekerjaan akibat banyak perusahaan tutup saat itu.

Upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan WVI saat ini lewat ADP Cilincing bertumpu pada empat kegiatan besaran utama yakni Penguatan Ekonomi, Peningkatan Nutrisi, Pencegahan HIV & AIDS dan Pengelolaan Sponsorship. Adapun tujuan dari ADP Cilincing adalah meningkatkan kualitas hidup anak laki-laki dan perempuan di kecamatan Cilincing melalui penguatan sistem dan struktur serta mendorong terjadinya perubahan perilaku dan pengembangan ekonomi. Tujuan ini dicapai melalui, pertama upaya penguatan

ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga, kedua upaya peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak balita, ketiga upaya peningkatan perlindungan kepada anak remaja (12 – 18 tahun) terhadap bahaya HIV&AIDS serta obat-obatan berbahaya dan keempat adalah pengelolaan kegiatan sponsorship untuk mendukung perubahan pada wakil anak, masyarakat dan para donatur.

Yang menjadi sasaran utama kegiatan ADP adalah anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak adalah mereka yang berusia 1 – 18 tahun, baik anak yang dipilih menjadi perwakilan wilayah dalam berkomunikasi secara regular dengan para penyantun, maupun non perwakilan anak di wilayah dampingan. Sementara orang dewasa adalah baik orangtua dari perwakilan anak maupun orang dewasa lainnya yang ada di dalam wilayah dampingan. Mengingat fokus utama kegiatan ADP adalah upaya kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat maka dalam pelaksanaan kegiatannya tenaga lapangan ADP bekerjasama erat dengan berbagai pemangku kepentingan seperti aparat pemerintahan setempat baik dari tingkat Rt sampai dengan suku dinas pemerintahan kota terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kader kesehatan masyarakat maupun dengan lembaga sosial dan kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah dampingan.

Di bidang pengembangan ekonomi, maka ada dua capaian (*outcome*) proyek tersebut yakni (1) terbangunnya kapasitas warga usia produktif (18 – 50 tahun) untuk melakukan usaha kecil atau memperoleh lapangan pekerjaan dan (2) terbangunnya kapasitas kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola programnya yang ada pada kelompok tersebut. Kegiatan yang dilakukan ADP adalah memfasilitasi rangkaian pelatihan keterampilan tentang mengelola dan mengembangkan usaha kecil, keterampilan kerja bagi remaja, beasiswa pendidikan diploma, dan penguatan kelompok swadaya masyarakat. Dalam implementasi kegiatan di lapangan, WVI bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan keterampilan seperti P2MUI, LP3I, AKPINDO maupun konsultan usaha kecil dan mikro seperti PT Vision Fund Indonesia (d/h Yayasan Mitra Masyarakat Sejahtera), LP3ES dan Bina Swadaya maupun Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Gambar 3.3 menunjukkan beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti pelatihan (a) montir (b) salon (c) kerajinan tangan dan (d) wawancara kerja.



Gambar 3.3 Aneka Kegiatan Pelatihan Pengembangan Ekonomi

Sumber : Dokumentasi Proyek ADP Cilincing

Pada kegiatan pelatihan montir dan salon sebagaimana tercantum pada gambar di atas, warga dampingan ADP mengikuti kelas-kelas keterampilan yang difasilitasi oleh mitra ADP seperti dengan Karya Master untuk montir sepeda motor maupun dengan Anuraga untuk salon. Untuk kelas montir, para peserta mengikuti pendidikan di kelas selama seminggu dengan empat kali pertemuan masing-masing selama dua jam. Di kelas mereka belajar tentang dasar-dasar mesin sepeda motor, bagian-bagian dari mesin, dan teknik perawatan dan perbaikan mesin. Selanjutnya untuk dua bulan berikutnya, mereka kerja praktek di bengkel AHASS yang menjadi rekanan dari Karya Master. Setiap hari dari pagi sampai sore hari, mereka akan magang dengan salah satu teknisi senior di bengkel tersebut untuk melakukan praktek menangani mesin sepeda motor khususnya untuk melakukan perawatan mesin dan servis ringan. Di akhir pelatihan, mereka kembali akan menghadapi ujian sertifikasi untuk menentukan kelulusan dari kegiatan pelatihan ini. Peserta pelatihan dengan nilai terbaik akan langsung

disalurkan bekerja dengan salah satu bengkel AHASS rekanan Karya Master tersebut. Sementara peserta lainnya, diharapkan dengan bekal sertifikat pelatihan tersebut membuat peluang mereka untuk bekerja sebagai montir sepeda motor baik di AHASS atau bengkel lainnya jadi lebih terbuka.

Sementara pada kelas salon kecantikan, para peserta belajar tentang teknik dasar memotong rambut dengan bermacam-macam model. Pelatihan ini langsung diikuti dengan praktek dan berlangsung dalam enam belas kali pertemuan masing-masing dua jam dan diakhiri dengan ujian untuk memperoleh sertifikat pelatihan. Umumnya pelatihan ini diikuti oleh ibu-ibu dan pemuda dan mereka dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan tersebut untuk bekerja dengan orang lain atau memulai usaha salon sendiri.

Untuk kelas kerajinan tangan, khususnya membuat asesoris perhiasan perempuan seperti kalung, gelang dan bros dilakukan dengan cara *training of trainer* yakni beberapa ibu-ibu peserta dilatih keterampilan untuk tidak saja mampu membuat asesoris tersebut, tetapi juga mampu nantinya mengajar ibu-ibu lainnya yang berminat terlibat dalam kelompok pengrajin asesoris tersebut. Sehingga memang hanya angkatan pertama yang langsung berlatih difasilitasi oleh Amongraga dan selanjutnya untuk angkatan berikutnya akan diajar oleh ibu-ibu dari peserta angkatan pertama.

Sementara pada pelatihan wawancara kerja adalah mempersiapkan warga dampingan yang mengikuti program pendidikan diploma ataupun keterampilan kerja lainnya untuk mampu menghadapi wawancara kerja dengan baik. Mereka juga belajar tentang cara membuat surat lamaran dan daftar riwayat kerja yang menarik. Tetapi sesi yang paling penting dalam pelatihan ini yang biasanya berlangsung selama dua hari adalah diberikan motivasi-motivasi kepada para peserta untuk membangun rasa percaya diri mereka, sikap untuk tidak mudah menyerah bila harus berhadapan dengan kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan serta kemauan untuk terus belajar meningkatkan kapasitas diri memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Untuk memfasilitasi pelatihan seperti ini, ADP bermitra dengan lembaga konsultan tenaga kerja. Biasanya di tahap awal pelatihan para peserta akan mengikuti psikotest sederhana untuk mengetahui sejauhmana peserta memaknai arti bekerja di dalam kehidupan.

Sementara itu di bidang kesehatan dan gizi ibu dan anak balita, terdapat empat capaian (*outcome*) proyek yakni (1) meningkatnya praktek gizi dan pencegahan penyakit pada anak balita, (2) meningkatnya pemeliharaan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu menyusui, (3) meningkatnya praktek sanitasi dan kebersihan serta (4) adalah meningkatnya kualitas pelayanan di posyandu. Kegiatan yang dilakukan ADP adalah memfasilitasi rangkaian pelatihan untuk membangun kapasitas tenaga kader kesehatan masyarakat dalam mengelola kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan kelas ibu hamil (pos bumil) serta penyuluhan dan kampanye kesehatan kepada masyarakat khususnya orangtua balita maupun kelompok ibu hamil dan menyusui. Dalam implementasi kegiatan WVI bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Tim Penggerak PKK, dan Ikatan Bidan Indonesia.

Gambar 3.4 menunjukkan beberapa kegiatan kesehatan ibu dan seperti (a) lomba kelas ibu hamil (b) jambore kader posyandu (c) kampanye cuci tangan dengan sabun dan (d) pelatihan posyandu



Gambar 3.4 Aneka Kegiatan Kesehatan Ibu dan Balita

Sumber : Dokumentasi Proyek ADP Cilincing

Pada lomba kelas ibu hamil (gbr 3.4.a), perwakilan dari masing-masing kelompok kelas ibu akan mengikuti kuis tentang praktek-praktek pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan, apa saja yang harus dilakukan bila kondisi kehamilan bermasalah dan praktek senam hamil. Sementara setiap dua tahun sekali tim ADP memfasilitasi kegiatan jambore kader (gbr 3.4.b) yang merupakan ajang temu kader dari seluruh wilayah dampingan. Di acara jambore kader ini difasilitasi kegiatan lomba cerdas cermat antar kelompok kader posyandu, penyegaran kembali akan topik-topik tertentu dari manajemen posyandu serta panggung pentas kreasi untuk menyalurkan bakat-bakat seni yang terpendam dari para ibu kader tersebut. Tidak lupa juga difasilitasi acara *team building* untuk menyegarkan dan membangun motivasi pelayanan serta kekompakan kelompok. Kegiatan kampanye cuci tangan dengan sabun (gbr 3.4.c) merupakan salah satu agenda rutin kelompok kader kesehatan untuk membangun kebiasaan cuci tangan yang baik di kalangan anak-anak. Umumnya kegiatan kampanye ini ditujukan kepada anak-anak yang dibawa ke posyandu maupun anak-anak di PAUD, TK dan SD. Sementara itu dalam rangka penyegaran tentang materi manajemen pengelolaan posyandu dan juga memperlengkapi kader-kader posyandu baru akan pengetahuan tersebut, secara rutin tim ADP memfasilitasi pelatihan tentang manajemen posyandu (gbr 3.4.d) ini kepada para kader. Materi pelatihannya berisikan tentang proses pencatatan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan posyandu, bagaimana melakukan penimbangan yang benar dan juga bagaimana melakukan konseling kesehatan kepada ibu-ibu yang balitanya menghadapi masalah gizi ataupun masalah kesehatan lainnya.

Di bidang penyadaran dan pencegahan HIV&AIDS, terdapat tiga capaian (*outcome*) proyek yakni (1) tersedianya kegiatan positif bagi anak dan remaja untuk mengisi waktu luangnya, (2) orangtua dan keluarga memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya narkoba dan HIV&AIDS dan (3) meningkatnya kapasitas kelompok swadaya masyarakat, sekolah dan organisasi berbasis keimanan untuk menyebarluaskan informasi yang benar tentang HIV&AIDS, narkoba dan kesehatan reproduktif kepada anak remaja dan memungkinkan mereka menjadi agen perubahan kepada rekan seusianya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh ADP adalah memfasilitasi rangkaian pelatihan keterampilan

sebagai penyuluh sebaya dan kampanye penyadaran tentang bahaya narkoba HIV&AIDS, maupun kegiatan-kegiatan positif bagi anak dan remaja seperti kelompok belajar, seni dan olahraga. Dalam implementasi kegiatan ini WVI bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun dengan sekolah-sekolah.

Gambar 3.5 menunjukkan beberapa kegiatan penyadaran dan pencegahan HIV&AIDS seperti (a) mobil perpustakaan keliling (b) penyuluhan bahaya narkoba dan HIV (c) panggung kreasi anak (d) simulasi kota layak anak



Gambar 3.5 Kegiatan Penyadaran dan Pencegahan HIV & AIDS

Sumber : Dokumentasi Proyek ADP Cilincing

Kehadiran mobil perpustakaan keliling (gbr 3.5.a) yang dikelola oleh tim ADP atau lebih sering disebut Mobil Sahabat Anak (MSA) beroperasi setiap hari di wilayah Cilincing dengan titik-titik *standby* di lokasi yang banyak anak-anak, baik itu lokasi sekolah maupun lokasi tempat bermain anak-anak bertujuan untuk memberikan anak-anak akses kepada bahan bacaan yang memadai. Adapun MSA ini beroperasi jam 9.30 sampai dengan 11.30 di pagi hari dan pk 13.30 sampai dengan pk 15.30 di siang hari, masing-masing di lokasi yang berbeda. Selain buku

pelajaran sekolah, di mobil ini juga tersedia buku cerita maupun buku tentang pengetahuan umum lainnya. Selain itu MSA juga dilengkapi dengan pemutar video dan televisi sehingga anak-anak bisa juga menonton film pendek tentang informasi pendidikan dan kesehatan.

Banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Cilincing, membuat mereka potensial untuk terlibat dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Untuk itu ADP memfasilitasi kelompok-kelompok belajar anak maupun kelompok-kelompok minat seperti seni dan olahraga di masing-masing Rw agar anak-anak memiliki media dan sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti pada foto 3.5 c di atas yaitu pada kelompok biola anak, anak-anak yang berminat untuk belajar biola dikumpulkan dan ADP mengidentifikasi tutor yang merupakan warga setempat untuk mengajar anak-anak tersebut bermain biola. Saat ini kelompok biola Cilincing tersebut sudah sering tampil untuk memeriahkan acara yang diselenggarakan baik oleh ADP maupun pemerintah lokal seperti Festival Cilincing, pentas seni peringatan HUT Kemerdekaan RI di kantor kecamatan dan lain-lain. Selain kelompok biola, ADP Cilincing juga memfasilitasi kelompok futsal, teater dan juga band selain tentu saja kelompok belajar pelajaran sekolah. Tutor yang mengajar di kelompok ini adalah dari warga setempat dan tutor tersebut ada yang merupakan kader kesehatan maupun kader pendamping anak untuk proyek *sponsorship*. Ada juga tutor yang sebelumnya adalah wakil anak dan karena saat ini sudah berusia lebih dari 18 tahun dan tidak lagi menjadi wakil anak, maka yang bersangkutan kemudian terlibat untuk menjadi pengajar adik-adiknya di kelompok belajar. Saat ini ada sekitar 12 kelompok belajar anak yang aktif berkegiatan di kelurahan Cilincing dengan total sekitar 200 anak mendapatkan manfaat dari kegiatan di kelompok ini.

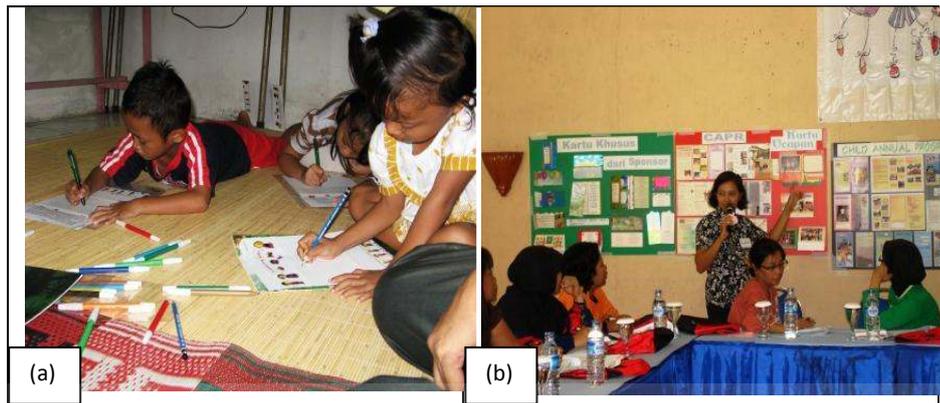
Anak-anak remaja dampingan ADP yang telah dilatih menjadi *peer educator* atau pendidik sebaya tersebut kemudian menjadi tenaga penyuluh dan kampanye tentang bahaya narkoba serta HIV&AIDS kepada rekan-rekannya. Biasanya mereka disebut sebagai Sahabat Sumber Informasi (SSI) dan melalui mereka informasi tentang bahaya narkoba serta HIV&AIDS disebarluaskan. Mereka menyampaikan informasi tersebut ke sekolah-sekolah di mana mereka belajar, maupun sekolah-sekolah lainnya yang bersedia untuk mendapatkan

kampanye tentang bahaya narkoba dan HIV&AIDS. Foto 3.5.b adalah salah satu kegiatan penyuluhan yang dilakukan SSI saat ada pertemuan wakil anak.

ADP Cilincing turut mendukung inisiatif dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PP&PA) tentang Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak yakni suatu sistem pembangunan kabupaten / kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Wilayah kelurahan Cilincing merupakan salah satu wilayah percontohan Kelurahan Ramah Anak yang ditetapkan oleh pemerintah kota administratif Jakarta Utara disamping lima kelurahan lainnya yakni Pluit, Pademangan Barat, Tugu Utara, Sungai Bambu dan Pegangsaan Dua. Sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pemerintah tersebut salah satunya adalah dalam bentuk memfasilitasi simulasi kota layak anak (gbr 3.5.d) dimana anak-anak berperan dalam mengelola program pembangunan sebuah kota. Dalam simulasi ini, anak-anak ada yang berperan sebagai walikota, pimpinan bank, kepala polisi, dan lain-lain dan anak-anak juga yang memainkan peran sebagai warga kota. Lewat simulasi permainan peran ini, anak-anak dapat merasakan bagaimana besarnya tugas dan tanggungjawab dalam mengelola sebuah kota untuk mewujudkan kota yang layak dan ramah kepada anak.

Di bidang pengelolaan *sponsorship*, terdapat tiga capaian (*outcome*) proyek yakni (1) meningkatnya keterlibatan masyarakat, keluarga dan wakil anak dalam kegiatan *sponsorship*, (2) adanya hubungan yang baik antara wakil anak dengan para penyantunnya dan (3) kualitas hidup wakil anak dimonitor, dianalisa dan dilaporkan. Kegiatan yang dilakukan oleh ADP adalah memfasilitasi proses monitoring kualitas hidup wakil anak dan komunikasi antara wakil anak dengan para penyantun serta mengoptimalkan manfaat dari program bagi wakil anak, keluarga dan komunitas di mana wakil anak berada.

Gambar 3.6 menunjukkan beberapa kegiatan pengelolaan *sponsorship* seperti (a) wakil anak menuliskan surat balasan kepada penyantun dan (b) pelatihan administrasi *sponsorship* bagi kader pendamping anak



Gambar 3.6 Kegiatan Pengelolaan Sponsorship

Sumber : Dokumentasi Proyek ADP Cilincing

3.2.2 Tahapan Program

Implementasi ADP Cilincing berlangsung selama 15 tahun, yang terbagi dalam beberapa periode yakni (1) tahap inisiasi program atau disebut juga fase “seed” pada tahun 2001 – 2003, (2) tahap pengembangan program yakni pada tahun 2004 - 2006 dan (3) tahap penguatan program pada periode 2007 – 2012. Sementara pada periode tiga tahun terakhir yakni 2013 – 2015 adalah tahapan transisi program dimana ADP bersiap-siap untuk meninggalkan wilayah dampingan.

3.2.2.1 Tahap Pertama – Tahap Inisiasi Program (2001 – 2003)

Pada tahap pertama atau fase ‘seed’ ini yang dilakukan oleh tim ADP adalah berfokus kepada sosialisasi tentang apa dan siapa WVI, konsep pendampingan ADP serta program sponsorship kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah dampingan mulai dari instansi terkait seperti Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Sosial di pemerintahan kota administratif Jakarta Utara, kemudian ke tingkat kecamatan Cilincing sampai dengan warga dampingan di tingkat RT. Di samping itu tim ADP melakukan baseline survey di tahun 2002 untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat dampingan dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hasil dari baseline survey tersebut menjadi dasar bagi dokumen rancangan program untuk tahap kedua. Selain itu di tahap pertama ini tim ADP juga sudah mulai melakukan perekrutan wakil anak untuk program sponsorship dengan total 945 anak di tahun 2003. Di bidang kesehatan

program berfokus kepada upaya monitoring kondisi kesehatan wakil anak dan memfasilitasi perawatan kesehatan wakil anak yang bermasalah. Di bidang ekonomi, tim ADP memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) yang anggotanya adalah orangtua dari wakil anak. Sampai dengan akhir tahun fiskal 2003, terbentuk 2 KUB di kelurahan Cilincing yakni di RW 02 dan 06 yang beranggotakan 88 orang.

3.2.2.2 Tahap Kedua – Tahap Pengembangan Program (2004 – 2006)

Pada tahap kedua, di bidang kesehatan tim ADP bekerjasama dengan tim kesehatan proyek NJTAP (*North Jakarta Transition Activity Project*). NJTAP merupakan proyek gizi balita kerjasama antara World Vision dan USAID, melakukan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya pemberian makan bergizi pada balita di sepanjang tahun 2004. Dalam hal ini tim ADP memobilisasi warga dampingan yang memiliki balita untuk hadir dalam penyuluhan kesehatan dan gizi yang difasilitasi oleh tim NJTAP di setiap RW. Di samping kerjasama dengan tim NJTAP, tim ADP masih berfokus kepada upaya monitoring kondisi kesehatan wakil anak dan memfasilitasi perawatan wakil anak yang bermasalah kesehatannya bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit setempat.

Pada bidang ekonomi, tim ADP terus mendampingi KUB yang sudah ada, disamping memfasilitasi terbentuknya KUB baru. Upaya ini disertai dengan serangkaian pelatihan seperti pengorganisasian kelompok, analisa kelayakan usaha, tata-buku dan pelaporannya serta pengelolaan ekonomi rumahtangga. Sekalipun demikian sepanjang periode tahap kedua ini tidak semua KUB dampingan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Setelah pada tahun 2004 jumlah KUB meningkat sampai mencapai 13 unit, berangsur-angsur surut pada tahun berikutnya yakni 11 unit di 2005 dan hanya 5 unit di 2006. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro saat itu, dimana pada tahun 2005, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sebanyak dua kali sehingga harga bahan baku meningkat dan daya beli masyarakat berkurang saat itu. Faktor internal lainnya yang cukup berperan dalam hal ini adalah keputusan tim ADP untuk lebih memfokuskan diri pada pembentukan dan penguatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) daripada pendampingan pada KUB tersebut. Di

seluruh RW dampingan, dibentuk KSM dimana KSM tersebut diharapkan dapat menjadi mitra ADP untuk melakukan pendampingan dan monitoring kepada KUB maupun KBA yang ada di RW tersebut. Selain itu di 2005, ADP meluaskan wilayah dampungannya ke kelurahan Semper Barat dan Marunda sehingga sumber daya tim ADP yang tersedia harus dialokasikan untuk melakukan sosialisasi maupun perekrutan wakil anak di wilayah dampingan baru.

3.2.2.3 Tahap Ketiga – Tahap Penguatan Program (2007 – 2012)

Pada periode tahap penguatan program ini tim ADP mulai memfokuskan pendampingan di bidang kesehatan dengan melakukan kegiatan penguatan kapasitas kepada kelompok kader kesehatan masyarakat khususnya kader posyandu. Ada 22 posyandu yang memperoleh pendampingan dari tim ADP di kelurahan Cilincing di tahun 2007 dan di tahun 2012 menjadi 24 posyandu. Upaya pemberdayaan kepada kelompok kader ini diawali dengan pemetaan kapasitas yang dimiliki oleh kader khususnya dalam hal mengelola kegiatan pelayanan di posyandu. Selanjutnya tim ADP bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari suku dinas kesehatan maupun puskesmas memfasilitasi aneka pelatihan bagi kader tersebut seperti anthropometri, manajemen posyandu dan konseling. Pelatihan ini diberikan untuk memampukan kader melakukan tugasnya di posyandu dengan optimal sehingga kualitas layanan di posyandu meningkat. Di tahun 2009, selain pendampingan di posyandu, tim ADP mulai membentuk pos ibu hamil yang merupakan dukungan bagi kelompok ibu-ibu hamil yang ada di wilayah dampingan. Bila layanan di posyandu berlangsung sebulan sekali, maka di pos bumil, layanannya dilakukan 2 kali seminggu di mana sejumlah ibu hamil, maksimal 10 ibu dalam satu kelompok, bertemu untuk mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan selama masa kehamilan yang difasilitasi oleh kader yang merupakan kader posyandu juga. Di samping penyuluhan, pada pertemuan di pos ibu hamil juga diselenggarakan senam hamil.

Sementara di bidang ekonomi, sejak 2007 tim ADP mulai bekerjasama dengan Yayasan Mitra Masyarakat Sejahtera (YMMS), sebuah lembaga mikro kredit yang juga beroperasi di kelurahan Cilincing untuk menyediakan jasa pinjaman modal kerja bagi KUB dampingan yang ada. Selain usaha kecil yang

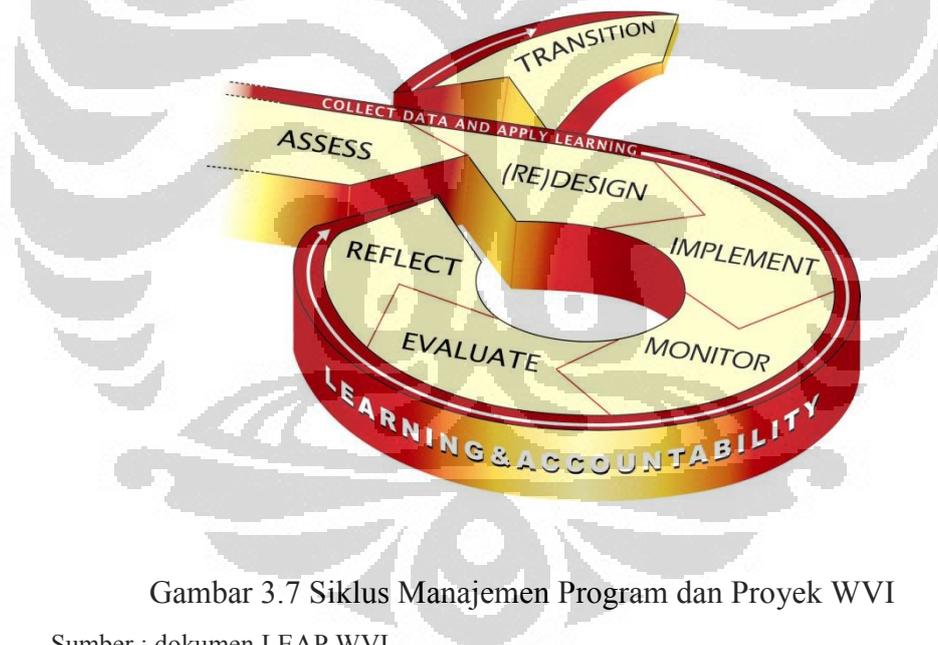
dikelola secara berkelompok (KUB), tim ADP juga menghubungkan YMMS dengan usaha kecil yang dikelola secara individual oleh warga dampingan. Untuk usaha individual ini maka mekanisme penyaluran pinjaman modalnya tetap melalui kelompok yang bersama-sama akan bertanggungjawab atas pinjaman yang dilakukan oleh anggota (pinjam renteng) atau disebut kelompok penerima kredit (KPK). Sementara itu mulai 2009 ADP Cilincing juga menempatkan seorang tenaga fasilitator usaha kecil untuk mendampingi KUB agar dapat mengembangkan usahanya. Selain itu untuk membuka pasar bagi produk hasil KUB tersebut maka tim ADP memfasilitasi keikutsertaan KUB tersebut dalam berbagai even pameran usaha kecil. Sekalipun telah menempatkan seorang tenaga fasilitator usaha kecil, perkembangan dari KUB tersebut tidaklah menunjukkan peningkatan karena sejak 2008 sampai 2012 jumlahnya tetap 5 KUB, itu juga dengan kondisi kelompok yang patah-tumbuh silih berganti. Hal ini dikarenakan semangat dari warga untuk terus mempertahankan usahanya tetap berjalan seringkali kandas karena merasa usahanya tidak berkembang secepat yang diharapkan serta permasalahan modal kerja. Selain itu faktor yang turut mempengaruhi adalah keputusan organisasi untuk fokus hanya mendampingi bidang usaha makanan ringan dan kerajinan tangan mengingat warga dampingan yang paling banyak terlibat dalam kegiatan ADP adalah kelompok perempuan. Tetapi rupanya tidak semua warga dampingan perempuan berminat untuk berusaha di bidang tersebut.

Hal lainnya yang cukup penting pada periode ini adalah sambil berupaya membentuk KSM di seluruh RW dampingan, maka tim ADP juga membidani terbentuknya sebuah lembaga lokal yang akan memayungi seluruh aktivitas KSM tersebut dan lembaga ini diharapkan menjadi mitra bagi ADP saat ADP masuk ke tahap transisi untuk meninggalkan wilayah dampingan. Pada awal terbentuknya, lembaga lokal yang pengurusnya adalah perwakilan dari KSM dampingan ADP tersebut bernama Komite Proyek yang dibentuk sejak tahun 2001 pada tahap inisiasi program dan dalam rapat tahunan anggota pada tahun 2008 diputuskan namanya berganti menjadi Program Masyarakat Cilincing (PMC).

3.2.2.4 Tahap Keempat – Tahap Transisi Program (2013 – 2015)

Tahap ini adalah periode di mana ADP bersiap melakukan transisi sebelum pendampingan lapangan akan berakhir di akhir FY15. Secara berangsur-angsur ADP akan mengurangi intensitas pendampingannya untuk diambil-alih oleh PMC atau institusi pemangku kepentingan lainnya yang ada di wilayah dampingan. Transisi ini juga akan disertai dengan mulai dikurangi jumlah wakil anak dampingan ADP maupun wilayah dampingannya.

Siklus manajemen program dan proyek yang berlangsung di ADP merujuk kepada panduan Rancangan, Monitoring dan Evaluasi yang disebut dokumen LEAP (*Learning through Evaluation with Accountability and Planning*) berlaku untuk seluruh program Wahana Visi sebagaimana terlampir dalam skema di bawah



Gambar 3.7 Siklus Manajemen Program dan Proyek WVI

Sumber : dokumen LEAP WVI

Berdasarkan skema di atas maka dalam setiap tahapan pengelolaan program WVI melalui tahapan assessment (kajian permasalahan dan potensi sumberdaya), design (perencanaan), implementasi, monitoring, evaluasi, refleksi, kembali ke perencanaan untuk masukan tahapan program berikutnya. Untuk memasuki tahapan periode akhir dari program maka masuk ke dalam proses transisi, sebagaimana yang akan berlangsung di ADP Cilincing di tahun 2013.

Dalam pelaksanaan programnya, saat ini ADP Cilincing memiliki 14 orang staf dan pusat kegiatan masyarakatnya berlokasi di Komplek Ex Gaya Motor no 133 B Jalan Cilincing Raya, Jakarta Utara.



Gambar 3.8 Pusat Kegiatan Masyarakat ADP Cilincing

Sumber : Dokumentasi penelitian

BAB 4

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLIBATAN WARGA DAMPINGAN

Bab ini merupakan bagian temuan lapangan dan analisa atas upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh WVI melalui program pembangunan wilayah (*area development program - ADP*) di kelurahan Cilincing. Pada bagian awal akan digambarkan bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh staf lapangan ADP Cilincing kepada kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi dan bagian berikutnya akan dijelaskan faktor penghambat dan pendukung terhadap proses pemberdayaan maupun keterlibatan warga dalam pemberdayaan tersebut.

4.1 Temuan Lapangan

4.1.1 Upaya Pemberdayaan Masyarakat ADP Cilincing

Sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 pada bagian tahapan program (hal 71-74), program ADP Cilincing yang berlangsung dalam waktu 15 tahun ini terbagi atas beberapa periode yakni (1) tahap inisiasi program atau disebut juga fase “*seed*” pada tahun 2001 – 2003, (2) tahap pengembangan program yakni pada tahun 2004 - 2006 dan (3) tahap penguatan program pada periode 2007 – 2012. Sementara pada periode ke empat yakni tiga tahun terakhir yakni 2013 – 2015 adalah tahap transisi program dimana ADP bersiap-siap untuk meninggalkan wilayah dampingan.

Pada tahap inisiasi program, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyampaian informasi tentang identitas organisasi dan program ADP itu sendiri dan pembentukan komite proyek dan survei kondisi awal (*baseline*). Hasil dari survei *baseline* tersebut menjadi dasar atau rujukan untuk proses pengkajian masalah dan potensi yang ada di wilayah dampingan. Selanjutnya hasil kajian tersebut menjadi masukan bagi penyusunan rencana program tiga tahunan maupun rencana operasional tahunan. Rencana operasional ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di wilayah dampingan

Menjelang berakhirnya satu tahapan program yang berlangsung sepanjang tiga tahun, maka dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi kembali menjadi dasar bagi

penyusunan rencana operasional program tahap periode berikutnya yang disertai dengan implementasi kegiatan di lapangan. Proses pemberdayaan masyarakat berlangsung juga dalam proses pengkajian masalah dan potensi, perencanaan kegiatan intervensi, implementasinya maupun evaluasi sebagaimana disampaikan dalam uraian berikut.

4.1.1.1 Tahapan penyampaian informasi tentang program (tahun 2001)

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim ADP pada tahun 2001 saat Wahana Visi Indonesia memulai program ADP adalah melakukan penyampaian informasi tentang programnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah dampingan. Warga maupun staf ADP menyebut kegiatan ini dengan istilah sosialisasi program. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang apa dan siapa Wahana Visi Indonesia serta program ADP, apa perbedaannya dengan program World Vision yang sedang berjalan saat itu di wilayah Cilincing yakni NJTAP (North Jakarta Transition Activity Program – biasa warga menyebutnya TAP).

Pada saat itu program TAP dari World Vision Indonesia telah berjalan kurang lebih setahun, melanjutkan program tanggap darurat *Cilincing Emergency Response Program* (CEP) yang dilaksanakan pada tahun 1999. Proses sosialisasi ini menjadi penting, karena adanya perbedaan pendekatan antara ADP yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan partisipasi warga. Intervensi melalui ADP sendiri merupakan intervensi jangka panjang yang berkisar 15 tahun dan ADP tidak menyediakan bantuan langsung berupa barang kepada para partisipan programnya. Sementara program TAP bersifat jangka pendek, dengan target spesifik warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak krisis moneter, dan sebagai mekanisme jaring pengaman sosial sementara waktu warga belum memiliki pekerjaan, para partisipan TAP memperoleh bantuan langsung berupa beras sebagai imbalan atas partisipasinya dalam kegiatan proyek yang fokus kepada kegiatan sanitasi berupa gotong-royong membersihkan areal sekitar rumah dan saluran drainase serta kegiatan infrastruktur sederhana berupa perbaikan jalan setapak dan saluran serta pembuatan sarana WC umum. Dalam perjalanannya TAP juga melakukan

kegiatan kampanye kesehatan ibu dan anak dan mendukung kegiatan posyandu serta memfasilitasi kegiatan *income generating* bagi warga sasaran di kelurahan Cilincing. Pada program TAP, adanya pemberian bantuan langsung berupa beras sebagai imbalan keterlibatan dalam kegiatan proyek membuat warga antusias untuk terlibat karena menolong mereka untuk ketersediaan pangan di rumah.

Selain itu bila program TAP langsung dikerjakan oleh staf World Vision Indonesia, maka ADP adalah program pengembangan masyarakat yang dikerjakan oleh staf Wahana Visi Indonesia yang merupakan mitra dari World Vision Indonesia. Adanya perbedaan pendekatan yang mendasar antara ADP dan TAP serta lembaga yang berbeda yang melakukan kegiatan di lapangan, membuat tim ADP perlu melakukan proses penyampaian informasi tentang program secara intensif.

“ Sosialisasi di awal program menjadi proses memperkenalkan organisasi beserta identitasnya kepada warga dampingan dan para pemangku kepentingan, apa yang mau dilakukan di masyarakat dan kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan bersama-sama,” (Yac, program manager ADP, 13 Mei 2012)

Diawali dengan menemui pihak pemerintah setempat baik yang ada di kantor walikota maupun kepala kecamatan dan kepala kelurahan Cilincing di kantornya untuk mendapatkan ijin operasional program dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan para ketua Rw dan Rt sekaligus meminta kesediaan para ketua Rt atau Rw untuk mempertemukan tim ADP dengan warga maupun tokoh masyarakat serta tokoh agama yang tinggal di wilayah sasaran. Pertemuan setempat ini dilakukan oleh tim ADP di rumah ketua Rt dan Rw atau di balai Rw yang ada dan umumnya mengambil waktu di malam hari agar lebih banyak anggota masyarakat yang bisa hadir. Dalam kesempatan pertemuan ini juga dijelaskan juga tentang rencana merekrut anak di wilayah Cilincing untuk menjadi wakil anak lewat kegiatan *sponsorship* dan anak-anak tersebut akan difasilitasi untuk mendapatkan dukungan penyantun dari kantor World Vision Kanada.

“.... waktu itu ada sosialisasi program ADP ke Rt/Rw dan kita dikumpulin...dikasih tahu bakal ada kegiatan wvi yg baru..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Dalam proses sosialisasi program ini disebutkan juga oleh staf lapangan maupun warga dampingan bahwa tim ADP juga bekerjasama dengan kader-kader kesehatan masyarakat yang sebelumnya sudah terlibat dalam program TAP. Kader-kader ini turut terlibat mengundang warga untuk datang ke pertemuan sosialisasi sambil mendampingi tim ADP dan sebelumnya kader-kader ini juga telah memperoleh pembekalan dari tim ADP tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan lewat ADP, khususnya tentang kegiatan *sponsorship*. Sehingga di luar pertemuan sosialisasi program tersebut, warga juga dapat menanyakan kepada kader tentang informasi program.

“ .. wvi itu pertama kali emang infonya dari ibu Lli salah seorang kader waktu itu.... kita ibu-ibu dikumpulin lalu diceritakan tentang program ADP....apa yang mau dikerjakan bareng warga ... tentang rekrutan anak” (Mus, kader posyandu, 27 Mei 2012)

Adanya program TAP yang telah dilaksanakan oleh World Vision di wilayah kelurahan Cilincing sebelum program ADP diperkenalkan serta keterlibatan para kadernya cukup membantu proses sosialisasi karena membuat warga merasa tidak asing dengan kehadiran Wahana Visi karena menganggap Wahana Visi adalah lembaga yang sama dengan World Vision hanya kegiatan programnya yang berbeda. Apalagi saat baru memulai program pemberdayaan masyarakat, tim ADP menempati kantor di lokasi yang sama dengan kantor NJTAP.

Sekalipun demikian di masa-masa awal sosialisasi ini juga tim harus menghadapi penolakan dari sekelompok warga karena adanya kekhawatiran kalau program ADP ini membawa misi agama tertentu. Terutama saat itu selain Wahana Visi Indonesia ada juga lembaga lainnya yang melakukan kegiatan yang melibatkan anak-anak dalam kelompok belajar di wilayah dampingan. Dalam

pelaksanaan kegiatan di kelompok tersebut, staf lembaga tersebut mengajarkan lagu-lagu rohani anak-anak untuk dinyanyikan bersama-sama anak-anak yang hadir. Cerita-cerita yang disampaikan dalam kelompok juga berdasarkan cerita-cerita agama. Warga rupanya ada yang menganggap kegiatan di kelompok belajar tersebut adalah kegiatannya ADP sehingga tersebar informasi bahwa kegiatan kelompok belajar anak ADP menjadi media dakwah agama Kristen sehingga orangtua melarang anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan di kelompok tersebut. Bahkan ada orangtua yang sebelumnya setuju anaknya menjadi wakil anak dalam kegiatan *sponsorship* akhirnya mencabut persetujuan tersebut dan meminta ADP menghentikan kegiatan di kelompok belajar anak maupun perekrutan anak-anak sebagai wakil anak. Melalui proses penelusuran kejadian di lapangan, akhirnya ditemukan sumber kesalahpahaman tersebut yakni adanya lembaga lain yang melakukan kegiatan kelompok belajar seperti ADP dengan muatan agama. Pimpinan ADP saat itu yakni pak Arhk selanjutnya menemui pimpinan lembaga tersebut meminta untuk turut mengklarifikasi isu tersebut kepada masyarakat.

“ ya awal-awal dulu kita mesti jelaskan isu-isu soal kristenisasi ke warga dan tokoh agama...apalagi program yang ini ada rekrutan anaknya ... warga ada yang khawatir ..” (Win, staf lapangan ADP, 22 Mei 2012)

Upaya klarifikasi tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan warga dan tokoh agama setempat untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada upaya dakwah dalam kegiatan ADP. Warga dampingan juga dipersilahkan untuk memonitor langsung kegiatan di kelompok belajar anak yang difasilitasi oleh tutor-tutor yang merupakan warga setempat juga. Akhirnya dengan berjalannya waktu, kekhawatiran warga tersebut tidak terbukti karena memang melihat bahwa tujuan program ADP diadakan adalah untuk menolong warga tanpa memandang suku, agama dan kepercayaan.

“ tapi akhirnya warga mengerti juga kalau ADP tidak bawa-bawa agama..hanya untuk menolong anak-anak dan keluarga..buktinya

programnya bisa terus berjalan sampai sekarang..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Penerimaan dan pemahaman dari warga dampingan maupun para pemangku kepentingan terkait terhadap identitas organisasi berikut program yang ditawarkan merupakan bagian dari proses persiapan program pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP Cilincing. Dengan penerimaan dan pemahaman yang baik dari warga dampingan dan para pemangku kepentingan terkait akan maksud dan tujuan program dilaksanakan di wilayah dampingan maka terbangun hubungan yang baik antara tim ADP dengan warga dampingan dan para pemangku kepentingan setempat.

Kegiatan penyampaian informasi tentang program yang dilakukan tim ADP pada tahap inisiasi program ADP (tahun 2001 – 2003) lebih menekankan pada pengenalan akan identitas organisasi serta perbedaan antara program ADP dengan TAP yang sedang berlangsung di wilayah saat itu dan juga adanya kegiatan perekrutan anak sebagai bagian dari proyek *sponsorship*. Selanjutnya pada tahap pengembangan program ADP (tahun 2004 – 2006) maupun tahap penguatan program ADP (tahun 2007 – 2012), setiap tahunnya tim ADP selalu memfasilitasi pertemuan dengan warga dampingan dan para pemangku kepentingan setempat untuk menyampaikan informasi tentang hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan serta rencana kegiatan ADP untuk tahun berikutnya.

Setiap akhir tahun fiskal sejak awal bulan Oktober, ADP akan mempersiapkan laporan tahunan yang berisikan laporan pencapaian proyek selama satu tahun. Biasanya di awal Desember, tim ADP akan mengundang perwakilan perwakilan masyarakat dari Rt dan Rw, kader, KSM (kelompok swadaya masyarakat dampingan ADP), PMC maupun dari kecamatan dan kelurahan serta perwakilan dari suku dinas terkait seperti dari dinas kesehatan dan puskesmas maupun lembaga mitra lainnya untuk menyampaikan laporan tahunan tersebut. Dalam pertemuan ini, para peserta akan dikelompokkan menurut proyek yakni proyek kesehatan ibu dan anak, proyek HIV&AIDS, proyek pengembangan ekonomi dan *sponsorship* dan dalam kelompok akan didiskusikan upaya

mensinergikan kegiatan ADP dengan program dari lembaga mitra baik dari pemerintah dalam hal ini suku dinas terkait seperti kesehatan dan puskesmas maupun lembaga lainnya yang beroperasi di wilayah Cilincing. Sehingga diharapkan dalam implementasi rencana kegiatan ADP untuk tahun berikutnya terjadi sinergi dengan program-program lembaga mitra yang ada di wilayah dampingan untuk mengoptimalkan dampak dari kegiatan program kepada masyarakat dan juga meminimalkan tumpang-tindih kegiatan program yang relatif sama antara berbagai lembaga tersebut.

“ pertemuan di akhir tahun fiskal juga menjadi kesempatan bagi kami mensosialisasikan pencapaian-pencapaian yang terjadi dari implementasi program dan juga menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan pada tahun fiskal berikutnya..” (Yac, program manager ADP, 13 Mei 2012)

Selain penyampaian informasi tentang pencapaian implementasi di lapangan serta rencana kegiatan tahunan, tim ADP juga melakukan proses penyampaian informasi saat ada inisiatif proyek atau kegiatan baru yang akan dilakukan di wilayah dampingan seperti saat akan dilaksanakan kegiatan advokasi kesehatan *Citizen Voice and Action (CVA)*. Dalam hal ini kembali tim ADP akan mengundang perwakilan warga, Rt dan Rw, para kader demikian juga dari pihak kecamatan dan kelurahan maupun dari puskesmas dan suku dinas kesehatan Jakarta Utara untuk hadir dan berdiskusi tentang mengapa proyek tersebut perlu dilakukan di wilayah dampingan, apa tujuan dan manfaat dari kegiatan proyek serta dukungan dan keterlibatan seperti apa yang diharapkan dapat diberikan oleh para pemangku kepentingan maupun warga dampingan sendiri. Sebelum penyampaian informasi tentang CVA diberikan kepada warga dampingan maka staf lapangan proyek juga telah terlebih dahulu mendapatkan orientasi dan penjelasan dari program manager ADP agar memiliki pemahaman yang sama tentang proyek tersebut dan dapat menjelaskan tentang seluk-beluk implementasi proyek dengan baik bila ditanya oleh warga dampingan maupun para pemangku kepentingan terkait. Penyampaian informasi tentang kegiatan proyek baru ini tidak hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan, tetapi juga disampaikan dalam pertemuan rutin kader ataupun pertemuan dengan orangtua wakil anak.

“ kalo ada proyek baru kayak CVA (*citizen voice and action* – proyek advokasi kesehatan) kemaren, warga juga disosialisasikan dulu tentang apa itu advokasi, nantinya mau ngapain dengan posyandu sama orang puskesmas..” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Dengan melakukan sosialisasi tentang pencapaian kegiatan program maupun rencana kegiatannya kepada warga dampingan tersebut maka warga menjadi lebih mengetahui tentang apa yang sedang dilakukan oleh tim ADP, apa tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh warga dari kegiatan tersebut dan bagaimana caranya warga dapat terlibat dalam kegiatan tersebut.

4.1.1.2 Pembentukan Komite Proyek

Setelah proses sosialisasi program pada tahap inisiasi program ADP selesai dilakukan, maka tim ADP bersama-sama dengan warga dampingan membentuk *project committee* atau komite proyek (KP). Saat itu dengan jumlah staf lapangan yang hanya berjumlah tiga orang, yakni satu program manager dan dua fasilitator lapangan, maka dirasakan kesulitan untuk menjangkau seluruh warga dampingan yang ada di 10 Rw di kelurahan Cilincing. Tim ADP membutuhkan adanya warga setempat yang bersedia bekerjasama dengan ADP untuk menjadi perpanjangan tangan ADP menyampaikan informasi tentang proyek kepada warga, membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan warga maupun para pemangku kepentingan setempat. Adanya komite proyek ini menjadi sarana bagi warga masyarakat untuk menyampaikan masukan dan usulan-usulannya kepada ADP untuk diimplementasikan lewat kegiatan-kegiatan proyek di lapangan. Komite proyek juga diharapkan menjadi pengelola kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh warga dampingan sementara staf lapangan proyek akan memberikan dukungan teknis kepada komite proyek serta memonitor pelaksanaannya. Untuk kepentingan jangka panjang, komite proyek diharapkan dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah dibangun oleh ADP bersama masyarakat saat Wahana Visi Indonesia menyelesaikan programnya.

Dalam rangka membentuk komite proyek ini, tim ADP kembali melakukan pertemuan di masing-masing Rw dengan mengundang perwakilan warga dari setiap Rt beserta tokoh masyarakatnya. Disampaikan maksud dan tujuan dari pembentukan komite proyek tersebut dan bersama-sama menetapkan kriteria untuk calon anggota komite proyek yakni memiliki waktu untuk terlibat aktif dan merasa terpenggil untuk melakukan upaya-upaya perubahan terhadap kondisi warga di tempat tinggalnya yang kurang beruntung. Akhirnya dari tiap Rw bersepakat untuk mengusulkan salah satu warganya untuk duduk sebagai pengurus dalam komite proyek. Adapun struktur komite proyek saat awal dibentuk hanya berisikan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Belum ada pengaturan pembagian tugas yang lebih rinci pada posisi anggota pengurus. Pak H. Sud merupakan ketua komite proyek di masa awal tersebut dan bu Yyt pada saat itu merupakan salah-satu anggota pengurus.

“ ..saat itu tim ADP membentuk komite proyek atau biasa disebut KP yang isinya adalah perwakilan dari warga dampingan dari tiap Rw, bisa dia kader, tokoh masyarakat setempat atau warga biasa, warga sendiri yang menetapkan siapa yg jadi wakilnya duduk di KP..” (Is, staf moneyv ADP, 6 Nov 2012)

Untuk membangun kapasitas dari para pengurus komite proyek maka tim ADP juga memfasilitasi rangkaian pelatihan seperti latihan kepemimpinan, tata kelola kelompok swadaya masyarakat serta manajemen proyek. Memang dalam perjalanan waktu tidak semua pengurus dapat konsisten terlibat aktif dalam komite proyek. Ada yang karena waktunya tersita oleh pekerjaan, sehingga akhirnya mengundurkan diri dari kepengurusan. Ada juga yang awalnya terlibat aktif, akan tetapi karena merasa menjadi komite proyek tidak memberikan manfaat materi sebagaimana yang diharapkan akhirnya mundur. Sekalipun demikian ada juga pengurus komite proyek yang terus bertahan sampai sekarang seperti ibu Yyt. Sejak tahun 2003, masa kepengurusan di komite proyek ini berlangsung tiga tahun yakni periode 2003 – 2006, 2006 – 2009 dan 2009 – 2012 dan sejak tahun 2009, ibu Yyt duduk sebagai ketua pengurus dari komite proyek

yang dalam perjalanan waktu, nama komite proyek berubah menjadi Program Masyarakat Cilincing (PMC) pada tahun 2009..

“ PMC (program masyarakat Cilincing) yg sekarang itu .. cikal bakalnya dari komite proyek yg dulu dibuat ADP dan komite proyek ini yang akan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam ADP bareng staf nya .. ntar kalo ADP selesai, komite proyek atau PMC yang bakalan nerusin yang sudah ada ..” (Yyt, ketua program masyarakat cilincing, 6 Nov 2012)

Salah satu prestasi yang membanggakan dari komite proyek ini adalah sejak tahun 2010 telah memiliki sebuah kantor sekretariat di Rw 04 yang disebut gedung Srikandi dan menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat. Awalnya lahan yang ditempati oleh gedung Srikandi tersebut merupakan lahan milik Dinas Sosial yang telah lama kosong. Karena ada kebutuhan untuk memiliki tempat pertemuan bagi kegiatan rutin komite proyek, maka ibu Yyt saat itu memberanikan diri untuk mengajukan usulan kepada pihak kelurahan untuk meminjam lahan kosong tersebut untuk mendirikan tempat pertemuan. Mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Dinas Sosial, maka disarankan agar proposal peminjaman lahan tersebut diajukan kepada suku dinas sosial Jakarta Utara. Sebagai antisipasi kesiapan komite proyek untuk membangun di atas lahan tersebut maka komite proyek juga mengajukan proposal kepada Wahana Visi Indonesia untuk mendapatkan dukungan dana bagi pembangunan di atas lahan tersebut. Akhirnya pihak Dinas Sosial mengizinkan lahan kosong tersebut dipinjam pakai untuk dibangun gedung pertemuan, dengan syarat gedung tersebut harus untuk kepentingan umum dan tidak menjadi milik pribadi. Wahana Visi Indonesia sesuai dengan kebijakan organisasinya, hanya dapat mendukung dana pembangunan awal berupa bahan bangunan senilai Rp 25 juta rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan sisa biaya bahan bangunan dan ongkos kerjanya, komite proyek selanjutnya menggerakkan warga masyarakat secara swadaya bergotongroyong menyelesaikan pembangunan tempat pertemuan berukuran 4 x 12 meter tersebut. Memakan waktu hampir dua tahun, akhirnya gedung pertemuan sederhana tersebut rampung dan diresmikan pemakaiannya oleh pimpinan

kecamatan Cilincing pada tahun 2010. Saat ini di gedung Srikandi tersebut menjadi tempat belajar kejar paket A,B,C, demikian juga untuk kelompok belajar anak maupun posyandu.



Gambar 4.1 Ruang Pertemuan Gedung Srikandi

Sumber : dokumentasi penelitian

Gambar 4.1 di atas memperlihatkan kondisi ruang pertemuan gedung Srikandi, dimana sedang berlangsung pertemuan orangtua anak dampingan proyek sponsorship dengan staf ADP membicarakan mekanisme dukungan bantuan kesehatan bagi anak dampingan yang memiliki masalah kesehatan.

4.1.1.3 Survei Kondisi Awal (Baseline)

Tim ADP melakukan baseline survei di tahun 2002 untuk mendapatkan gambaran awal kondisi masyarakat dampingan khususnya keluarga kurang mampu dari sisi kesehatan anak, pendidikan maupun ekonomi seperti misalnya status gizi balita, tingkat putus sekolah ataupun besarnya pengeluaran rumah tangga dari warga di wilayah dampingan. Dengan mengetahui data ini, akan menolong tim ADP untuk memfokuskan intervensi programnya pada sektor tertentu dan kelak setelah suatu periode program selesai, kondisi warga dampingan setelah diintervensi oleh kegiatan program akan dibandingkan dengan kondisi warga sebelum mendapatkan intervensi untuk melihat sejauhmana perubahan terjadi pada kondisi kehidupan warga dampingan.

Dalam keseluruhan kegiatan baseline survey tersebut, mulai dari proses persiapan sampai dengan penyampaian hasil dari baseline, tim ADP melibatkan

komite proyek sebagai koordinator lapangan baseline survey sebagaimana diungkapkan oleh ibu Yyt.

“ baselinenya juga waktu itu ada pak Wrn dari komite proyek ikutan juga, .. komite proyek juga yang terlibat menyampaikan hasil baseline di pertemuan,” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Pada tahap persiapan, komite proyek menyampaikan informasi tentang rencana baseline tersebut kepada para pemangku kepentingan setempat beserta warga masyarakat lewat pertemuan di kantor kelurahan sehingga saat petugas survey menemui warga masyarakat maka warga siap untuk memberikan informasi yang benar. Komite proyek juga terlibat dalam diskusi dengan staf kantor pusat WVI untuk mempersiapkan kuesioner dan saat pelaksanaan survey, komite proyek mengkoordinasi proses pengumpulan data di lapangan yang melibatkan 12 orang tenaga enumerator dan 3 orang staf lapangan sebagai supervisor lapangan. Demikian juga saat laporan hasil baseline telah dihasilkan, maka kembali komite proyek menyampaikan hasil temuan tersebut kepada para pemangku kepentingan dan warga masyarakat lewat pertemuan lokakarya di kantor kelurahan. Adapun hasil baseline survey (WVI, 2001) menunjukkan profil keluarga kurang mampu di Cilincing yang mayoritas bekerja sebagai buruh, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap rumah tangga lebih dari enam orang dan sudah berdomisili di Cilincing lebih dari limabelas tahun. Adapun pengeluaran rata-rata keluarga kurang mampu tersebut hanya sebesar Rp 300.000 sampai dengan Rp 400,000 per bulan untuk makanan dan Rp 150,000 per bulan untuk bahan bukan makanan. Pada sisi pendidikan anak, tidak semua anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan formal sembilan tahun dan angka putus sekolah terbesar ada di tingkat sekolah menengah dimana 175 anak dari seribu anak SMP mengalami drop out dan 400 anak dari seribu anak usia SMP tidak bersekolah. Ketiadaan biaya menjadi alasan utama dari orangtua tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara untuk profil kesehatan keluarga kurang mampu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran orangtua atau ibu balita akan pentingnya kesehatan anak bayi dan balitanya masih

rendah dan mayoritas keluarga merupakan pengguna sarana MCK umum untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari.

Selanjutnya temuan baseline survei tersebut dijadikan rujukan oleh tim ADP untuk melakukan pemetaan terhadap permasalahan serta potensi sumberdaya yang dimiliki oleh warga dampingan di wilayah sasaran.

4.1.1.4 Pengkajian Masalah dan Potensi

Untuk mendalami temuan baseline survey tersebut maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh tim ADP adalah memfasilitasi pertemuan dengan warga dampingan di setiap Rw di kelurahan Cilincing. Adapun informasi yang digali dalam pertemuan ini adalah apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, apa potensi-potensi yang tersedia maupun opsi-opsi solusi penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan metode PLA (*Participative Learning and Action*). Pertemuan PLA di Rw ini dihadiri oleh warga masyarakat perwakilan dari setiap Rt dan tidak saja melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak untuk mendapatkan masukan dari mereka. Sebelum pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan itu dilakukan di setiap Rw, maka tim ADP terlebih dahulu melakukan pelatihan kepada warga dampingan tentang metode PLA tersebut untuk memampukan mereka nantinya melakukan PLA di lapangan sebagaimana dinyatakan oleh ibu Yyt.

“ .. itu pertama kali saya bikin PLA di Rw-Rw dan saya salah satu fasilitatornya ..” (Yyt, ketua Program Masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Pelaksanaan PLA di setiap Rw dilakukan terhadap empat kelompok masyarakat yakni kelompok dewasa pria, kelompok dewasa perempuan, kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan. Hal ini dilakukan agar permasalahan sosial yang disampaikan warga tidak hanya dilihat dari kacamata orang dewasa saja tetapi juga dari kacamata anak-anak. Sebagai contoh, ketiadaan ruang bermain bagi orang dewasa mungkin dianggap bukan sebagai suatu masalah karena yang menjadi prioritas mereka adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tetapi bagi kelompok anak-anak, ketiadaan lahan untuk mereka

bisa bermain-main dengan aman dan leluasa menjadi kebutuhan besar dan hal ini menjadi salah-satu masalah yang ditemui di lapangan, karena tidak mudah untuk mendapatkan lahan kosong di wilayah Cilincing. Selain permasalahan yang terjadi di wilayah dampingan, lewat PLA ini juga diidentifikasi potensi-potensi sumberdaya yang tersedia di lapangan seperti keberadaan tenaga kader PKK yang juga merupakan agen-agen perubahan masyarakat, adanya tokoh-tokoh masyarakat yang juga turut peduli dengan kondisi warga kurang mampu, demikian juga keberadaan program bantuan sosial pemerintah maupun lembaga lainnya di wilayah dampingan yang bisa dioptimalkan dampaknya bagi kepentingan warga dampingan.

“ .. bersama-sama mengadakan PLA dengan masyarakat, PLA dulu per Rw, anak kita pisah, ada PLA anak dan PLA dewasa. Jadi ada kolom-kolom apa masalahnya, bagaimana mengatasinya, dan itu per Rw. Digali juga potensi masyarakat di sana, seperti adanya tenaga, tempat dan waktu. Jadi semuanya kita rangkum, kita sudah menemui masalah dan potensi lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. ini loh hasil dari PLA Rw..” (Win, staf lapangan ADP, 22 Mei 2012)

Warga dampingan mengikuti pertemuan PLA ini dengan antusias karena menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti ketiadaan sarana bermain bagi anak yang memadai, kesulitan untuk memperoleh air bersih, masalah penanganan sampah, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya, ketidakmampuan warga untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan pendidikan maupun keterampilan, dan lain-lain. Hasil dari PLA Rw tersebut kemudian menjadi bahan untuk untuk menyusun rencana intervensi program atau kegiatan ADP yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

4.1.1.5 Perencanaan Kegiatan Intervensi ADP

Adapun proses perencanaan kegiatan intervensi proyek ADP terbagi atas dua bagian yakni rencana operasional jangka panjang (tiga tahunan) dan rencana operasional tahunan. Baik rencana operasional jangka panjang maupun tahunan ini perumusannya dilakukan oleh tim ADP bersama-sama dengan warga dampingan beserta para pemangku kepentingan setempat. Adapun rencana operasional jangka panjang ADP tersebut akan dituangkan ke dalam dokumen rancangan program atau biasa disebut tim ADP sebagai PPDD (*program / project design document*). PPDD ini akan berisi kerangka kerja logis program (*program logical framework*) beserta penjelasannya yang memuat tujuan program, *outcome* dan *output* serta besaran aktivitas yang akan dilakukan oleh tim ADP untuk suatu periode tiga tahun. Dari PPDD ini akan kemudian akan diturunkan menjadi rencana kegiatan operasional tahunan.

a. Penyusunan Rencana Operasional Tiga Tahunan

Untuk penyusunan rencana operasional jangka panjang untuk periode 2004 – 2006 tersebut, maka pada tahun 2003 dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait seperti pihak kecamatan, kelurahan, puskesmas dan dihadiri pula oleh komite proyek. Seluruh perwakilan stakeholder dan warga dampingan dibawa oleh tim ADP ke Ciloto untuk membahas lebih lanjut hasil dari proses identifikasi masalah dan potensi sumberdaya masyarakat yang diperoleh dari PLA sebelumnya.

Di pertemuan Ciloto tersebut, ada sekitar 80-an partisipan yang bisa dihadirkan oleh tim ADP. Hasil dari PLA Rw sebelumnya kemudian dipaparkan kembali kepada seluruh yang hadir. Selanjutnya dengan difasilitasi oleh staf kantor pusat WVI, dilakukan pengelompokan terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam proses PLA, sehingga dari sekian banyak masalah yang diidentifikasi saat PLA tersebut mengerucut menjadi 24 masalah besar. Dari 24 masalah besar tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan isu sektorialnya yakni masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Partisipan selanjutnya dibagi dalam tiga kelompok sesuai dengan isu sektoral tersebut dan menganalisa penyebab

masalah dari masing-masing temuan permasalahan seperti apa yang menyebabkan anak-anak tersebut putus sekolah atau kekurangan gizi dan lain-lain.

“apa sih masalah yang ada di masyarakat ? itu dilist semuanya, kalo gak salah itu sekitar 24 masalah-waktu itu. Jadi ada 3 kelompok besar disitu setelah kita dapet list kita bikin lagi, mana yang masuk ke sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan..” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing , 26 Mei 2012)

Di masing-masing kelompok tersebut, setiap permasalahan temuan PLA Rw dibahas lebih mendalam dengan pendekatan analisa pohon masalah sehingga bisa dilacak apa yang menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Diskusi panjang terjadi di masing-masing kelompok untuk menetapkan akar penyebab dari permasalahan tersebut karena memang tidak mudah untuk mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan yang sudah terjadi sedemikian lama di masyarakat dampingan. Banyak hal saling berkaitan satu sama lain dan berkontribusi menyebabkan timbulnya permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan warga yang menyebabkan kurangnya pemahaman warga akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak yang turut berkontribusi atas rendahnya prestasi belajar anak dan ditambah dengan keterbatasan kemampuan ekonomi orangtua akhirnya menyebabkan anak putus sekolah. Ini menjadi salah-satu contohnya.

Setelah mendapatkan gambaran pohon masalah tersebut, selanjutnya di masing-masing kelompok menyusun pohon tujuan yang ingin dicapai bersama dengan mempertimbangkan potensi yang tersedia di wilayah dampingan. Kembali terjadi diskusi yang panjang di masing-masing kelompok karena masing-masing partisipan memiliki ekspektasi tertentu akan perubahan yang diharapkan terjadi lewat intervensi ADP. Ada yang mengharapkan intervensi ADP di bidang ekonomi menjadi prioritas dibandingkan di bidang kesehatan dan pendidikan demikian juga sebaliknya. Masing-masing datang dengan argumentasinya masing-masing yang mendukung harapan-harapan tersebut. Akhirnya disepakati dengan para partisipan bahwa selain potensi sumberdaya yang tersedia di wilayah

dampingan, kapasitas WVI dan tujuan dari diadakannya program ADP yakni mengupayakan kesejahteraan anak menjadi pertimbangan dari intervensi yang akan dilakukan.

Dari pohon tujuan tersebut kemudian disusun logframe program dan proyek untuk satu periode implementasi tiga tahunan. Apa yang menjadi tujuan atau *goal* utama dari program yang didukung dari pencapaian *outcome* masing-masing proyek pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi yang dihasilkan dari *output* aktivitas tiap proyek. Seluruh peserta dengan antusias menggarap penyusunan logframe program dan proyek tersebut sehingga pertemuan berakhir sampai jauh tengah malam untuk menyelesaikan penyusunannya.

“ kita sampe jam 12 malem nyusun yang namanya pohon masalah dan pohon tujuan...terus kita bikin programnya apa..” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Proses penyusunan rencana bersama ini merupakan suatu pengalaman baru bagi seluruh peserta yang hadir di pertemuan Ciloto tersebut dan dirasakan menjadi proses pembelajaran baik disampaikan oleh Yyt, ketua PMC

“..belajar dimana ? 3 hari pak sampe budek. Ada otodidak yang secara gak langsung wvi ajarkan kepada warga ..” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Is, staf monev juga melihat proses penyusunan rencana ini juga menjadi pembelajaran bahkan bagi staf juga.

“..Kalo untuk di awal, di 2003 itu kan kita udah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, mulai dari situ kita sebagai staf juga belajar, kita juga belajar proses bagaimana memfasilitasi masyarakat bikin pohon masalah abis itu pohon tujuan, jadilah logframe..” (Is, staf monev ADP, 22 Mei 2012)

Dalam pertemuan di Ciloto ini, tim ADP juga menghadapi situasi yang tidak diharapkan terkait dengan partisipasi dari salah satu stakeholder kecamatan yang meninggalkan pertemuan di pertengahan acara karena rupanya yang bersangkutan mengharapkan tim ADP menyediakan uang jasa atas keterlibatannya dalam pertemuan tersebut sebagaimana yang biasa dia terima bila mengikuti pertemuan yang diselenggarakan pihak lainnya. Sesuai dengan kebijakan organisasi maka permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi karena transportasi dan akomodasi peserta untuk mengikuti pertemuan sudah disediakan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi tim ADP untuk menyampaikan dengan jelas apa yang bisa diperoleh warga dampingan atau para pemangku kepentingan saat melibatkan mereka dalam pertemuan-pertemuan ADP.

Hasil dari proses perencanaan program bersama tersebut dituangkan ke dalam dokumen rancangan program (PPDD – *program / project design document*) untuk periode tahun 2004 – 2006. Menjelang berakhirnya suatu periode tahapan program, seperti di tahun 2006, tahun 2009 dan tahun 2012 maka kembali proses perencanaan untuk suatu periode desain program ini dilakukan oleh tim ADP bersama-sama warga dampingan seperti model pertemuan di Ciloto tersebut.

“...selama ADP Cilincing ada, sudah beberapa kali menyusun program desain itu bersama warga untuk buat logframe...seperti di tahun 2003 buat periode 2004 sampai dengan 2006, terus juga untuk periode berikutnya sampai yang terakhir tahun ini untuk persiapan transisi..”(Is, staf monev ADP, 8 November 2012)

Mengacu kepada desain program tiga tahunan tersebut maka setiap tahun tim ADP menterjemahkannya menjadi rencana operasional tahunan (*annual operational plan - AOP*) sebagaimana dinyatakan oleh Hdr, staf monev ADP berikut ini

“..Project design inilah yg akan menjadi rujukan untuk kegiatan ADP setiap tahunnya..” (Hdr, stav monev ADP, 15 Mei 2012)

b. Penyusunan Rencana Kegiatan Operasional Tahunan

Untuk rencana kegiatan operasional tahun pertama dari suatu periode tahapan program, maka tim ADP langsung merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan dokumen rancangan desain program yang telah tersusun tersebut. Sehingga dalam pertemuan untuk menyusun rancangan desain program 2004 – 2006 maka tim ADP beserta warga dampingan sekaligus merumuskan rencana kegiatan operasional tahun 2004. Hal yang sama juga berlaku untuk periode 2007 – 2009 maka rencana operasional tahun 2007 juga langsung dirumuskan bersamaan dengan perumusan rancangan desain program tahun 2007 – 2009, demikian seterusnya untuk periode tahun 2010 – 2012 dan tahun 2013 – 2015.

“ ..saat menyusun project design seperti untuk periode 2004 sampai dengan 2006 tersebut maka tim ADP bersama warga dampingan juga membuat AOP (*annual operation plan*) 2004 sehingga rencana tahunan tersebut sinkron dengan project designnya, demikian juga untuk periode berikutnya”
(Hdr, staf monev ADP, 15 Mei 2012)

Adapun rencana operasional tahunan berisikan informasi yang lebih rinci tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam tiap proyek pada setiap bulannya beserta target pencapaiannya dan alokasi kebutuhan anggarannya. Jadi misalnya dalam proyek kesehatan, kegiatan pelatihan untuk kader posyandu akan dilaksanakan pada bulan apa, berapa banyak target pesertanya dan besarnya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian juga hal yang sama untuk proyek pengembangan ekonomi, seperti kapan saja dalam waktu setahun akan dilakukan kegiatan pelatihan, kapan saja proses pendampingan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelatihan-pelatihan tersebut. Pada proses ini, usulan-usulan dari warga dampingan yang sejalan dengan logframe desain program akan diakomodir oleh tim ADP untuk menjadi bagian dari rencana kegiatan proyek yang akan dilaksanakan dalam satu tahun fiskal. Di masa awal ADP, karena kurang mengertinya warga dampingan maupun para pemangku kepentingan akan hubungan antara desain program dengan AOP, maka

tim ADP perlu mengalokasikan waktu untuk memberikan penjelasan atas ditolaknya sejumlah usulan-usulan kegiatan proyek dari masyarakat untuk dilaksanakan melalui ADP.

“ usulan dari warga juga dibicarakan dan menjadi pertimbangan dalam membuat AOP, bila memang ada di desain program, maka dimasukkan dalam daftar kegiatan ,”(Yac, program manager ADP, 7 November 2012)

Selain rencana operasional tahunan yang disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan program tiga tahunan, maka perencanaan kegiatan untuk tahun kedua dan ketiga juga dilakukan dengan melibatkan warga dampingan. Biasanya pertemuan untuk menyusun rencana operasional tahunan ini dilakukan pada sekitar bulan April sampai dengan Mei.

Proses yang dilakukan adalah tim ADP akan memaparkan logframe dari periode program yang sedang berjalan. Disampaikan juga pencapaian proyek yang telah terjadi sepanjang tahun fiskal sebelumnya serta pencapaian dari semester pertama dari tahun fiskal yang sedang berjalan serta rencana kegiatan di semester dua. Merujuk kepada logframe program dan pencapaian tersebut, maka dirumuskan rencana kegiatan untuk tahun fiskal berikutnya. Dari hasil pertemuan dengan warga dan komite proyek tersebut, tim ADP akan memfinalisasi AOP tersebut sehingga diperoleh besaran anggaran yang diperlukan untuk satu tahun fiskal.

Dokumen AOP ini selanjutnya akan dikirimkan oleh program manager ADP kepada kantor World Vision Indonesia untuk direview kembali oleh program officer untuk memastikan keterkaitan AOP tersebut dengan desain program dan kelengkapan informasi dalam AOP tersebut seperti rincian anggaran untuk setiap kegiatan, daftar target peserta dan lembaga mitra yang akan dilibatkan serta indicator pencapaian target yang ingin dicapai lewat kegiatan sepanjang tahun fiskal tersebut.

Bila dalam AOP tersebut ada usulan kegiatan yang tidak sejalan dengan dokumen desain program periode tiga tahunan yang sedang berjalan, maka tim ADP perlu melengkapinya dengan penjelasan rinci mengapa kegiatan tersebut

perlu dilakukan dan sejauhmana adanya kegiatan baru tersebut akan mempengaruhi dokumen desain program. Dokumen AOP yang telah lengkap tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke kantor World Vision Kanada yang mendukung pendanaan untuk ADP Cilincing pada bulan Juni untuk memintakan persetujuan donor bagi pelaksanaan AOP tersebut untuk tahun fiskal berikutnya. Persetujuan donor akan usulan AOP berikut anggaran yang diperlukan, biasanya diberikan pada periode kuartal pertama yakni antara bulan Oktober sampai dengan Desember pada tahun fiskal usulan AOP tersebut. Dalam proses penyusunan AOP ini juga warga dampingan kembali dilibatkan.

“..kita diundang setiap tahun bikin program, masyarakat dilibatkan, nah programnya itu yang akan kita kerjakan setahun ini, juga yang sama-sama akan kita lihat pencapaiannya, tidak melenceng dari ini pak..” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Rencana kegiatan operasional tahunan tersebut menjadi rujukan bagi tim ADP dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat dampingan di lapangan khususnya kepada kelompok kader kesehatan maupun kelompok usaha kecil.

4.1.1.6 Implementasi program

Berdasarkan temuan di lapangan berikut ini adalah gambaran dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP Cilincing kepada kelompok dampingan kesehatan maupun ekonomi melalui implementasi programnya di lapangan.

a. Kelompok dampingan kesehatan

Dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada kelompok dampingan kesehatan, maka strategi yang dilakukan oleh tim ADP adalah pertama, menggandeng kelompok kader PKK yang sudah ada di wilayah sasaran sebagai target dampingan proyek maupun mitra ADP mengimplementasikan kegiatan kesehatan ibu dan anak. Kedua, memfasilitasi pertemuan rutin kader sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Ketiga, memfasilitasi kegiatan

pelatihan kesehatan sebagai upaya penguatan kapasitas kelompok kader untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan keempat, memfasilitasi kegiatan advokasi kesehatan untuk memungkinkan warga dampingan memperoleh akses memadai kepada layanan kesehatan dasar.

a.1. Kader PKK sebagai target dampingan proyek dan mitra utama ADP

Sedari awal tim ADP telah menjadikan kelompok kader PKK selaku kader kesehatan masyarakat yang bertugas di posyandu, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) maupun kelas ibu hamil, sebagai target dampingan proyek maupun sebagai mitra utama ADP dalam melakukan kegiatan proyek kesehatan ibu dan anak. Hal ini dikarenakan kader PKK merupakan elemen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan posyandu yang merupakan inisiatif layanan kesehatan dasar bagi balita yang berbasiskan komunitas yang juga menjadi ujung tombak dari puskesmas setempat dalam memberikan layanan imunisasi kepada balita di wilayah kerja puskesmas terkait di samping sebagai sarana monitoring kondisi status gizi balita.

Kader PKK ini juga yang banyak terlibat dalam penyampaian informasi program kesehatan pemerintah di wilayah dampingan dan yang paling utama karena kader PKK adalah warga setempat, maka mereka biasanya sangat mengenal kondisi masyarakat khususnya untuk isu kesehatan ibu dan anak serta dikenal oleh warga masyarakat. Di Cilincing, kader PKK tidak saja berperan dalam kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak tetapi juga mengambil bagian dalam banyak kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti kegiatan kerohanian di majelis taklim, bahkan ada juga yang menjadi kader partai politik yang memobilisasi warga untuk kegiatan-kegiatan kampanye seperti pilkada yang berlangsung beberapa waktu lalu di Jakarta.

“...masing-masing proyek memiliki target dampingan seperti kesehatan ibu dan anak maka khususnya anak balita serta ibu-ibunya atau pengasuh menjadi target dampingan selain kepada para kader PKK di posyandu atau kader yang mendampingi kelas ibu hamil.” (Yac, program manager ADP Cilincing, 13 Mei 2012)

Dalam implementasi proyeknya, ADP Cilincing mengupayakan untuk bekerjasama dengan kelompok kader PKK yang sudah ada di wilayah dampingan. Dengan bekerjasama dengan kelompok kader tersebut, ADP berharap kelak setelah program pemberdayaan yang dilakukan ADP selesai maka apa yang sudah dibangun bersama-sama antara tim ADP dengan kader dapat dilanjutkan dengan kader sebagai salah satu penggerak utama di tingkat masyarakat. Setidaknya dalam setiap Rw minimal ada satu atau dua kelompok kader yang mengelola kegiatan posyandu. Dan ini berarti setidaknya ada sekitar delapan sampai dengan sepuluh kader aktif di masing-masing Rw. Dengan adanya kader-kader yang terlatih dan terampil untuk melakukan upaya menolong warga di lapangan, maka mereka merupakan potensi agen perubahan di masyarakat yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“ ya memang kader posyandu dan PKK sudah ada kegiatannya sebelum ADP masuk dan dibilangin ama staf kalau nanti ADP selesai, kader-kader bisa ngelanjutin ..” (Yyt, ketua program masyarakat cilincing, 26 Mei 2012)

a.2. Pertemuan rutin kader

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh tim ADP adalah memfasilitasi pertemuan rutin kader sebagai sarana komunikasi antara kelompok kader dengan tim ADP selain interaksi di lapangan saat memonitor kegiatan posyandu dan kelas ibu hamil. Pertemuan untuk kelompok kader biasanya dilakukan minimal sebulan sekali bersamaan dengan pertemuan bulanan kader posyandu yang turut dihadiri pula oleh staf puskesmas. Pertemuan rutin ini dilakukan pada tingkatan kelurahan dan dihadiri oleh perwakilan kader dari setiap Rw dan biasanya mengambil tempat di ruang pertemuan puskesmas ataupun di salah satu balai RW.

“ ya kita ketemuan kader-kader sebulan sekali, biasanya mbak Kart (staf ADP) hadir juga ama bidan puskesmas ...(Har, kader kesehatan, 6 Nov 2012)

Adapun yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah persiapan untuk pelaksanaan kegiatan ADP berikutnya atau mendiskusikan kalau ada masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung. Dalam pertemuan ini juga sama-sama dibahas solusi untuk permasalahan yang terjadi maupun mengambil pembelajaran dari apa yang berlangsung dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu juga dibahas isu-isu kesehatan yang terjadi di masyarakat seperti misalnya kesulitan yang dihadapi warga untuk mengakses layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit atau bagaimana mengantisipasi merebaknya kondisi penyakit yang menimpa anak-anak di wilayah-wilayah yang rawan banjir yang banyak terdapat di wilayah dampingan ADP Cilincing. Selain itu lewat pertemuan rutin kader juga menjadi sarana bagi tim ADP untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ADP tidak hanya di bidang kesehatan ibu dan anak, melainkan juga kegiatan pengembangan ekonomi dan lain-lain. Karena ada juga di antara kader-kader tersebut yang tidak hanya terlibat aktif dalam kegiatan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mengambil bagian dalam kegiatan pendampingan wakil anak atau menjadi penyuluh dalam kegiatan HIV&AIDS.

“ ya pas pertemuan kader itu mbak Kart suka tanyain ada masalah gak bu dalam kegiatan posyandu atau di kelas ibu hamil, terus (kader) yang lain juga bisa menimpali bagi pengalaman kalau juga menghadapi hal yang sama..sama-sama belajar gitu ..” (Har, kader kesehatan, 6 Nov 2012)

Ibu Dew, ketua Rt mengungkapkan bahwa lewat kesempatan pertemuan tersebut maka kader bisa menyampaikan pendapatnya tentang kondisi kesehatan ibu dan anak yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kader.

“ kalo ibu-ibunya sih kalo ada undangan dari ADP gitu..dia bisa sampaikan pendapatnya sama ADP ...yang dia denger juga bisa dia pahami.” (Dew, ketua Rt, 26 Mei 2012)

Ibu Yyt, ketua Program Masyarakat Cilincing (PMC) juga menambahkan bahwa lewat pertemuan tersebut menjadi media untuk menyampaikan informasi dan masukan bagi program ADP

“.. dalam pertemuan kita sampaikan informasi dan masukan warga untuk ADP misalnya masalah saluran got kita kelompokkan ke kesehatan, ini kita teruskan ke ADP untuk dapat perhatian dan menjadi kegiatan program..”
(Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Pertemuan dan dialog tersebut selain membuat tim ADP semakin mengenal kondisi permasalahan maupun potensi yang tersedia di wilayah dampingan juga membuat warga satu sama lain jadi lebih saling mengenal sebagaimana diungkapkan oleh ibu Har.

“ akhirnya mereka hadir kumpul ...ternyata manfaatnya itu ada, yaitu kalo WVI ngundang ada manfaatnya, kan pasti juga tali silaturahmi kita lebih diperpanjang lagi..kita makin kenal satu dengan yang lain ..”(Har, kader kesehatan, 24 Mei 2012).

Selain pertemuan regular tersebut, ADP juga setiap dua tahun sekali memfasilitasi pertemuan jambore kader posyandu yang mempertemukan seluruh kader posyandu dampingan ADP. Pertemuan ini sekaligus sebagai apresiasi bagi kader untuk pengabdian yang diberikan dalam melakukan pelayanan kesehatan rutin melalui posyandu kepada masyarakat. Pertemuan jambore kader ini merupakan kerjasama antara ADP, TP PKK dan Sudinkes dan dalam pertemuan ini diselenggarakan perlombaan cerdas cermat antar kader, talkshow tentang isu kesehatan ibu dan anak, penampilan kreasi seni dari kelompok kader dan juga kegiatan *outbond* dan *team building*. Jambore kader ini tidak hanya melibatkan kader posyandu dampingan ADP Cilincing saja, tetapi juga kader posyandu dampingan ADP lainnya yang ada di Jakarta sehingga dalam penyelenggaraannya melibatkan sampai 800-an peserta.

Gambar 4.2 menunjukkan salah satu kegiatan pertemuan bulanan kader yang difasilitasi oleh staf lapangan ADP. Dalam pertemuan ini disampaikan oleh staf tentang rencana penyelenggaraan kampanye kesehatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional.



Gambar 4.2 Pertemuan Rutin Kader

Sumber : dokumentasi penelitian

a.3. Pelatihan kader kesehatan

Selain memfasilitasi adanya pertemuan rutin bersama kader, maka upaya pemberdayaan kepada kelompok kader kesehatan ini dilakukan oleh tim ADP dengan memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas bagi kelompok kader lewat berbagai pelatihan sebagaimana diungkapkan oleh bidan Rum dari Puskesmas Cilincing.

“ Wahana Visi itu bekerjasama dengan kader, bekerjasama dengan puskesmas, memberikan bantuan kepada posyandu, memberikan support dan pelatihan di posyandu dan pos bumil buat kader , juga ada pelatihan buat bidan-bidan se puskesmas cilincing waktu itu,” (bd Rum, petugas puskesmas, 4 Juni 2012)

Tim ADP juga bekerjasama dengan PKK untuk memfasilitasi pelatihan bagi kader-kader kesehatan masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh ibu Mar dari TP PKK Kelurahan Cilincing

“ bekerjasama dengan kita PKK mengenai itu ..melatih para kader sampai para kader itu dijadikan sebagai motivator untuk kader lainnya..ada juga lomba kader ...kemarin juga ada lomba bumil, dimana saya menjadi juri..”(Mar, TP PKK kelurahan, 4 Juni 2012)

Adapun proses penyusunan kegiatan pelatihan dikoordinasikan bersama diantara tim ADP dengan pihak puskesmas untuk memastikan kesesuaian materi dan juga ketersediaan tenaga pelatih yang biasanya difasilitasi oleh puskesmas.

“ biasanya pihak wvi datang kepada kita, rembukan dulu, ini ada pelatihan apa yang disiapkan wahana visi, apa yang disiapkan puskesmas, seperti itu mitra kerja, ada kerjasama ,” (bd Rum,petugas puskesmas, 4 Juni 2012)

Penjadwalan pelatihan juga memperhatikan kalender penyelenggaraan posyandu agar tidak berbenturan sehingga kader dapat terlibat aktif dalam pelatihan.

“ waktunya juga dipastikan tidak tabrakan dengan jadwal posyandu supaya kader bisa ikut semua ..”(Har, kader kesehatan ADP, 24 Mei 2012)

Gambar 4.3 merupakan salah satu kegiatan pelatihan kader yang difasilitasi oleh staf lapangan ADP yakni pelatihan konseling



Gambar 4.3 Kegiatan Pelatihan Konseling untuk Kader

Sumber : dokumentasi penelitian

a.4. Advokasi

Selain kegiatan pelatihan sebagai upaya pemberdayaan kepada kelompok kader kesehatan, maka sejak tahun 2011 tim ADP Cilincing juga memfasilitasi kegiatan advokasi dalam rangkaian upaya pemihakan kepada warga-masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal atas pelayanan kesehatan khususnya yang tersedia di posyandu dari para penyedia pelayanan kesehatan tersebut melalui program advokasi yang disebut aksi warga negara atau sering disebut di lapangan CVA (*Citizen Voice and Action*). Lewat program advokasi ini warga yang berhak menikmati layanan kesehatan dipertemukan dengan pihak penyedia jasa layanan kesehatan seperti puskesmas sehingga kualitas layanan yang tersedia dapat dioptimalkan. Para kader kesehatan dilatih tim ADP untuk mampu memfasilitasi proses penyampaian informasi dan aspirasi tentang kondisi kesehatan ibu dan anak di wilayahnya serta mempertemukan warga dengan pihak puskesmas atau suku dinas kesehatan setempat.

“ sekarang juga kita jadi ngerti tentang apa sih yang seharusnya kita dapetin dari pemerintah, seperti di layanan posyandu mestinya puskesmas mesti menyediakan tenaga untuk imunisasi atau kalau pas tidak ada di posyandu, layanan itu bisa didapatkan di puskesmas kapan saja ibu-ibu datang ke sana

bawa anaknya, warga juga dilatih untuk menjadi fasilitator CVA ini ”(Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 7 November 2012)

Bagi kader sendiri yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas mereka menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat adalah adanya warga dampingan yang masih terbatas kesadaran dan pengetahuannya akan pentingnya menjaga kesehatan anak. Ini terlihat dari masih adanya ibu-ibu yang jarang membawa anak balitanya untuk mengukur berat dan tinggi badannya sehingga bisa diketahui apakah anak-anak tersebut bertumbuh normal sesuai dengan usianya. Demikian juga masih ada ibu balita yang berpendapat bahwa selama anak tidak sakit maka tidak perlu dibawa ke posyandu untuk melihat perkembangannya.

“..kalau gak sakit gak perlu ikutan posyandu katanya...,” (Sup, kader kesehatan, 26 Mei 2012)

Ada juga ibu balita yang membiarkan anaknya untuk mengonsumsi jajanan yang dijual oleh pedagang makanan tanpa mencari tahu sejauhmana jajanan tersebut aman bagi anak-anaknya. Apalagi juga ada ibu balita yang tidak mau direpotkan menyediakan makanan bergizi untuk anaknya dengan memasak sendiri makanan tersebut. Mereka kadang-kadang lebih memilih untuk membeli makanan jadi yang dijual pedagang keliling seperti bubur ayam atau mie ayam bakso buat anak-anaknya karena alasan kepraktisan dan lebih murah.

“ya mungkin karena sekolahannya gak tinggi makanya ibu-ibu tersebut gak tahu kalau jajanan seperti itu gak bagus untuk anak-anaknya..jadi tugas kami memang untuk menolong mereka itu supaya sadar dan paham...,” (Mus, kader kesehatan , 26 Mei 2012)

Di samping itu di antara kader sendiri belum semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang merata sehingga perlu terus memperoleh pelatihan dan pendampingan. Itu sebabnya secara rutin ADP memberikan

pelatihan tentang mengelola kegiatan di posyandu seperti melakukan pencatatan yang baik dan benar atas data anak balita yang datang ke posyandu, melakukan penimbangan dan pengukuran berat serta tinggi badan anak yang benar, serta bagaimana memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan kepada ibu-ibu balita tersebut. Materi-materi tentang tumbuh kembang anak, penyakit-penyakit yang umumnya diderita anak dan bagaimana upaya menjaga kesehatan anak menjadi materi pelatihan bagi kader agar mampu memberikan konseling dan penyuluhan dengan baik. Selain itu perlu terus dilakukan pengkaderan untuk menghasilkan kader-kader kesehatan masyarakat yang baru di wilayah dampingan.

“...ada juga posyandu yang kadernya tidak semua aktif atau jumlah kader tidak cukup banyak makanya perlu ada kaderisasi dan pelatihan untuk menciptakan kader baru..terus kan kemampuan orang beda-beda, ada kader yang trampil, ada juga yang masih kurang sehingga masih perlu pelatihan untuk memampukan mereka...” (Mar,TP PKK kelurahan , 4 Juni 2012)

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim ADP di sektor kesehatan telah menolong kelompok kader untuk lebih meningkatkan kapasitasnya sehingga dapat menjalankan perannya dengan lebih optimal sebagai kader kesehatan masyarakat di wilayah di mana kader itu tinggal.

b. Kelompok dampingan pengembangan ekonomi

Sementara itu upaya pemberdayaan yang dilakukan tim ADP kepada kelompok dampingan pengembangan ekonomi dilakukan dengan langkah-langkah berikut yakni pertama memfasilitasi survey pasar untuk mengetahui produk usaha kecil yang paling diminati masyarakat. Selanjutnya sebagai langkah kedua, tim ADP memfasilitasi pelatihan keterampilan usaha mikro bagi warga dampingan yang berminat dan kemudian warga peserta pelatihan tersebut dikelompokkan dalam beberapa kelompok usaha mikro. Tim ADP juga berupaya untuk menghubungkan kelompok usaha tersebut dengan lembaga keuangan mikro untuk

akses kepada pinjaman modal maupun memfasilitasi kelompok simpan pinjam dan juga difasilitasi upaya pemasaran produk usahanya.

Untuk kegiatan pengembangan ekonomi maka target pendampingan ADP adalah kelompok usaha kecil. Saat ini di kelurahan Cilincing ada 5 kelompok usaha dampingan ADP yang bergerak pada produksi makanan ringan seperti kue kering dan basah, bakso ikan, rempeyek dan kacang disko serta kerajinan tangan.

“ kebanyakan kelompoknya buat usaha makanan ringan....seperti saya buat rempeyek lalu kelompok bu Har bikin kacang disko..ada juga kue-kue dan lain-lain..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 7 Nov 2012)

b.1. Survey pasar

Pada tahun 2010, tim ADP memfasilitasi survey pasar untuk melihat produk usaha kecil apa yang paling diminati oleh warga di wilayah Cilincing. Survey pasar dilakukan dengan mengunjungi pasar dan warung-warung yang ada di sekitar wilayah dampingan dan bertanya kepada para pedagang serta mengamati produk usaha kecil yang banyak dijual. Hasil survei pasar tersebut menyebutkan usaha makanan ringan dan kerajinan tangan menjadi produk andalan yang memiliki potensi pemasaran yang baik dan diminati oleh konsumen. Survei pasar dilakukan oleh tim ADP belajar dari pengalaman pendampingan di masa sebelumnya di mana produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha seperti usaha jahitan kurang laku di pasaran. Lewat survey pasar juga dipelajari hal-hal yang membuat sebuah produk lebih diminati konsumen, seperti untuk produk makanan, selain rasanya, juga bagaimana kemasannya. Sementara untuk produk kerajinan tangan seperti asesoris, bagaimana model yang sedang trend, perpaduan warna, ukuran serta tentu saja harga. Tim ADP juga mengidentifikasi lembaga pelatihan keterampilan membuat kue dan makanan serta kerajinan tangan yang dapat diajak bekerjasama untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan kepada warga dampingan.

“ hasil survey pasar waktu itu menyebutkan produk makanan dan kerajinan tangan ..” (Yac, program manager ADP, 13 Mei 2012)

b.2. Pelatihan keterampilan usaha

Saat itu diumumkan ke warga dampingan untuk yang berminat mempelajari keterampilan usaha makanan ringan dan kerajinan tangan dapat mendaftar pada kelas-kelas pelatihan yang difasilitasi oleh lembaga mitra ADP. Untuk pembuatan kue dan kerajinan tangan, ADP menggandeng lembaga Bogasari dan De Mono. Kebanyakan peserta adalah ibu-ibu, baik yang merupakan orangtua dari wakil anak dampingan proyek sponsorship ADP atau biasa disebut RC (*registered children*) maupun non RC dan ada juga kader kesehatan masyarakat yang berharap dengan keikutsertaan pelatihan ini akan dapat memulai usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Karena pelatihan ini dibiayai oleh ADP dan peserta hanya perlu mengusahakan biaya transportasi untuk datang ke tempat pelatihan, animo warga untuk mengikuti pelatihan cukup besar sehingga kegiatan pelatihan dilakukan dalam beberapa kelas mengingat satu kelas hanya untuk sepuluh peserta. Ada tiga kelas yang berlangsung saat itu dan masing-masing kelas berlangsung dalam delapan kali pertemuan masing-masing dua jam.

“ nah untuk pelatihan kayak snack contohnya, usaha itu sangat berguna karena setelah mendapat pelatihan itu saya jadi punya usaha sendiri sekarang, nambah ekonomi keluarga ya untuk bantu-bantu”(Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Gambar 4.4 memperlihatkan kegiatan pelatihan pembuatan kue yang diikuti oleh ibu-ibu warga dampingan.



Gambar 4.4 Kegiatan pelatihan pembuatan makanan ringan

Sumber : dokumen proyek ADP Cilincing

b.3. Pembentukan kelompok usaha dan pelatihan pengembangan usaha

Mereka yang mengikuti kelas-kelas pelatihan saat itu kemudian dikelompokkan dan umumnya didasarkan atas lokasi tempat tinggal yang berdekatan. Jumlah anggota masing-masing kelompok bervariasi, ada yang hanya berempat dan ada juga yang sampai bersepuluh. Ada di antara mereka yang sebelum mengikuti pelatihan memang sudah menjalankan usaha pembuatan makanan ringan, sehingga kesempatan yang diberikan oleh ADP ini coba dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya dan ada juga yang memang baru memulai.

“ kalau gak salah waktu itu yang ikut pelatihan ada 10 orang..abis pelatihan, kita gabung aja berkelompok yang deketan rumah..” (Ros, anggota kelompok usaha, 2 Juni 2012)

Warga sendiri yang menetapkan jadwal mereka berkumpul. Biasanya ibu-ibu tersebut berkumpul setelah mereka menyelesaikan urusan rumah-tangganya. Tidak setiap hari mereka berkumpul karena sangat tergantung pada banyak tidaknya pesanan produk yang diterima. Seperti pada kelompok rengginang, mereka berkumpul setiap empat hari sekali dan membuat rengginang dalam jumlah yang cukup banyak sepanjang satu hari tersebut, yang selanjutnya rengginang tersebut dititipkan di warung-warung sekitar.

“ kita bikin peyek tidak setiap hari, biasanya 4 hari sekali dan langsung banyak terus dititip di warung-warung, “ (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Sekalipun demikian, ada juga yang tiap hari memproduksi seperti kelompok bakso, karena bakso-bakso tersebut sebagian langsung dijual ke pasar dan sebagian lagi telah dipesan oleh pedagang bakso keliling yang setiap pagi langsung mengambil ke kelompok bakso.

“ masing-masing kelompok berbeda pola kerjanya, ada yang produksi rutin setiap hari seperti di kelompok bakso ikan, ada juga yang bersifat menerima pesanan sehingga tidak produksi setiap hari..” (Sur, staf lapangan ADP, 15 Mei 2012)

Untuk kebutuhan bahan baku bagi produksi kelompok, ADP hanya menyediakan sekali saja di awal pembentukan kelompok sebagai stimulan bagi kelompok untuk memulai usahanya. Sementara kebutuhan peralatan kerja diupayakan sendiri oleh anggota kelompok. Oleh karena itu pengadaan bahan baku berikutnya berasal dari hasil penjualan produksi yang apabila masih dirasa kurang, maka anggota kelompok akan menyumbangkan dananya pribadi untuk mencukupi kebutuhan pembelian bahan baku. Sistem ini memang beresiko karena bila hasil penjualan tidak seperti diharapkan dan kebetulan anggota kelompok sedang tidak mempunyai uang, maka menyebabkan kegiatan produksi terhenti karena tidak ada uang untuk membeli bahan baku. Untuk itu pada barang produksi pesanan, biasanya kelompok akan meminta uang muka yang cukup untuk kebutuhan bahan bakunya. Tetapi pada waktu menjelang lebaran di mana permintaan akan produk makanan ringan cukup tinggi, maka ada juga kelompok yang berani mengambil resiko untuk meminjam uang dari koperasi.

“ untuk beli bahan bakunya, kita urunan dari anggota dan kadang-kadang coba minjam uang kalau tidak cukup,” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha)

Untuk itu ADP juga membekali anggota kelompok dengan pelatihan bagaimana mengelola keuangan usaha, dimana mereka diajar tentang bagaimana menghitung besarnya biaya produksi yang diperlukan, berapa banyak jumlah produksi yang bisa dihasilkan dan menetapkan harga jual yang memadai agar bisa memberikan keuntungan. Selain itu diberikan juga pelatihan tentang analisa kelayakan usaha sehingga sebelum warga dampingan memulai suatu usaha, mereka sudah bisa melakukan perhitungan sederhana untuk melihat bagaimana peluang dan potensi usaha yang mau dimulai tersebut. Di samping itu untuk membuat produk makanan tersebut bisa lebih diterima oleh masyarakat, maka tim ADP juga menyertakan kelompok usaha makanan untuk mengikuti proses sertifikasi halal bagi produk makanan yang difasilitasi oleh Suku Dinas Koperasi dan UMKM maupun untuk mendapatkan ijin industri rumah tangga. Namun sayangnya sejauh ini sertifikasi halal maupun ijin industri rumah tangga belum dimiliki oleh produk-produk makanan kelompok usaha dampingan ADP karena skala produksi yang masih kecil.

“ kelompok usaha dampingan coba didukung oleh ADP melalui aneka pelatihan mulai dari kelayakan usaha, keterampilan produksi, pengelolaan keuangan usaha,” (Sur, staf lapangan ADP, 15 Mei 2012).

Tidak seperti kelompok kader yang memiliki jumlah anggota lebih banyak sehingga memiliki mekanisme pertemuan rutin sebagai media pendampingan oleh staf ADP, maka untuk kelompok usaha tersebut pendampingan dilakukan tidak melalui pertemuan rutin tetapi kunjungan lapangan ke masing-masing kelompok usaha tersebut. Dalam kunjungan tersebut staf akan menanyakan bagaimana perkembangan dari usaha yang sedang dibangun serta kesulitan-kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh kelompok. Umumnya kesulitan yang dihadapi oleh kelompok usaha adalah keterbatasan modal kerja, sehingga sulit bagi kelompok untuk memperbesar produksinya. Selain itu ditemukan juga permasalahan terkait pembagian hasil usaha kelompok yang dirasakan kurang adil oleh anggota yang lain. Ada anggota yang merasa lebih banyak berperan sementara tidak mendapatkan bagi hasil yang memadai. Ada juga tuduhan terhadap ketua

kelompok usaha yang dianggap kurang transparan menyampaikan hasil penjualan produk selama ini. Sebagai akibatnya anggota kelompok yang merasa kecewa akhirnya mengundurkan diri dari kelompoknya atau memisahkan diri membentuk kelompok baru. Ada juga yang menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku jenis ikan tertentu seperti pada kelompok bakso. Hal ini menyebabkan ada penyesuaian terhadap bahan baku bakso selama periode sulit untuk mendapatkan bahan ikan tersebut. Perubahan bahan baku ini ternyata turut mempengaruhi cita rasa bakso tersebut sehingga mendapatkan keluhan dari pelanggan. Di samping itu juga adanya kesulitan terkait dengan peralatan kerja yang dianggap kurang memadai.

“ untuk kelompok usaha biasanya kita melakukan kunjungan ke tempat warga untuk melihat progress dari usaha mereka, apa yang ADP bisa bantu kalau mereka ada kesulitan..” (Bag, staf lapangan ADP, 14 Mei 2012)

Untuk menghadapi kesulitan kelompok usaha terkait dengan permodalan, maka ADP mencoba menghubungkan kelompok usaha dengan lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Cilincing. Salah-satunya adalah dengan PT Vision Fund serta memperkenalkan kelompok usaha dengan sistem simpan pinjam sebagaimana akan dijelaskan pada bagian di bawah. Adanya keluhan tentang kurang transparannya bagi hasil dalam kelompok, coba difasilitasi oleh tim ADP dengan mengundang seluruh anggota kelompok mendiskusikan hal tersebut bersama-sama untuk mendapatkan kejelasan tentang situasi yang sedang terjadi dan menyusun sistem pelaporan hasil usaha kelompok yang lebih transparan. Penyampaian informasi kepada konsumen tentang sulitnya mendapatkan bahan baku bakso dan akibatnya dilakukan penyesuaian pada komposisi bahan baku harus disampaikan secara terbuka kepada konsumen sebelum konsumen mengajukan keluhan. Hal ini untuk menjaga kepercayaan dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh kelompok bakso tersebut. Sementara konsekwensi di mana konsumen akhirnya tidak jadi memakai bakso produksi kelompok menjadi resiko usaha yang harus diperhitungkan oleh kelompok. Adanya kesulitan terkait dengan peralatan kerja yang memadai, coba difasilitasi oleh ADP dengan

membelikan terlebih dahulu peralatan yang diperlukan tersebut dan kemudian dipinjamkan kepada kelompok. Selanjutnya kelompok akan mengalokasikan sebagian dari hasil penjualan untuk mencicil pembayaran peralatan tersebut kepada ADP sehingga akhirnya peralatan tersebut menjadi milik kelompok. Oleh karena itu hal-hal terkait dengan pengelolaan asset kelompok untuk produksi, staf ADP memfasilitasi dibuatnya kesepakatan tertulis dalam kelompok tentang pemakaian, perawatan dan penyimpanan asset kelompok tersebut.

“kita buat kesepakatan di kelompok bagaimana alat-alat kerja tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk usaha,” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Kunjungan pada kelompok usaha juga dilakukan setelah anggota kelompok usaha mengikuti kegiatan pelatihan untuk melihat bagaimana kelompok mempraktekkan pengetahuan dan informasi yang baru diperolehnya dari pelatihan tersebut. Hal-hal teknis yang kurang dipahami saat mengikuti pelatihan, kemudian dapat ditanyakan kepada staf lapangan yang datang berkunjung. Lewat kunjungan ini juga staf lapangan menyampaikan informasi tentang adanya kegiatan-kegiatan pameran yang bisa diikuti oleh kelompok usaha untuk memperluas pemasaran dari produk-produknya.

b.4. Akses kepada pinjaman modal

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, salah satu kesulitan yang dihadapi kelompok usaha adalah tidak memiliki modal usaha yang memadai untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Umumnya mereka bermodalkan semangat yang tinggi untuk memulai usaha serta pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pelatihan produksi. Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas warga dampingan ADP yang berminat untuk memulai usaha ini adalah keluarga dengan penghasilan yang rendah atau sekedar pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga bayangan untuk bisa memulai usaha kecil seringkali tidak pernah muncul sebelumnya dalam pemikiran mereka. Adanya kesempatan yang diberikan oleh ADP ini coba dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya oleh warga dampingan dan untuk menolong kelompok usaha ini memiliki akses kepada bantuan permodalan, maka tim ADP bekerjasama dengan PT. Vision Fund (sebelumnya bernama Yayasan Mitra Masyarakat Sejahtera) yang menyediakan pinjaman modal dengan suku-bunga rendah khususnya bagi usaha yang dikelola oleh orangtua wakil anak.

“ ya kita diinformasikan juga sama staf tentang adanya pinjaman untuk modal usaha lewat Vision Fund..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 6 Nov 2012)

Pinjaman modal kerja dari Vision Fund tersebut mulai dari Rp 250,000 sampai dengan Rp 2,000,000 dan pengembalian pinjaman dapat dicicil dalam waktu 6 – 12 bulan. Syarat yang ditetapkan oleh Vision Fund bagi kelompok yang ingin mengakses pinjaman modal tersebut adalah minimal usaha mereka sudah berjalan selama enam bulan dan sistem pertanggungjawaban pinjaman itu memakai model tanggung renteng sehingga pendekatannya adalah dalam kelompok. Misalnya A sebagai anggota kelompok bakso ikan ingin meminjam uang untuk modal kerja, maka B sebagai sesama anggota kelompok bakso ikan juga turut bertanggungjawab atas pinjaman yang dilakukan oleh A. Dalam hal ini B menjamin A untuk layak menerima pinjaman dan seandainya dalam proses pengembalian pinjaman, si A menghadapi kesulitan untuk membayar atau bahkan melarikan diri untuk tidak membayar pinjaman tersebut, maka B yang akan diminta oleh Vision Fund turut membayar pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh A. Dengan cara ini maka mau tidak mau antar anggota kelompok harus terbangun rasa saling percaya satu sama lain dan akan berusaha saling menolong untuk memastikan rekan satu kelompoknya bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Selain itu tim ADP juga sejak setahun terakhir ini memfasilitasi kegiatan simpan pinjam yang disebut ASCA (*accumulation saving and credit association*) Lewat ASCA ini anggota kelompok usaha bertemu secara berkala, biasanya setiap 2 minggu sekali, dan menyetorkan iuran rutin sebesar Rp 10,000 per orang yang bisa menjadi simpanan sekaligus pinjaman bagi anggota lain yang memerlukan.

“ namanya ASCA (*accumulation saving and credit association*), warganya dikumpulin, juga dari kelompok usaha yang sudah jalan, modelnya simpan-pinjam gitu, anggotanya kasih iuran 10,000-an terus dari uang tersebut bisa dipinjam juga balik kalau ada yg perlu buat modal usaha gitu,” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 6 November 2012)

Peraturan yang berlaku di kelompok simpan-pinjam ini disepakati oleh anggota kelompok seperti besarnya iuran, maksimal jumlah pinjaman, pemanfaatan dari pinjaman, besarnya bunga yang dikenakan dan cicilan minimal. Selain itu untuk membangun kedisiplinan anggota mengikuti pertemuan ini, ditetapkan juga oleh kelompok adanya denda sejumlah Rp 1,000 untuk setiap kali tidak hadir atau terlambat datang ke pertemuan. Ada juga iuran dana sosial sebesar Rp 2,000 per orang setiap kali kumpul. Uang ini digunakan untuk menolong anggota kelompok yang sedang dalam kemalangan seperti ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal. Dana yang terkumpul disimpan dalam box penyimpanan uang seperti brankas kecil yang memiliki tiga kunci yang masing-masing dipegang oleh ketua, sekretaris dan bendahara. Sehingga pengambilan uang dari dalam box harus sepengetahuan ketiga pengurus ASCA tersebut dan box hanya dibuka saat pertemuan kelompok. Jumlah maksimal pinjaman yang diijinkan diberikan kepada anggota adalah maksimal sebesar tiga kali besarnya jumlah iuran rutin yang telah ditabung anggota tersebut yang dicatat dalam buku tabungan. Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak dari anggota untuk bisa meminjam di luar jadwal pertemuan yang telah disepakati, maka anggota harus menemui ketiga pengurus ASCA yakni ketua, sekretaris dan bendahara untuk mengajukan permohonan peminjamannya dan bila disetujui pengurus tersebut maka uang akan diambil dari dalam box yang disimpan di rumah bendahara. Untuk mengambil uang tersebut dari box juga harus disaksikan oleh ketiga pengurus, dan sekretaris akan mencatat pinjaman anggota tersebut dalam buku tabungannya.

Biasanya tata-tertib yang berlangsung dalam pertemuan ASCA adalah ketua membuka pertemuan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Seluruh

anggota telah mengambil tempat duduk melingkar sesuai dengan nomer urut dalam daftar buku tabungan kelompok dengan ketua, sekretaris dan bendahara duduk bersisian di salah satu bagian lingkaran. Selanjutnya ketua akan membacakan jumlah saldo yang ada di dalam box berdasarkan pencatatan pertemuan terakhir dan box dibuka dan uang yang tersimpan di dalamnya di hitung oleh sekretaris dan diperlihatkan kepada seluruh anggota. Buku tabungan kemudian diedarkan kepada seluruh anggota dan anggota mempersiapkan uang iuran wajib beserta iuran dana sosial yang akan disetor kepada bendahara. Selanjutnya oleh ketua satu persatu anggota dipanggil namanya dan mereka yang dipanggil namanya akan menyetorkan iuran wajib minimal senilai Rp 10,000 dan maksimal senilai Rp 50,000. Jumlah uang yang disetor akan dicatat dalam buku tabungan dan buku besar. Demikian juga iuran dana sosial sebesar Rp 2,000 disetorkan dalam mangkok yang diedarkan kepada seluruh anggota. Bila ada anggota yang dalam pertemuan sebelumnya berhalangan hadir, maka dia diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1,000 untuk ketidakhadirannya, demikian juga bila yang bersangkutan terlambat hadir dalam pertemuan. Uang denda ini dimasukkan ke dalam mangkuk yang berbeda dengan mangkuk untuk iuran sosial. Setelah seluruh anggota menyetor iuran wajib sebagai tabungan, demikian juga iuran sosial dan denda, kemudian bendahara akan menghitung total iuran wajib, iuran sosial dan denda yang terkumpul dan jumlahnya disampaikan kepada kelompok. Setelah itu ketua akan menanyakan siapa di antara anggota yang akan membayarkan cicilan pinjaman dan siapa anggota yang akan mengambil pinjaman baru. Anggota yang sedang dalam posisi meminjam tidak diperkenankan untuk mengambil pinjaman baru sebelum menyelesaikan pinjaman yang telah diambalnya. Setelah itu juga ketua akan menanyakan apakah ada anggota yang memerlukan dana sosial. Bila ada dan disetujui oleh seluruh anggota, maka dana sosial yang terkumpul tadi akan diberikan seluruhnya kepada anggota yang memerlukan dana sosial tersebut. Untuk dana sosial yang diberikan tersebut, tidak ada kewajiban bagi anggota yang menerimanya untuk mengembalikan, karena memang dana tersebut merupakan dukungan dari kelompok untuk menolong anggota yang sedang kesulitan. Akhirnya ketua kembali membacakan saldo dan pinjaman dari masing-masing anggota dan uang

tersebut disimpan dalam box untuk selanjutnya dikunci. Mekanisme dalam kelompok ASCA ini memang sangat menekankan transparansi sehingga seluruh anggota mengetahui posisi keuangan yang terkumpul, demikian juga seandainya bila ada anggota yang meminjam karena kebutuhan mendesak di luar jadwal pertemuan akan diumumkan kepada seluruh anggota. Demikian juga tata-tertibnya mendorong seluruh anggota untuk disiplin.

“ kalau yang di ASCA ini memang peraturannya disepakati oleh sesama anggota kelompok, ada pengurusnya juga seperti koperasi, ada aturannya juga untuk membuat kita disiplin hadir dengan denda kalau telat atau tidak datang ..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 6 November 2012)



Gambar 4.5 Kegiatan Simpan Pinjam ASCA

Sumber : dokumen penelitian

Gambar 4.5 adalah kegiatan simpan-pinjam ASCA salah satu kelompok dampingan ADP yang kebanyakan dihadiri oleh para ibu.

b.5. Pendampingan pemasaran produk usaha kelompok

Untuk membuat produk kelompok usaha tersebut lebih dikenal oleh warga masyarakat maka biasanya dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat ADP yang

melibatkan masyarakat luas seperti peringatan Hari Anak Nasional atau kampanye kesehatan Pekan ASI, disiapkan satu stand dimana produk kelompok usaha dampingan ADP dipamerkan di sana. Anggota kelompok usaha sendiri juga terlibat secara aktif mencari informasi bila ada pameran produk UMKM yang dilakukan oleh di wilayah dampingan atau di sekitar Jakarta Utara. Biasanya kantor walikota atau kantor kecamatan setiap setahun sekali menyelenggarakan bazaar dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI sehingga produk-produk kelompok usaha bisa dipamerkan pada event tersebut.

“ada yg tugasnya juga mencari tahu kapan ada bazaar atau pameran sehingga bisa menitipkan produk di sana,” (Ros, anggota kelompok usaha, 2 Juni 2012)

Selain lewat pameran, produk-produk dari kelompok usaha dampingan ADP juga dipasarkan lewat pertemuan arisan PKK atau majelis taklim khususnya untuk produk asesoris, sementara untuk produk makanan ringan, umumnya dipasarkan di warung-warung dan pasar yang ada di wilayah dampingan. Gambar 4.6 menunjukkan beberapa kegiatan pameran yang diikuti oleh kelompok usaha.



Gambar 4.6 Kegiatan Pameran Produk Kelompok Usaha Dampingan ADP

Sumber : dokumen proyek ADP Cilincing

Dari tahun 2010, seiring dengan perjalanan waktu, maka kelompok usaha dampingan ADP ada yang terus bertahan dan ada yang akhirnya kandas. Tantangan utama yang dihadapi adalah tidak tersedianya modal yang cukup untuk

mengembangkan usaha sekalipun ADP sudah mencoba memfasilitasi dengan membuka akses kelompok kepada lembaga mikro seperti Vision Fund. Ada yang beralasan syarat bahwa usaha sudah berjalan selama lebih dari enam bulan, menyulitkan bagi mereka yang baru memulai usaha untuk mendapatkan pinjaman. Ada juga yang keberatan dengan sistem tanggung renteng yang diberlakukan oleh Vision Fund.

Disamping itu juga, rupanya mengelola usaha kecil bukanlah hal yang mudah bagi warga dampungan. Perlu terus menerus menjaga kualitas produk sehingga dapat memenuhi standar kualitas barang yang diharapkan konsumen. Pada saat yang sama hasil penjualan tidak serta merta memberikan margin keuntungan yang besar oleh karena barang tidak habis terjual atau tidak ada pesanan barang dalam jumlah besar serta modal sudah semakin menipis. Kondisi ini menyebabkan ada di antara kelompok usaha yang menjadi patah semangat karena harapan untuk usahanya berkembang dan memberikan keuntungan besar tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

“..kalo yang usaha sih emang suka terbentur ama modal, terus pingin segera kelihatan hasilnya..usahanya berkembang, begitu mentok..terus jadi malas buat nerusin...” (Har, kader kesehatan, 24 Mei 2012)

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tim ADP kepada kelompok pengembangan ekonomi nampaknya memberikan penguatan pada potensi dan kapasitas warga yang tertarik untuk melakukan usaha. Seperti kelompok usaha rengginang di Rw 10 yang dirintis sejak tahun 2010, sampai sekarang masih terus berjalan. Sekalipun demikian melihat perkembangan dari kondisi kelompok usaha tersebut yang sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan jumlah produksi yang lebih besar dan pasar dari produk yang lebih luas, menunjukkan bahwa kelompok pengembangan ekonomi memerlukan pendampingan yang lebih intens dari tim ADP untuk memastikan keberlanjutan dari kelompok usaha tersebut.

4.1.1.7 Evaluasi kegiatan program / proyek

Secara berkala ADP juga melakukan evaluasi atas pencapaian yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan melakukan evaluasi terhadap program, maka bisa dilihat sejauh mana perubahan terjadi pada warga dampingan yang telah diintervensi oleh kegiatan pemberdayaan ADP. Mekanisme evaluasi yang berlangsung di ADP Cilincing itu dilaksanakan pada tiap akhir semester maupun ketika suatu periode desain program tiga tahunan akan berakhir.

Setiap akhir semester pertama pada bulan Maret, sebagai bagian dari pembuatan laporan pertengahan tahun program dan proyek, maka ada dua mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh tim ADP. Pertama adalah evaluasi atas pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dengan mengundang pihak kelurahan, puskesmas, komite proyek, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kader PKK dan juga perwakilan dari warga dampingan. Dalam pertemuan ini partisipan akan dikelompokkan sesuai dengan proyek yang dilaksanakan di ADP sehingga ada kelompok yang membahas kegiatan kesehatan ibu dan anak, kelompok yang membahas kegiatan HIV&AIDS, kelompok yang membahas kegiatan pengembangan ekonomi dan kelompok yang membahas kegiatan sponsorship. Di masing-masing kelompok tersebut, staf ADP yang memfasilitasi diskusi kelompok akan memaparkan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung sepanjang satu semester. Hasil pencapaian tersebut kemudian dianalisa bersama-sama dengan peserta untuk mengidentifikasi hal-hal yang positif maupun negative dari pelaksanaan dan pencapaian kegiatan tersebut. Dari masing-masing hal positif dan negative tersebut diambil pembelajarannya, seperti yang sudah berjalan dengan baik, diidentifikasi apa penyebabnya demikian juga untuk hal-hal yang belum berjalan dengan baik, diidentifikasi juga apa yang menjadi penyebabnya. Setelah pembelajaran diperoleh, maka langkah berikutnya adalah partisipan memberikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh ADP untuk pelaksanaan kegiatan di semester berikutnya. Selain itu dianalisa juga bagaimana kemitraan yang telah terbangun antara tim ADP dengan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha yang terlibat dalam setiap

pelaksanaan kegiatan di semester sebelumnya. Selanjutnya partisipan akan memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

Hasil dari pertemuan evaluasi bersama masyarakat tersebut kemudian dibawa dalam pertemuan evaluasi internal ADP. Dari pencapaian kegiatan semester satu, masing-masing staf diminta untuk mengidentifikasi faktor dari dalam organisasi yang berkontribusi terhadap hal-hal yang sudah berjalan dengan baik maupun hal-hal yang membutuhkan perbaikan dalam implementasi kegiatan. Hasil refleksi staf tersebut kemudian disinergikan dengan catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh warga masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hasilnya kemudian menjadi masukan untuk menyusun penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan pada kegiatan-kegiatan ADP di semester kedua, baik itu penyesuaian target, strategi implementasinya maupun kemitraan dengan pihak lainnya. Hal ini dilakukan agar kegiatan di semester kedua dapat memberikan manfaat yang lebih optimal kepada warga dampingan

“kita juga evaluasi karena laporannya wvi itu kan bukan cuma menyampaikan pencapaian yang dianggap baik oleh organisasi tapi juga dianggap baik yang dikonfirmasi di masyarakat, itu biasanya dilakukan tiap 1 semester sama-sama masyarakat juga kasih input..” (Yac, program manager ADP, 13 Mei 2012)

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh ibu Rn yang menyebutkan bahwa warga dampingan turut dilibatkan dalam mengevaluasi pencapaian program.

“biasanya dari semua kelurahan diundang, kita mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan dibagi per sektor, disitu kita mendapatkan pembelajaran dari kegiatan yang sudah terlaksana, sudah berjalan sesuai rencanakah, kalau belum apa yang mau diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya,” (Rn, kader pendamping anak, 1 Juni 2012)

Di akhir tahun fiskal di sekitar bulan September, kembali tim ADP melakukan pertemuan dengan warga dan stakeholder untuk melakukan evaluasi

atas pencapaian sepanjang tahun fiskal yang akan selesai. Proses yang sama seperti evaluasi di semester pertama kembali dilakukan di sini. Dalam pertemuan ini staf ADP juga menyampaikan informasi tentang rencana kegiatan sepanjang tahun fiskal berikutnya.

“ ..kemudian kita kumpul lagi bareng staf pas akhir tahun untuk sama-sama lihat lagi apa yang sudah dicapai ... mana yang berjalan baik mana yang tidak dan apa yang mau dikerjakan di masing-masing sektor untuk tahun berikutnya dari pencapaian tersebut”(Rn, kader pendamping anak, 1 Juni 2012)

Demikian juga saat tahapan pengembangan program tersebut akan berakhir maka dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program untuk melihat perubahan yang terjadi pada warga dampingan sepanjang periode program tiga tahunan tersebut. Evaluasi kuantitatif dan kualitatif dilakukan oleh pihak eksternal WVI, dimana biasanya dengan menggandeng pihak universitas. Temuan hasil evaluasi kemudian kembali disampaikan kepada para stakeholder dan warga dampingan sehingga mereka memahami perubahan-perubahan apa saja yang telah berlangsung di masyarakat dampingan. Berdasarkan hasil evaluasi dan merujuk kepada perubahan-perubahan yang terjadi tersebut maka kembali lagi tim ADP melakukan perencanaan ulang (re-design) dari program untuk periode tahapan berikutnya. Proses ini memakan waktu cukup panjang, mulai dari proses evaluasi sampai dengan penyusunan dokumen desain program yang baru untuk periode tiga tahun berikutnya yakni memakan waktu hampir enam bulan. Karena selain menyusun dokumen desain program, tim ADP juga menyusun rencana operasional tahunan untuk tahun pertama dari periode tiga tahun desain program tersebut.

“ ada evaluasi dengan pihak konsultan di akhir satu periode untuk melihat progress yang terjadi di masyarakat akibat program kemudian hasil evaluasi didiskusikan lagi dengan warga dan pemerintah untuk menyusun project design berikutnya..” (Hdr, staf monev, 15 Mei 2012)

Tabel 4.1 merupakan rangkuman yang menunjukkan tahapan dan dinamika dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim ADP dalam melaksanakan program pemberdayaannya di kelurahan Cilincing sebagaimana hasil temuan di lapangan.

Tabel 4.1 Tahapan dan Dinamika dalam Kegiatan Program Pemberdayaan ADP

Tahap	Dinamika dalam Kegiatan
Penyampaian informasi program	Diawali dengan proses mendapatkan ijin operasional bagi program ADP dari pihak kantor walikota, kecamatan dan kelurahan. Adanya program <i>North Jakarta Transition Activity Program (NJTAP)</i> dari World Vision yang sedang berjalan di Cilincing mempermudah Wahana Visi dalam mendapatkan ijin operasional tersebut. Tim ADP selanjutnya menemui para ketua Rw dan Rt untuk memintakan kesediaan mereka mempertemukan tim ADP dengan warga dan tokoh masyarakat serta agama di wilayah dampingan. Selain ketua Rt dan Rw, kader PKK juga dilibatkan tim ADP untuk memobilisasi warga datang dalam pertemuan memperkenalkan Wahana Visi Indonesia dan program ADP. Kader PKK ini sebelumnya juga sudah banyak yang terlibat dalam program NJTAP sehingga mereka bersedia terlibat aktif menolong proses penyampaian informasi ini. Warga di Cilincing menyambut baik program ADP namun karena adanya isu kristenisasi akibat adanya kegiatan belajar anak dengan unsur keagamaan yang dilakukan oleh lembaga lain yang disangka warga dilakukan oleh tim ADP maka warga sempat menolak terlibat dalam program ADP khususnya tidak mengizinkan anak mereka menjadi anak dampingan ADP. Tim ADP berupaya mengklarifikasi isu tersebut dengan menemui tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dan akhirnya program ADP dapat terus dilangsungkan dan diterima secara luas oleh warga dampingan. Selain penyampaian informasi tentang program di masa awal implementasi program, tim ADP juga memfasilitasi penyampaian informasi tentang pencapaian implementasi program di lapangan maupun bila ada aktivitas proyek yang baru

	di wilayah dampingan.
Pembentukan Komite Proyek	<p>Tim ADP memfasilitasi pembentukan komite proyek yang anggotanya adalah perwakilan warga dari tiap Rw yang disepakati oleh warga sendiri. Kriteria yang ditetapkan bagi warga yang duduk di komite proyek adalah mereka yang memiliki waktu untuk terlibat aktif dan terpenggil untuk melakukan upaya perubahan terhadap kondisi warga yang kurang beruntung di wilayah dampingan. Mereka yang duduk sebagai pengurus komite proyek ini berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat setempat, anggota masyarakat biasa, kader PKK ataupun salah satu dari ketua Rt / Rw dengan masa kepengurusan tiga tahun untuk satu periode. Komite proyek berperan sebagai mitra ADP dalam mengelola kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang diusulkan oleh warga dampingan. Untuk memperkuat kapasitas komite proyek maka tim ADP memfasilitasi rangkaian pelatihan seperti latihan kepemimpinan, tata kelola kelompok swadaya masyarakat dan manajemen proyek. Komite proyek antusias dalam menjalankan perannya mengelola kegiatan usulan warga namun dalam perjalanan waktu tidak semua pengurus terus konsisten menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Ada yang mengundurkan diri karena kesibukan pekerjaan maupun mundur karena merasa terlibat dalam komite proyek tidak memberikan manfaat materi. Keberhasilan komite proyek dalam membangun gedung pertemuan Srikandi secara swadaya menjadi kantor sekretariat bagi komite proyek sekaligus pusat kegiatan masyarakat merupakan salah satu pencapaian besar dari komite proyek. Dalam perjalanan waktu, nama komite proyek selanjutnya berubah menjadi Program Masyarakat Cilincing (PMC) sejak 2009.</p>
Survei kondisi awal (Baseline Survey)	<p>Survei kondisi awal masyarakat dampingan pada tahun 2002 menjadi kegiatan pertama yang dikelola oleh komite proyek untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat di kelurahan Cilincing dalam hal pendidikan dan kesehatan anak serta kondisi ekonomi warga kurang mampu yang menjadi sasaran utama</p>

	<p>pendampingan ADP. Dari tahap persiapan kuesioner survey, pengambilan data di lapangan, sampai dengan penyelenggaraan lokakarya hasil survey dilaksanakan oleh komite proyek yang bertanggungjawab sebagai koordinator lapangan dengan dukungan teknis staf kantor pusat WVI serta tim ADP. Keterlibatan komite proyek sangat menolong dalam proses pengambilan data baseline di lapangan yang berlangsung dengan lancar karena sebelumnya masyarakat sudah dipersiapkan lewat informasi tentang penyelenggaraan survey ini dari komite proyek.</p>
<p>Pengkajian masalah dan potensi sumberdaya masyarakat</p>	<p>Hasil survey kondisi awal didalami lebih lanjut bersama warga dampingan melalui pertemuan PLA di setiap Rw yang melibatkan tidak saja orang dewasa melainkan juga anak-anak. Dilibatkannya anak-anak dalam proses kajian ini agar permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa dilihat dari sudut pandang kebutuhan anak sehingga dalam merumuskan intervensi atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Di samping itu potensi sumberdaya yang ada di masyarakat sasaran digali dalam proses kajian ini seperti keberadaan kader PKK sebagai agen perubahan masyarakat, adanya tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap kondisi warga kurang mampu maupun adanya program bantuan sosial dari pemerintah serta lembaga lainnya yang bisa dioptimalkan dampaknya bagi kepentingan warga dampingan. Diskusi mendalam atas permasalahan dan potensi sumberdaya difasilitasi oleh para fasilitator PLA yang juga adalah warga dampingan sendiri yang sebelumnya telah dilatih oleh tim ADP untuk keperluan ini. Warga dampingan mengikuti proses kajian ini dengan antusias karena berkesempatan untuk menyatakan permasalahan yang mereka rasakan sehari-hari yang mana mereka harapkan dapat terjadi perubahan lewat intervensi ADP.</p>
<p>Perencanaan kegiatan intervensi ADP</p>	<p>Perwakilan stakeholder kecamatan, kelurahan, puskesmas dan komite proyek diundang tim ADP dalam pertemuan Ciloto tahun 2003 untuk membahas hasil temuan baseline survey serta PLA dalam tiga kelompok ekonomi, pendidikan dan kesehatan.</p>

	<p>Diskusi kelompok membahas akar penyebab permasalahan maupun tujuan dari intervensi ADP menggunakan metode analisa pohon masalah dan pohon tujuan berlangsung cukup panjang dan alot dimana masing-masing partisipan di tiap kelompok rupanya memiliki ekspektasi atas intervensi yang akan dilakukan ADP. Akhirnya disepakati bahwa kapasitas organisasi serta tujuan program ADP untuk kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam perumusan intervensi ADP. Pertemuan ini sempat terganggu karena adanya perwakilan kecamatan yang meninggalkan pertemuan karena menuntut penggantian uang jasa atas kehadirannya dalam pertemuan tersebut sebagaimana yang biasanya dia peroleh saat mengikuti pertemuan sejenis dengan lembaga lain. Hal ini menjadi pembelajaran bagi tim ADP untuk memberikan penegasan kepada warga dampingan atau para pemangku kepentingan yang diundang dalam pertemuan ADP tentang tidak adanya imbalan yang disediakan organisasi untuk keterlibatan dalam kegiatan ADP.</p> <p>Berdasarkan analisa pohon tujuan maka disusun kerangka kerja logis (<i>logical framework – logframe</i>) dari program ADP beserta proyek kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi yang ada di dalamnya yang menjadi acuan implementasi program untuk periode tahun 2004 – 2006. Proses penyusunan rencana program mulai dari analisa pohon masalah, pohon tujuan dan penetapan <i>logframe</i> ini menjadi kesempatan belajar juga bagi staf ADP untuk membangun kapasitasnya demikian juga bagi warga dampingan yang terlibat dalam proses ini.</p> <p>Dalam <i>logframe</i> tercantum tujuan program yang pencapaiannya dihasilkan dari <i>outcome</i> dan <i>output</i> setiap proyek. Logframe ini menjadi inti dari rancangan kegiatan program tiga tahunan yang dituangkan dalam dokumen yang disebut <i>Program / Project Design Document (PPDD)</i> yang menjadi rujukan bagi rencana kegiatan tahunan ADP atau yang disebut dengan <i>Annual Operation Plan (AOP)</i>. AOP berisikan rincian rencana aktivitas yang akan dilakukan sepanjang tahun fiskal berikut target</p>
--	--

	<p>pencapaian dan anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut. Dalam penyusunan AOP tersebut, kembali tim ADP akan melibatkan komite proyek dan warga dampingan. Usulan-usulan kegiatan yang diajukan masyarakat sejauh sejalan dengan rancangan program tiga tahunan yang sedang berlangsung dimungkinkan untuk diakomodir dalam AOP. Keterkaitan antara desain program dengan AOP ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh warga dampingan maupun para pemangku kepentingan sehingga mereka mempertanyakan bila ada usulan kegiatan masyarakat ditolak oleh tim ADP. Karenanya dalam pertemuan penyusunan rencana kegiatan, hal ini selalu diingatkan oleh tim ADP kepada warga dampingan</p> <p>Setelah satu periode PPDD selesai, maka dirumuskan kembali desain program untuk periode tiga tahun berikutnya yang diikuti dengan penyusunan rencana kegiatan tahunan.</p>
Implementasi kegiatan program	<p>AOP menjadi rujukan tim ADP dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan pada kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi</p> <p>a. Kelompok dampingan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim ADP menjadikan kader PKK sebagai target dampingan proyek dan mitra utama kegiatan kesehatan dan pertimbangan utama dari keputusan ini adalah karena kader PKK merupakan bagian dari struktur kelembagaan lokal yang sudah ada di wilayah dampingan dan diharapkan akan meneruskan kegiatan proyek kesehatan yang dibangun pada masa implementasi ADP setelah program berakhir. Di setiap Rw paling tidak ada dua kelompok kader PKK yang bertugas sebagai kader posyandu yang berarti ada sejumlah 8-10 kader aktif di lapangan sebagai potensi agen-agen perubahan di masyarakat - Pertemuan rutin bulanan kader menjadi sarana komunikasi antara tim ADP dengan para kader dan pihak puskesmas

	<p>untuk diskusi persiapan kegiatan lapangan atau penyelesaian masalah yang muncul dalam kegiatan. Selain itu pertemuan dimanfaatkan untuk berbagi informasi tentang kondisi kesehatan ibu dan anak di wilayah dampingan, serta memberikan masukan bagi kegiatan kesehatan ADP. Melalui pertemuan rutin ini, tim ADP menjadi lebih mengenal situasi dan kondisi wilayah layanan serta permasalahan kesehatan ibu dan anak yang terjadi sehingga kegiatan kesehatan ADP dapat dimanfaatkan untuk merespon juga isu kesehatan ibu dan anak yang terjadi. Di sisi lain, para kader menjadi lebih saling mengenal sehingga lebih memperkuat kerjasama di antara mereka untuk menolong warga yang membutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak meratanya kemampuan dan kapasitas kader dalam menjalankan tugasnya selaku kader kesehatan masyarakat diperkuat oleh tim ADP dengan aneka pelatihan kesehatan seperti manajemen posyandu, konseling, tumbuh-kembang anak dan lain-lain. Kegiatan pelatihan ini difasilitasi tim ADP bekerjasama dengan puskesmas dan TP PKK - Para kader juga diperlengkapi dengan kemampuan untuk melakukan upaya advokasi di bidang kesehatan sejak 2011 untuk memampukan kader memfasilitasi pertemuan antara warga masyarakat dengan pihak pemerintah dalam menyampaikan informasi dan aspirasi tentang kondisi kesehatan ibu dan anak di wilayahnya. <p>b. Kelompok dampingan pengembangan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belajar dari pengalaman pendampingan pada waktu sebelumnya di mana produk kelompok usaha mikro kurang laku di pasaran maka tim ADP memfasilitasi survey pasar di tahun 2010 untuk melihat produk usaha kecil yang paling diminati warga di wilayah Cilincing. Adapun hasilnya adalah produk makanan ringan dan kerajinan tangan. Selain itu diidentifikasi juga lembaga-lembaga pelatihan keterampilan usaha makanan ringan dan kerajinan tangan yang bisa diajak kerjasama untuk
--	--

	<p>memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi warga dampingan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Warga dampingan yang umumnya adalah ibu-ibu, baik itu dari orangtua anak dampingan ADP bahkan juga para kader kesehatan menyambut kesempatan ini dengan antusias untuk mengikuti kelas-kelas pelatihan yang difasilitasi secara gratis oleh tim ADP. Warga yang berminat hanya perlu mengupayakan sendiri biaya transportasi untuk bisa mengikuti pelatihan tersebut yang umumnya berlangsung dalam delapan kali pertemuan.- Warga peserta pelatihan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha dan lokasi tempat tinggalnya serta memperoleh pelatihan lanjutan untuk mengembangkan usahanya. Di antara warga tersebut ada yang memang sudah menjalankan usaha di bidang makan ringan dan kerajinan tangan dan ada juga yang baru mau merintis usaha. Bagi mereka yang sudah menjalankan usaha maka motivasi utama mengikuti kegiatan ini adalah untuk mengembangkan usahanya sementara bagi mereka yang baru memulai lebih dilandasi motivasi untuk memperoleh penghasilan tambahan. Sebagai stimulan, tim ADP menyediakan bahan baku produksi sekali saja di awal kelompok memulai usaha dan berikutnya modal kerja dan bahan baku diupayakan sendiri oleh anggota kelompok usaha. Masing-masing kelompok mengatur sendiri pembagian peran dalam kelompoknya untuk menjalankan usaha tersebut. Pendampingan tim ADP dilakukan melalui kunjungan rutin ke masing-masing kelompok untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan dan umumnya permasalahan yang ditemukan adalah keterbatasan modal kerja sehingga sulit bagi kelompok untuk mengembangkan usahanya. Di samping itu ada juga permasalahan terkait kurangnya transparansi dalam pembagian hasil usaha maupun ketersediaan peralatan kerja yang memadai. Permasalahan transparansi tersebut difasilitasi tim ADP dengan pertemuan bersama seluruh
--	---

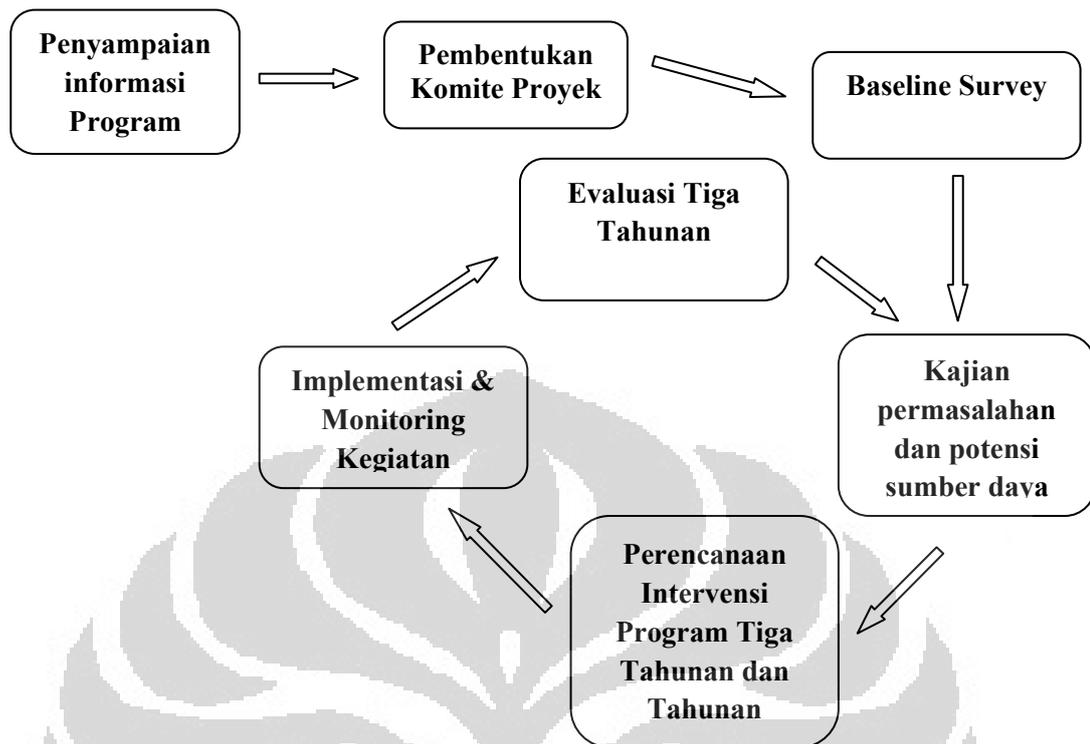
	<p>anggota kelompok untuk mendapatkan kejelasan tentang pengaturan pembagian hasil serta menyusun sistem laporan hasil usaha yang lebih transparan. Kebutuhan akan tersedianya peralatan kerja yang memadai coba difasilitasi tim ADP dengan terlebih dahulu pengadaannya dilakukan oleh ADP untuk selanjutnya kelompok akan mencicil biaya peralatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kebutuhan pengembangan usaha yang memerlukan tambahan modal, maka tim ADP bekerjasama dengan PT Vision Fund menyediakan pinjaman modal bagi kelompok usaha tersebut. Di samping itu, sejak tahun 2012, tim ADP memfasilitasi kegiatan simpan-pinjam bagi anggota kelompok usaha yang disebut ASCA - Dalam rangka mendukung upaya pemasaran produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha tersebut maka tim ADP memfasilitasi kelompok usaha untuk mengikuti kegiatan pameran UMKM yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya di wilayah dampingan dan sekitarnya. Selain itu dalam kegiatan besar yang melibatkan banyak warga seperti peringatan Hari Anak Nasional atau Pekan ASI yang diselenggarakan oleh ADP, biasanya disediakan satu stand untuk memamerkan produk kelompok usaha tersebut. Selain itu anggota kelompok usaha sendiri memasarkan produknya ke warung-warung sekitar maupun ditawarkan dalam pertemuan arisan PKK dan majelis taklim.
Evaluasi kegiatan proyek / program	<p>Ada dua mekanisme evaluasi yang dilakukan tim ADP yakni evaluasi pada desain program tiga tahunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kegiatan proyek tahunan yang dilakukan dua kali setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun dimana tim ADP mengundang perwakilan warga dari tiap kelurahan dampingan serta pihak kantor kelurahan / kecamatan serta puskesmas untuk membahas pencapaian yang telah dihasilkan

	<p>oleh proyek, apa yang telah berjalan baik dan apa yang mau diperbaiki pada pelaksanaan kegiatan di semester berikutnya.</p> <p>b. Evaluasi desain program tiga tahunan yang diadakan di akhir tahun dari periode desain program dilakukan evaluasi menyeluruh untuk melihat bagaimana perkembangan atau perubahan yang terjadi berdasarkan intervensi yang dilakukan oleh ADP. Hasil evaluasi disampaikan kembali kepada warga dan pemerintah setempat dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut disusun kembali desain program untuk tiga tahun berikutnya.</p>
--	---

Sumber : telah diolah kembali

Hasil temuan menunjukkan bahwa pada tahap inisiasi program, tim ADP memfasilitasi kegiatan sosialisasi program, pembentukan komite proyek, baseline survey sampai dengan penyusunan desain program tahun 2004 – 2006 serta rencana kegiatan operasional tahun 2004. Mulai tahun 2004 yang merupakan tahap pengembangan program, tim ADP melakukan implementasi program beserta monitoring dan evaluasi tahunan. Di akhir tahun 2006 kembali dilakukan evaluasi untuk melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2006. Hasil evaluasi kembali didalami dengan melakukan proses kajian masalah dan potensi sumberdaya yang dilanjutkan dengan menyusun desain program untuk tahun 2007 sampai dengan 2009. Desain program periode 2007 – 2009 tersebut menjadi rujukan bagi rencana operasional tahunan sepanjang tiga tahun tersebut. Demikian seterusnya sampai dengan tahun 2012. Sehingga tahapan-tahapan dalam program ADP tersebut menyerupai skema spiral yang akan berakhir di tahun 2015 dengan penutupan program.

Skema berikut menggambarkan tahapan-tahapan yang berlangsung dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh tim ADP Cilincing kepada warga dampingan.



Gambar 4.1 Skema Tahapan Program Pemberdayaan ADP Cilincing

Sumber : telah diolah kembali

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga

4.1.2.1 Faktor pendukung

Agar proses pemberdayaan dapat berkontribusi pada perubahan kondisi hidup warga serta memberikan daya kepada warga dampingan, maka keterlibatan aktif warga dalam proses pemberdayaan tersebut menjadi sangat penting. Adapun yang dimaksud dengan faktor pendukung di sini adalah hal-hal yang membuat warga dampingan bersedia untuk terlibat aktif dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh tim ADP sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

a. Keterlibatan warga dan para pemangku kepentingan dalam kegiatannya

Dalam seluruh kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di lapangan tim ADP selalu berupaya untuk melibatkan warga maupun para pemangku tkepentingan terkait seperti pihak kecamatan, kelurahan, ketua Rt, ketua Rw,

petugas puskesmas serta para kader dengan mengundang mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh ADP. Di saat awal Wahana Visi Indonesia masuk ke Cilincing dan memperkenalkan diri serta program ADP, tim ADP berupaya mengundang semua elemen masyarakat menghadiri pertemuan di Rw agar mereka semua memahami maksud dan tujuan ADP serta rencana kegiatan proyek-proyeknya. Pada saat pembentukan komite proyek, warga beserta ketua Rt dan Rw terlibat dalam menyepakati warga yang akan duduk mewakili tiap Rw dalam kepengurusan komite proyek. Selanjutnya dalam persiapan survey kondisi awal, kembali tim ADP bersama komite proyek menyampaikan informasi baseline kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan bagi terlaksananya baseline tersebut. Dalam proses penyusunan desain program, kembali lagi tim ADP melibatkan warga dan pemangku kepentingan untuk sama-sama menganalisa hasil kajian permasalahan dan potensi sumberdaya yang tersedia di lapangan dan selanjutnya merumuskan rencana intervensi program bersama-sama. Dalam berbagai tahapan lainnya seperti implementasi kegiatan di lapangan, ketua Rt dan Rw turut merekomendasikan nama-nama warga yang sebaiknya turut serta dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh ADP. Demikian juga dalam pelatihan-pelatihan kepada kader kesehatan, maka secara intensif tim ADP duduk bersama dengan staf puskesmas maupun staf suku dinas kesehatan dalam merancang program pelatihan maupun memfasilitasi pelatihan-pelatihannya. Dalam proses evaluasi program tahunan maupun desain program tiga tahunan, kembali lagi para pemangku kepentingan terkait beserta perwakilan warga dalam komite proyek turut diajak serta untuk bersama mengkritisi pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan dari kegiatan proyek. Jadi dalam hal ini memang upaya yang disengaja dari tim ADP untuk melibatkan warga masyarakat dan para pemangku kepentingan mendorong warga dampingan untuk bersedia ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP

“ kita selalu upayakan agar seluruh pemangku kepentingan terlibat ,” (Yac, program manager ADP, 13 Mei 2012)

b. Masukan dari warga diakomodir oleh ADP

Mulai dari proses identifikasi permasalahan sampai dengan evaluasi, tim ADP memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan-masukannya atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh ADP sehingga masukan tersebut turut mempengaruhi rencana intervensi kegiatan yang akan dilakukan oleh ADP Cilincing di wilayah dampingan.

“masukan masyarakat menjadi poin penting bagi Wahana Visi dalam seluruh tahapan kegiatan programnya ,”(Yac, program manager ADP, 13 Mei 2012)

Dalam proses assessment di mana dilakukan kajian atas permasalahan yang ditemukan lapangan, lewat PLA yang difasilitasi staf dan komite proyek, informasi tentang kondisi warga disampaikan oleh warga untuk diolah sebagai masukan rencana intervensi program.

“ jadi semuanya kita rangkum sebagai masukan, dari masalah dan potensi yang ada di masyarakat,” (Win, staf lapangan ADP, 22 Mei 2012)

Saat kegiatan diimplementasikan, warga dampingan melalui pertemuan rutin kader kesehatan turut membahas permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dalam pertemuan ini juga menjadi media untuk menyampaikan informasi dan masukan bagi program ADP

“kita sampaikan informasi dan masukan warga untuk ADP, misalnya masalah saluran, “ (Ibu Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Demikian juga saat evaluasi, merupakan waktunya ADP memperoleh masukan-masukan dari warga dampingan dan para pemangku kepentingan untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ADP.

“ Di Wahana Visi ini, masukan dari warga selalu diminta bagi proses pemberdayaan yang dilakukan ADP..”(Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

c. Penyampaian informasi tentang program dan kegiatan oleh tim ADP

Selain melibatkan warga dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan-masukannya atas program dan kegiatan ADP, secara terus-menerus tim ADP berusaha menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan ADP kepada warga dampingan dalam rangka mengoptimalkan keterlibatan warga. Dalam berbagai kesempatan, baik itu pertemuan rutin kelompok kader maupun kunjungan lapangan saat pendampingan kelompok, bahkan saat bertemu warga dalam suasana informal, staf ADP selalu berupaya mengingatkan warga untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di lapangan seperti mendorong ibu-ibu balita membawa anaknya ke posyandu atau kelompok belajar anak atau mengingatkan warga untuk mempraktekkan informasi atau pengetahuan yang mereka peroleh dari kegiatan pelatihan ataupun kampanye.

“ kalo ketemuan ama staf ADP, bisa sekalian tanya-tanya soal kegiatan terus disitu juga biasanya diingetkan dan sekalian diajak ikutan..,” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 6 Nov 2012)

Upaya ini membuat warga terpapar terus menerus dengan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan ADP dan membuat warga terdorong untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

“... tetapi saya salut karena kegigihan ..kesabaran wwi..orang-orang di lapangan..saya salut sedikit demi sedikit menanamkan apa yang wwi programkan agar warga ikutan...”(Ham, ketua Rw, 26 Mei 2012)

d. Adanya manfaat dari program yang dirasakan warga dampingan

Selain adanya kejelasan dari kegiatan program ADP, adanya manfaat dari program yang dirasakan oleh warga dampingan menyebabkan warga bersedia untuk terlibat aktif dalam kegiatan ADP, sekalipun tanpa memperoleh imbalan atas keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Bahkan warga juga bersedia mengeluarkan biaya transportasi sendiri bila harus menghadiri pertemuan atau pelatihan yang dilaksanakan cukup jauh dari tempat tinggalnya karena merasa manfaat yang akan diperoleh dari pertemuan atau pelatihan tersebut lebih besar dari biaya transportasi yang harus dikeluarkan.

“ kalau dibilang sosial itu saya rasa dari wvi dibilang sosial karena memang wvi tidak memberikan fee, orang ini mau untuk diajak kerja mengurus wilayahnya tanpa kasih imbalan, karena dia rasa ada manfaatnya” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Melalui keikutsertaan dalam pelatihan yang difasilitasi oleh tim ADP tersebut telah menumbuhkan rasa percaya diri pada kader-kader kesehatan dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh ibu Sup, salah satu kader.

“ hal positif saya ya...sekarang bisa berani ngomong ...”(Sup, kader kesehatan, 26 Mei 2012)

Ibu Mus menambahkan bahwa dari pelatihan yang mereka ikuti, membuat pengetahuan mereka menjadi bertambah. Hal ini merupakan manfaat program yang dinikmati oleh para kader kesehatan

“..banyaklah, satu ..dapat ilmu, terus kita bisa tahu yang tadinya tidak tahu, cara menyusui yang baik, cara merawat bayi, ah pokoknya banyaklah...kita tahu karena kita ikut pelatihan ..” (Mus, kader kesehatan, 26 Mei 2012)

Tidak itu saja, dengan keterlibatan kader dalam kegiatan pelatihan tersebut, ternyata akhirnya mengasah kemampuan mereka untuk akhirnya terlibat menjadi fasilitator penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.

“saya udah bisa menjadi fasilitator...menyampaikan kembali kepada masyarakat..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Pengetahuan kader dan keterlibatannya dalam kegiatan kesehatan masyarakat juga akhirnya menempatkan kader menjadi rujukan bagi warga bila ingin mendapatkan pertolongan dalam mengurus surat keterangan tidak mampu untuk berobat ke rumah-sakit. Kader merasa bangga karena dibutuhkan warga masyarakat.

“apalagi contohnya kayak sekarang orang cari kader..kalo pembuatan sktm harus ada tanda-tangan kader..jadi kalo untuk saya hidup ini jadi berarti kalau kita berarti untuk orang lain...kita rasanya bangga karena dibutuhkan orang lain dan puas bisa membantu orang lain ..” (Har, kader kesehatan, 24 Mei 2012)

Adapun manfaat yang dirasakan terkait dengan pendampingan kelompok ekonomi ini adalah adanya tambahan penghasilan sebagaimana disampaikan oleh ibu Nur.

“ nah untuk pelatihan kayak snack contohnya, usaha itu sangat berguna karena setelah mendapat pelatihan itu saya jadi punya usaha sendiri sekarang, nambah ekonomi keluarga ya untuk bantu-bantu”(Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Warga yang sebelumnya menganggur, akhir saat ini sudah memiliki kegiatan usaha sendiri karena keterlibatan anggota keluarganya dalam pelatihan keterampilan usaha yang mereka ikuti di ADP

“ kita pelatihan di rawasari bikin mie pangsit, sekarang sudah jualan mie pangsit..nah itukan jadi manfaatnya ada yang diambil keluarga wakil anak, yang bapaknya ngganggu sekarang jualan pangsit gara-gara istrinya ikut pelatihan ..”(Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Selain itu dengan mengikuti pelatihan, membangun pengetahuan anggota kelompok dan juga rasa percaya diri dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain.

“karena bisa ikutan pelatihan, makanya bisa banyak tahu terus lebih bisa ngomong dengan orang lain ..lebih percaya diri jadinya..”(Ros, anggota kelompok usaha, 2 Juni 2012)

Di samping itu manfaat lainnya adalah warga juga mau saling berbagi pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan kepada orang lain. Karena merasa mendapatkan ilmu tersebut secara cuma-cuma dari pertemuan-pertemuan pelatihan ADP, maka warga dampingan merasa terdorong juga untuk membagikan pengetahuan yang didapatnya kepada orang lain agar lebih banyak lagi warga lainnya yang bisa menjadi lebih pandai dan kepandaian tersebut dapat dimanfaatkannya untuk membuat perubahan dalam hidupnya.

“ ..karena kita dapat ilmunya juga gratis ya kita bagikan juga sama yang lain, biar yang ibu lainnya juga jadi belajar ..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

e. Keterlibatan ketua Rw dan Rt dalam menentukan peserta

Dalam proses persiapan suatu kegiatan pelatihan atau penyuluhan, secara intensif para petugas lapangan menghubungi tokoh masyarakat seperti ketua Rt / Rw, ketua kelompok kader untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dari kegiatan yang mau dilakukan dan siapa target peserta kegiatan sambil memintakan masukan atau rekomendasi calon peserta dari para ketua Rw da Rt tersebut karena mereka cukup mengetahui juga kondisi dari warga masyarakatnya.

“.. Stafnya ADP datang ke rumah menyampaikan informasi tentang kegiatan ADP, terus nanyain siapa saja di antara warga yang sebaiknya ikutan untuk pertemuan atau pelatihan..” (Dew, ketua Rt, 26 Mei 2012)

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang maksud dan tujuan kegiatan ADP maka para ketua Rt / Rw bisa mendorong keterlibatan aktif dari warganya demikian juga merekomendasikan nama-nama dari warga yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Karena nama-nama tersebut datang dari para ketua Rt / Rw maka hal ini mendorong mereka untuk bisa terlibat memonitor tindaklanjut dari kegiatan pelatihan yang harus dilakukan oleh para peserta kegiatan.

“... kita juga ikutan tanggungjawab karena sudah memberikan nama-nama warga yang bisa diikutkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan ADP..kita dorong juga warga untuk aktif mengikuti kegiatan karena toh manfaatnya mereka juga yang nikmatin ..” (Dew, ketua Rt, 26 Mei 2012)

Dari uraian di atas maka hal-hal yang menjadi faktor pendukung keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan ADP Cilincing adalah pertama, ADP selalu mengupayakan keterlibatan warga dampingan maupun para pemangku kepentingan di wilayah dampingan dalam setiap tahapan proses pemberdayaan. Kedua, adanya ruang yang diberikan ADP bagi warga dampingan untuk menyampaikan masukan-masukannya dan masukan tersebut diakomodir oleh ADP. Ketiga, adanya upaya penyampaian informasi yang terus-menerus tentang kegiatan ADP kepada warga dampingan. Keempat, warga dampingan merasakan manfaat dari kegiatan ADP serta terakhir adalah dilibatkannya ketua Rt atau Rw untuk memberikan rekomendasi kepada tim ADP tentang siapa saja warga dampingan yang perlu dilibatkan dalam kegiatan di lapangan dan mereka turut aktif memonitor keterlibatan warganya.

4.1.2.2 Faktor Penghambat

Sekalipun demikian ditemukan juga kondisi-kondisi yang menghambat warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan ADP sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Isu kristenisasi

Di masa awal ADP memulai kegiatannya maka adanya isu kristenisasi yang membuat warga dampingan enggan terlibat dalam kegiatan program. Hal ini dikarenakan Wahana Visi Indonesia sebagai pengelola program ADP merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang berasaskan keyakinan kristiani dan adanya kekhawatiran warga dampingan bahwa ADP memiliki misi keagamaan. Isu ini timbul dari adanya lembaga lain yang melakukan kegiatan kelompok belajar anak yang mirip dengan apa yang dilakukan ADP tetapi kegiatan lembaga tersebut memang bermuatan ajaran agama. Akibat ketidaktahuan warga akan identitas lembaga yang bersangkutan sehingga warga mengira mereka adalah staf ADP juga. Akibatnya ADP yang dituduh melakukan upaya kristenisasi.

“ ..ada juga warga yang tidak mau ikut dalam kegiatan ADP karena takut dikristenkan ...” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 26 Mei 2012)

Tetapi isu ini dikelola oleh tim ADP dengan memberikan kesempatan pada warga untuk melihat sendiri dari dekat pelaksanaan kegiatan di kelompok belajar anak, sehingga kekhawatiran bahwa anak-anak tersebut diberikan ajaran agama yang berbeda dengan keyakinan yang dianut si anak tidak terbukti sehingga akhirnya warga memahami bahwa bahwa isu tersebut tidak benar.

“ tapi akhirnya warga mengerti juga kalau ADP tidak bawa-bawa agama....hanya untuk menolong anak-anak dan keluarga....buktnya programnya bisa terus berjalan sampai sekarang..” (Nur, kader dan anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

- b. Warga dampingan berharap untuk memperoleh bantuan langsung dari program ADP sebagai imbalan atas keterlibatannya

Hal lainnya yang menghambat, terutama di masa awal ADP adalah adanya pemahaman warga bahwa kalau ada lembaga melakukan kegiatan sosial itu harus menyediakan sesuatu bagi masyarakat dalam bentuk barang, baru warga bersedia terlibat.

“ cuman kalo yang lainnya biasanya yang menanyakan masalah rapat atau kumpul..ada amplopnya gak ? ada sembakonya gak ?..,” (Ham, ketua Rw, 26 Mei 2012)

Apalagi di saat awal, di wilayah yang sama World Vision juga sedang mengerjakan program yang bersifat tanggap darurat dimana memberikan bantuan berupa beras kepada warga yang mengikuti kegiatan sanitasi atau gotong royong membersihkan kampung. Karena adanya sebagian warga menganggap bahwa Wahana Visi adalah sama dengan World Vision maka mereka berharap di programnya ADP juga berlaku model pemberian bantuan seperti di World Vision. Kondisi ini juga yang pada awalnya membuat warga cenderung bersikap hitung-hitungan menanyakan apakah ada imbalan uang atau barang bila terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ADP.

“ emang masih ada warga yang ngarepin dapat bantuan atau sembako kalau ngikutin kegiatan tapi kan di ADP gak ada gitu, apalagi waktu TAP masih jalan...masih ada bagi beras dan kacang, ..itu bikin warga itung-itungan kalau diajak kegiatan ADP..,” (Yyt, ketua program masyarakat Cilincing, 27 Mei 2012)

- c. Kesibukan warga dampingan dengan urusan rumah-tangga dan pekerjaannya

Umumnya peserta kegiatan ADP kebanyakan adalah ibu rumah tangga maka kesibukan mengurus rumah-tangga membuat warga dampingan tidak bisa

terlibat dalam kegiatan ADP. Hal ini salah-satu penyebabnya karena jadwal kegiatan ADP yang dimulai terlalu pagi sehingga ibu-ibu tersebut belum selesai dengan pekerjaan rumah tangganya berakibat mereka tidak bisa datang ke pertemuan atau kegiatan pelatihan ADP.

“ namanya juga ibu rumah tangga...selesaikan dulu beres-beres rumah ama urusan anak baru bisa ikutan kegiatan...kadang-kadang waktunya gak cocok dengan jadwalnya ADP...” (Dew, ketua Rt, 26 Mei 2012)

Ada juga diantara warga dampingan yang bekerja sebagai buruh cuci atau berjualan sehingga bila mengikuti kegiatan harus meninggalkan pekerjaan dan hal ini mengakibatkan warga dampingan tersebut akan kehilangan pendapatannya.

“ sekalipun pingin ikut tapi pekerjaannya gak bisa ditinggal, soalnya ada juga yang kerja jadi buruh cuci atau jualan, jadi bila gak kerja gak ada pemasukan, makanya jarang bisa kumpul semua ...” (Har, kader kesehatan, 24 Mei 2012)

d. Kegiatan dirasa terlalu rumit untuk diikuti oleh warga dampingan

Kondisi lainnya yang turut menghambat keterlibatan warga dampingan adalah keengganan untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang dirasakan warga cukup rumit karena mengharuskan warga tersebut terlibat dalam kegiatan berpikir seperti pelatihan analisa kelayakan usaha mikro, pembukuan kelompok usaha atau pengelolaan ekonomi rumah tangga.

“repot ngikutin ADP karena harus ikutan mikir-mikir..mungkin karena bukan orang sekolahan...”(Ros , anggota kelompok usaha, 24 Mei 2012)

Dari uraian di atas maka beberapa hal yang menjadi hambatan bagi warga dampingan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP Cilincing adalah pertama, isu kristenisasi pada masa awal program ADP.

Kedua, adanya keinginan warga untuk mendapatkan bantuan langsung sebagai imbalan keterlibatan dalam kegiatan program, baik itu dalam bentuk imbalan uang atau barang, sementara hal tersebut tidak disediakan oleh ADP. Ketiga, adanya kesibukan warga dampingan dalam hal urusan rumah-tangga maupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Keempat, keengganan warga dampingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dianggap terlalu rumit dan menuntut olah-pikir.

Tabel berikut menunjukkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP Cilincing.

Tabel 4.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga dalam Kegiatan Pemberdayaan ADP Cilincing

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
<p>a. ADP selalu mengupayakan keterlibatan warga dampingan maupun para pemangku kepentingan di wilayah dampingan dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan. Mereka diundang hadir dalam pertemuan-pertemuan penyampaian informasi program, pembentukan komite proyek, pengkajian permasalahan, perumusan rencana kegiatan, implementasi kegiatan maupun dalam pertemuan evaluasi.</p> <p>b. Dalam setiap pertemuan yang disebutkan dalam poin a di atas, tim ADP selalu menyediakan ruang bagi warga dampingan maupun para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan pendapatnya terhadap upaya-upaya pemberdayaan yang sudah dan akan</p>	<p>a. Isu kristenisasi akibat kesalahpahaman yang terjadi di awal program yang sempat membuat sebagian warga menolak terlibat dalam kegiatan ADP karena khawatir akan terjadinya pendangkalan akidah pada anak-anak mereka.</p> <p>b. Masih adanya warga dampingan yang berharap untuk memperoleh bantuan langsung dari program ADP sebagai imbalan atas keterlibatan dalam kegiatan ADP. Adanya mekanisme pemberian bantuan langsung dalam program tanggap darurat sebelumnya yang dilakukan World Vision di wilayah dampingan yang sama turut mempengaruhi pola pikir seperti ini karena sebagian warga beranggapan kegiatan ADP tidak berbeda dengan kegiatan program World Vision</p>

<p>dilakukan oleh ADP dan masukan tersebut diakomodir oleh ADP.</p> <p>c. Adanya upaya penyampaian informasi yang terus-menerus dilakukan tim ADP dalam berbagai kesempatan tentang kegiatan ADP kepada warga dampingan sehingga warga terpapar dengan apa yang telah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan oleh ADP dan hal tersebut membangun kesadaran warga akan adanya manfaat yang bisa diperoleh dengan terlibat dalam kegiatan ADP</p> <p>d. Warga dampingan merasakan manfaat langsung dari kegiatan ADP yang mereka ikuti seperti peningkatakan rasa percaya diri sehingga mampu berkomunikasi dengan lebih baik kepada pihak lain, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat di lapangan maupun menghubungkan warga yang membutuhkan pertolongan dengan pihak-pihak yang bisa menyediakan bantuan yang diperlukan, sampai dengan memiliki usaha sendiri dan tambahan pendapatan dari usaha tersebut yang bisa menolong ekonomi rumah-tangga. Adanya manfaat ini membuat warga merasa berkepentingan untuk ambil bagian dalam kegiatan ADP</p> <p>e. Dilibatkannya ketua Rt atau Rw dalam memberikan rekomendasi tentang partisipan kegiatan di lapangan dan</p>	<p>sebelumnya.</p> <p>c. Kesibukan warga dampingan yang umumnya adalah para ibu rumah-tangga dengan urusan pekerjaan rumah-tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah, memasak dan lain-lain menyebabkan mereka tidak punya waktu luang untuk mengikuti kegiatan ADP . Demikian juga adanya ibu-ibu yang turut bekerja untuk menopang ekonomi rumah-tangganya , sekalipun ada di antara mereka yang berminat untuk mengambil bagian dalam kegiatan ADP, namun tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena konsekwensi kehilangan pendapatan.</p> <p>d. Kegiatan pelatihan dirasakan terlalu rumit untuk diikuti oleh warga dampingan seperti pada pelatihan analisa kelayakan usaha, pembukuan kelompok usaha atau pengelolaan ekonomi rumah-tangga dimana partisipan harus melakukan perhitungan matematika sebagai bagian dari proses pelatihan. Keterbatasan latar-belakang pendidikan dan pengetahuan warga dampingan turut mempengaruhi kemampuannya dalam mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini.</p>
---	---

<p>mereka turut aktif memonitor keterlibatan warganya mendapatkan manfaat optimal dari kegiatan ADP. Upaya pelibatan ketua Rw dan Rt ini menjadi bentuk penghargaan ADP atas peran mereka selaku orang yang dipercayakan warga untuk menjembatani kepentingan warga dalam memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari dukungan yang diberikan pihak luar untuk perbaikan kondisi masyarakat</p>	
--	--

Sumber : diolah dari hasil temuan penelitian

4.2. Pembahasan

4.2.1 Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Adi menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dilakukan WVI melalui ADP dapat dilihat dari dua sisi yakni sebagai suatu program dan sebagai suatu proses (bab 2 hal 33). Sebagai suatu program, maka pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan jangka waktunya. Upaya pemberdayaan pada level komunitas dengan pendekatan pengembangan masyarakat lokal tersebut mengikuti tahapan yang dimulai dari persiapan, pengkajian (assessment), perencanaan alternatif program, pemformulasian rencana aksi, evaluasi dan diakhiri dengan terminasi.

ADP Cilincing sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan pengembangan masyarakat lokal tersebut juga dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan berikut.

4.2.1.1 Tahap persiapan.

ADP Cilincing mengawali intervensinya pada tahapan persiapan dengan mendapatkan surat ijin operasional program yang dilakukan berjenjang dari

tingkat pemerintahan kotamadya sampai dengan kelurahan. Dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian informasi tentang identitas lembaga dan program kepada warga sasaran maupun para pemangku kepentingan terkait atau yang di lapangan disebutkan dengan istilah ‘sosialisasi program’ melalui pertemuan ke setiap Rw dalam wilayah dampingan (bab 4 hal 79). Dalam proses ini tim ADP mulai menjalin kontak dengan kelompok sasaran agar warga masyarakat semakin mengenal tentang apa dan siapa Wahana Visi Indonesia, bagaimana hubungannya dengan program NJTAP-World Vision yang sedang berlangsung saat itu di wilayah yang sama dan apa yang mau dilakukan di tengah-tengah masyarakat sasaran melalui kegiatan pemberdayaannya. Pentingnya membangun pemahaman ini agar warga dapat mengerti bahwa program ADP diadakan dalam rangka menolong masyarakat Cilincing khususnya warga kurang mampu untuk dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Untuk itu maka mereka perlu memahami mekanisme yang berlangsung dalam ADP dimana partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam kegiatan pemberdayaan ADP dan selanjutnya warga dapat mengambil manfaat dari keberadaan program ADP untuk kepentingannya melalui partisipasi aktifnya dalam berbagai kegiatan ADP. Proses sosialisasi program juga sebagai bentuk komunikasi yang dibangun oleh tim ADP kepada warga sasaran untuk menolong ADP mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam implementasinya sebagaimana Tjokroamidjojo menyebutkan bahwa gagasan, ide-ide dan rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat (bab 2 hal 46)

Untuk memobilisasi kehadiran kelompok sasaran dalam pertemuan sosialisasi ini, tim ADP juga menggandeng kader-kader masyarakat setempat. Kesiadaan para kader tersebut untuk ambil bagian dalam proses sosialisasi menunjukkan bahwa kader-kader sudah memahami maksud dan tujuan dari program ADP sehingga terlibat aktif menghadirkan warga dampingan dalam proses sosialisasi program tersebut. Di samping itu mulai terbentuk kedekatan antara tim ADP sebagai pelaku perubahan dengan komunitas sasaran dimana fase ini disebut oleh Adi sebagai fase *engagement* dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat (bab 2 hal 34). Hubungan yang terbangun dengan baik antara tim

ADP dengan para kader kesehatan masyarakat sangat menolong ADP dalam membuka jalan untuk diterima oleh komunitas sasaran di wilayah Cilincing.

Kedekatan tersebut semakin diperkuat dengan pembentukan komite proyek oleh tim ADP (bab 4 hal 84) yang beranggotakan perwakilan warga dari kelompok sasaran dan selanjutnya komite proyek ini menjadi mitra tim ADP dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di lapangan. Kesediaan warga untuk duduk dalam kepengurusan komite proyek memperlihatkan tumbuhnya kepercayaan warga kepada ADP sebagai pihak luar yang masuk dalam komunitas mereka. Sekalipun demikian rasa kepercayaan tersebut memang sempat diuji dengan timbulnya isu kristenisasi karena identitas diri organisasi sebagai organisasi kemanusiaan Kristen dan kesalahpahaman yang terjadi karena adanya lembaga lain di lapangan yang diduga membawa misi agama dan keberadaan lembaga tersebut dianggap sebagai lembaga yang sama dengan Wahana Visi Indonesia.

Ujian tersebut memang pada awalnya membuat sekelompok masyarakat menolak kehadiran ADP. Warga merasa khawatir kalau kegiatan dalam program ADP dapat berakibat pada pendangkalan akidah pada anak-anak yang akan dilibatkan dalam proyek *sponsorship* sebagai anak dampingan. Tetapi upaya klarifikasi yang dilakukan tim ADP atas dugaan kristenisasi tersebut serta upaya melibatkan warga untuk memonitor secara langsung apa yang dilakukan oleh tim ADP akhirnya memupus kecurigaan tersebut. Dalam hal ini keberadaan komite proyek juga menjadi jembatan penghubung antara tim ADP dengan warga dampingan untuk mengklarifikasi adanya isu-isu atau ketidakjelasan yang menyangkut program maupun identitas organisasi. Warga bisa mempertanyakan hal-hal tersebut melalui perwakilannya yang duduk di komite proyek dan diteruskan kepada tim ADP untuk mendapatkan penjelasan. Memang dalam suatu kegiatan pemberdayaan di mana agen perubahan berasal dari luar komunitas sasaran maka adalah sesuatu hal yang wajar bila warga maupun para pemangku kepentingan akan terus mengamati-amati dan memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan oleh agen perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan belum semua pihak mengenal dengan baik akan keberadaan dari agen perubahan tersebut dan bila terjadi hal-hal yang mencurigakan atas tindak-tanduknya, maka akan timbul reaksi

penolakan dari masyarakat atas kehadiran mereka. Penolakan terhadap orang luar karena merasa terganggu ini yang disebut Adi sebagai salah satu faktor penghambat pemberdayaan dari sistim sosial sebagaimana tercantum di dalam bab 2 hal 44. Kondisi ini memang mengharuskan agen perubahan harus bersikap terbuka dan tidak memiliki agenda tersembunyi di balik kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukannya di lapangan.

Di samping menjembatani tim ADP dan warga sasaran, keberadaan komite proyek juga menjadi strategi ADP untuk mendorong partisipasi warga dampingan karena dalam setiap tahapan program pemberdayaan berikutnya yang dilakukan oleh ADP selalu melibatkan komite proyek seperti dalam pelaksanaan survey kondisi awal, pengkajian terhadap permasalahan masyarakat, perumusan rencana intervensi sampai dengan evaluasi atas program dan kegiatan ADP. Melalui anggota komite proyek, tim ADP juga bisa mendapatkan informasi-informasi tentang apa yang terjadi pada warga dampingan secara langsung karena anggota komite proyek merupakan warga masyarakat setempat. Warga juga bisa menyampaikan masukan-masukannya atas kegiatan-kegiatan ADP melalui komite proyek, sehingga bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang perlu atas kegiatan tersebut untuk mengoptimalkan manfaat dari kegiatan bagi warga dampingan. Melalui komite proyek maupun bentuk keterlibatan langsung lainnya yang dilakukan warga dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tersebut karena program ADP diupayakan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan desain program yang disepakati bersama masyarakat. Adanya keterlibatan komite proyek maupun masyarakat ini akan menyebabkan perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan tidak semata-mata akibat adanya intervensi pihak luar, melainkan masyarakat merasa bahwa perubahan itu terjadi karena merekalah yang menjadi pelaku perubahan utama. Sebagaimana disebutkan Adi bahwa perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan haruslah merupakan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama yang menandakan bahwa program benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat (bab 2 hal 44).

4.2.1.2 Tahap Pengkajian

Dalam tahap pengkajian atau *assessment*, Adi menjelaskan bahwa dalam tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah yang dirasakan maupun kebutuhan yang diekspresikan serta sumberdaya yang dimiliki oleh warga sasaran (bab 2 hal 34). Pada tahap ini tim ADP bersama-sama dengan komite proyek melakukan survey kondisi awal / baseline yang hasilnya kemudian didalami bersama-sama warga dampingan baik itu orang dewasa dan anak-anak melalui pertemuan PLA di setiap Rw untuk mendapatkan gambaran lebih rinci tentang kondisi masyarakat sasaran terkait dengan isu pendidikan dan kesehatan anak serta ekonominya (bab 4 hal 87, 89).

Dalam proses ini, warga dampingan dilibatkan dalam setiap langkah dalam tahapan *assessment* tersebut agar permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari sudut pandang komunitas sasaran sendiri. Tidak itu saja, apa yang menjadi kebutuhan maupun permasalahan masyarakat juga dilihat tim ADP dari sudut pandang anak-anak dengan terlibatnya mereka menjadi narasumber dalam pertemuan PLA. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dilihat dan dirasakan oleh orang dewasa belum tentu hal tersebut dirasakan menjadi permasalahan bagi anak-anak, demikian juga sebaliknya. Apa yang dilakukan tim ADP ini untuk memastikan agar kepentingan anak-anak turut juga menjadi pertimbangan utama dalam merancang kegiatan intervensi ADP berikutnya mengingat keberadaan lembaga Wahana Visi Indonesia sebagai lembaga yang fokus kepada kesejahteraan anak.

Dilibatkannya warga dampingan sendiri sebagai fasilitator proses PLA yang sebelumnya telah dilatih oleh tim ADP menjadi cara untuk menggali lebih dalam informasi tentang situasi dan permasalahan yang berlangsung di masyarakat berikut potensi sumberdaya yang tersedia. Proses ini mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat akan situasi yang selama ini membelenggu mereka sehingga mereka menjadi tidak berdaya. Mereka didorong untuk mencari tahu hal-hal apa yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah pada anak-anak di sekitar tempat tinggal mereka, tingginya angka gizi buruk pada balita yang ada di lingkungan mereka maupun rendahnya penghasilan sebagaimana potret dari hasil

baseline survey. Hal-hal apa yang berlangsung dalam kehidupan warga yang berkontribusi atas terjadinya permasalahan tersebut.

Saat menggali informasi tentang potensi yang dimiliki masyarakat, masyarakat dibawa pada kesadaran bahwa sekalipun mereka ada dalam situasi kemiskinan tetapi ada potensi-potensi di dalam warga seperti gotong-royong, kemauan untuk maju, kerja keras, dan semangat berjuang yang dapat menjadi modal awal untuk melakukan perubahan pada diri dan masyarakat. Ada pribadi-pribadi, lembaga dan sistem di masyarakat yang bisa dioptimalkan keberadaannya untuk melakukan perubahan-perubahan atas kondisi ketidakberdayaan di lapangan. Proses ini membangun pemahaman pada warga bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi ini yang disebutkan oleh Kartasmita sebagai potensi keberdayaan masyarakat yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan maupun mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan (bab 2 hal 33). Potensi inilah yang diberi ruang sebesar-besarnya oleh ADP untuk bisa berkembang melalui berbagai kegiatan pemberdayaannya sebagaimana Kartasmita juga menyebutkan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) sebagaimana tercantum pada bab 2 hal 37.

Proses PLA yang dilakukan oleh ADP ini sesungguhnya menjadi bagian proses pemberdayaan yang digambarkan Hogan dalam Adi yakni menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan, mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan, mengidentifikasi permasalahan dan sumberdaya serta membangun rencana aksi dan implementasi untuk mewujudkan perubahan (bab 2 hal 32).

4.2.1.3 Tahap Perumusan Rencana Intervensi

Hasil dari identifikasi permasalahan dan potensi sumberdaya yang dimiliki warga dampingan tersebut menjadi dasar bagi tim ADP untuk merumuskan rencana intervensi program dan kegiatan yang dituangkan dalam desain proyek untuk periode tiga tahunan maupun kegiatan operasional tahunan (bab 4 hal 91,93). Menurut Adi bahwa tahapan perencanaan ini adalah tahapan di mana

pelaku perubahan melibatkan warga secara partisipatif untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya (bab 2 hal 34).

Perubahan pada kondisi masyarakat memang tidak bisa seketika dihasilkan lewat intervensi pemberdayaan masyarakat. Karena perubahan tersebut mesti dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat yang menyadari adanya keadaan-keadaan dalam kehidupan dan lingkungannya yang perlu ditata ulang atau diperbaiki. Kondisi kemiskinan yang membelit warga masyarakat menjadi hal-hal yang membatasi terjadinya perubahan. Karenanya desain program pemberdayaan yang dibangun oleh Wahana Visi Indonesia ini bersifat jangka panjang yang terdiri atas beberapa tahapan periode yang dirancang untuk tahap demi tahap membangun keberdayaan masyarakat.

Dalam tahapan perencanaan ini, warga dampingan bersama komite proyek difasilitasi untuk menyusun opsi-opsi alternative kegiatan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dikelompokkan dalam proyek kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Mereka dilibatkan untuk menganalisa bagaimana *output* dari setiap kegiatan maupun *outcome* proyek akan berkontribusi mewujudkan perubahan yang ditetapkan bersama-sama sebagai tujuan (*goal*) program yang dibangun dalam periode tiga tahunan. Sehingga proses penyusunan dokumen desain program ini menjadi salah-satu media belajar bagi warga dampingan juga dalam mempersiapkan suatu kegiatan program. Dalam hal ini perumusan rencana program ADP dan kegiatan proyeknya juga turut mempertimbangkan adanya program-program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya di wilayah dampingan yang sama agar dapat diminimalkan terjadinya tumpang-tindih antara berbagai kegiatan program tersebut. Karena bila tumpang-tindih ini terjadi maka akan menjadi mubazir dan manfaat program-program tersebut tidak bisa optimal dirasakan oleh warga masyarakat.

Rancangan desain program tiga tahunan ini juga selanjutnya diturunkan tim ADP menjadi daftar kegiatan berikut target pencapaian dan anggaran yang dibutuhkan untuk diimplementasikan bersama warga dampingan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rencana operasional tahunan. Proses ini juga kembali melibatkan berbagai pihak dalam perumusannya baik itu komite proyek,

pemerintah maupun lembaga mitra ADP karena perlu menyelaraskan jadwal penyelenggaraan kegiatan maupun pembagian peran dan sumberdaya antara berbagai pihak yang akan terlibat dalam implementasi kegiatan-kegiatan tersebut. Apa yang telah dirumuskan dalam program dan kegiatan ini diharapkan dapat untuk mengatasi permasalahan yang ada sebagaimana Adi menyebutkan bahwa tahapan ini merupakan tahap performulasian rencana aksi dimana pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat sasaran (bab 2 hal 35).

4.2.1.4 Tahap Implementasi

Apa yang sudah dirumuskan dalam tahapan perencanaan dan perumusan rencana aksi tersebut kemudian dieksekusi pelaksanaannya oleh tim ADP di lapangan pada kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tertera dalam bab 4 hal 94-119. Adi menyebutkan bahwa tahapan implementasi atau pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat (bab 2 hal 35)

Dalam tahapan implementasi ini, tim ADP melakukannya dengan membangun kerjasama dengan warga dampingan melalui pendekatan kelompok dimana dibentuk kelompok kader kesehatan maupun kelompok pengembangan ekonomi. Melalui pendekatan kelompok ini membuat anggotanya bisa saling berbagi minat dan tujuan yang sama serta menyediakan dukungan, informasi dan motivasi kepada satu sama lainnya dalam rangka mewujudkan perubahan yang telah direncanakan untuk dicapai lewat kegiatan-kegiatan ADP. Kerjasama yang dibangun antara tim ADP selaku pelaku perubahan dan warga dampingan ini difasilitasi melalui pertemuan rutin kelompok maupun kunjungan lapangan saat pendampingan dilakukan oleh staf ADP kepada kelompok. Lewat pertemuan dan kunjungan tersebut dibahas kesulitan atau hal-hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan maupun menghambat warga dampingan dalam mempraktekkan

pengetahuan yang diperolehnya lewat pelatihan-pelatihan yang diterima sebelumnya. Anggota kelompok dapat berbagi informasi dan memberikan masukannya baik kepada tim ADP maupun sesama anggota kelompok untuk penyelesaian masalahnya. Selain itu lewat kelompok ini maka pengaruh dari kader kesehatan khususnya dalam membangun pemahaman warga masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak akan lebih baik dari pada dilakukan secara individu. Lewat kelompok juga, warga dampingan dapat berbagi peran yang memperkuat potensi kreatif dan pemecahan masalah karena melalui kelompok anggota dapat saling bertukar ide, gagasan dan pendapat. Anggota kelompok saling berbagi peran dan tanggungjawabnya dalam melakukan perencanaan kerja, intervensi dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam kelompok. Semua itu dilakukan agar rencana kegiatan yang telah disusun bersama dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Dengan pendekatan kelompok juga penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan ruang lingkup bantuan menjadi tidak terlalu luas apabila pendampingan dalam rangka pemberdayaan ini dilakukan satu demi satu pada warga dampingan mengingat banyaknya jumlah warga yang memiliki kebutuhan tersebut sementara staf ADP sebagai pelaku perubahan memiliki jumlah terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh Kartasamita bahwa masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurangberdayaannya sehingga upaya pemberdayaan perlu dilakukan dalam bentuk kegiatan bersama atau berkelompok (bab 2 hal 38). Pendekatan kelompok ini sangat relevan dilakukan dalam pekerjaan sosial seperti upaya pemberdayaan sebagaimana yang dilakukan oleh ADP terhadap warga dampingannya karena lewat kelompok akan membangun interaksi antar individual untuk berbagi minat dan tujuan yang sama, memberi kesempatan terbangunnya potensi-potensi anggota kelompok untuk saling berbagi peran dan tanggungjawab memastikan suatu pekerjaan terlaksana dan komunikasi lewat kelompok menjadi cara yang paling efisien dalam mengambil keputusan bersama sebagaimana disampaikan oleh Schopler dan Galinsky dalam Kirst Ashman tentang kegunaan pendekatan kelompok dalam melakukan pekerjaan sosial (bab 2 hal 53).

Proses yang terjadi dalam implementasi kegiatan ini memberi ruang dan kesempatan bagi potensi yang dimiliki oleh warga dampingan untuk berkembang

dan semakin diperkuat lewat interaksi di antara warga dampingan maupun kegiatan-kegiatan pelatihan ADP yang mereka ikuti. Melalui pertemuan rutin kelompok dan diskusi-diskusi yang terjadi saat kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim ADP, warga dampingan didorong untuk menganalisa dan mengkritisi situasi yang terjadi di sekitar mereka, bagaimana mereka mencari opsi-opsi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pengetahuan yang warga dampingan peroleh lewat pelatihan-pelatihan maupun penyuluhan-penyuluhan didorong untuk diimplementasikan sehingga membangun kesadaran mereka bahwa mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mampu mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Adanya kesadaran tersebut akan mendorong warga untuk terus membangun kapasitas dan kemampuan dirinya untuk menghadapi situasi keterbatasan yang dialami saat ini sehingga mereka dapat jeli melihat peluang-peluang dan kesempatan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka untuk dapat mereka manfaatkan bagi kepentingan mereka, seperti keberadaan lembaga mikro kredit yang dapat memenuhi keperluan mereka akan tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha yang telah dirintis oleh kelompok ataupun mengakses bantuan sosial yang tersedia lewat program pemerintah, korporasi maupun lembaga lainnya yang beroperasi di sekitar mereka. Ife menyebutkan bahwa salah satu strategi pemberdayaan masyarakat adalah melalui pendidikan dan penyadaran yang menekankan pentingnya proses pendidikan, sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas sebagai upaya menuju suatu perubahan (bab 2 hal 40). Upaya penguatan kapasitas warga dampingan melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan lapangan tim ADP untuk memampukan mereka mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh serta membuka akses warga dampingan untuk dapat berjejaring dengan pihak lainnya untuk memperoleh berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan warga dampingan merupakan langkah-langkah yang disebut Kartasmita sebagai memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses dalam berbagai peluang untuk membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (bab 2 hal 37).

Terbangunnya potensi dan daya dari masyarakat dampingan ADP ini bisa terlihat dari kemampuan komite proyek untuk mengelola kegiatan-kegiatan ADP, membangun jejaring dengan pihak-pihak lainnya sampai pada mengumpulkan sumberdaya dari berbagai pihak untuk mewujudkan program kerja dari komite proyek sebagaimana salah-satunya ditunjukkan dalam keberhasilan membangun gedung pertemuan Srikandi. Pada anggota kelompok kader kesehatan dan kelompok usaha, keberdayaan mereka ditunjukkan dengan meningkatnya kapasitas keterampilan dan pengetahuan mereka akan isu-isu kesehatan ibu dan anak, tumbuhnya kepercayaan diri sehingga mampu menjadi fasilitator kegiatan penyuluhan dan pelatihan, bahkan ada yang mampu menjadi rujukan warga untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Warga yang sebelumnya menganggur akhirnya memiliki usaha sendiri dan memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini menunjukkan juga bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan ADP telah berkontribusi dalam meningkatkan daya dari para kader dan anggota kelompok usaha tersebut untuk melakukan perubahan pada kehidupannya sebagaimana Ite menyebutkan dalam bab 2 hal 30 bahwa pemberdayaan itu bertujuan untuk meningkatkan daya dari kelompok atau individu yang kurang beruntung sehingga menolong mereka untuk dapat berkompetisi dengan pihak lainnya secara lebih efektif. Shrewsbury dalam Shera & Wells juga menyebutkan dalam bab 2 hal 30 bahwa upaya pemberdayaan telah memampukan para warga dampingan untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan penguatan kapasitas sehingga akhirnya dapat terhubung dengan pihak lainnya dengan cara produktif dan saling menguntungkan sebagaimana contoh kader yang menjadi rujukan warga miskin untuk pengurusan akses layanan kesehatan di rumah sakit yang memerlukan persyaratan administrasi yang rumit maka kader-kader terlibat aktif menyediakan dukungannya untuk mengurus dokumentasi yang diperlukan mulai dari pihak Rt sampai dengan kelurahan sehingga warga miskin tersebut dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan pada waktunya.

Melalui kegiatan advokasi kesehatan, kader-kader diperlengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang optimal dari pihak puskesmas khususnya dalam layanan posyandu yang menjadi fokus dari kegiatan advokasi kesehatan ibu

dan anak tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kader tersebut telah menjadikan mereka rujukan warga dampingan dalam memperoleh informasi tentang kesehatan ibu dan anak. Kegiatan advokasi kesehatan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ADP yang bersifat melindungi warga dampingan. Ketidak-tahuan dan keterbatasan pendidikan akibat kemiskinan acapkali menyebabkan warga tidak memahami apa sesungguhnya hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dari pihak pemerintah selaku pihak yang seharusnya menyediakan layanan publik tersebut bagi setiap warga negara. Adakalanya layanan publik seperti misalnya pelayanan kesehatan bagi warga miskin tersebut disediakan secara cuma-cuma di puskesmas atau rumah-sakit tertentu dengan menunjukkan surat keterangan miskin dari pihak kelurahan. Akibat ketidak-tahuan akan mekanisme persyaratan tersebut, mereka harus banyak menghadapi kesulitan bila harus mengakses layanan tersebut. Karenanya kegiatan advokasi ini salah satunya bermanfaat untuk menolong warga miskin dengan kebutuhan khusus seperti ini dimana kader-kader akan menghubungkan mereka dengan pihak-pihak pemberi layanan kesehatan. Upaya pemberdayaan ADP ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kartasmita bahwa pemberdayaan masyarakat harus merupakan upaya melindungi (*protecting*), dimana dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat (bab 2 hal 37)

4.2.1.5 Tahap Evaluasi

Secara berkala di akhir periode tiga tahunan maupun di tiap akhir semester, tim ADP kembali melakukan evaluasi bersama komite proyek dan warga dampingan serta para pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan pembelajaran dari kegiatan yang sudah terlaksana atau melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana (bab 4 hal 120). Adi menyebutkan bahwa evaluasi merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan yang sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal (bab 2 hal 35)

Proses evaluasi ini menolong ADP untuk memperbaiki strategi implementasi programnya maupun kemitraan dengan pihak lainnya dengan meminimalkan hambatan-hambatan dari internal organisasi dan mengoptimalkan kekuatan serta peluang yang terbangun oleh ADP selama ini di tengah masyarakat dampingan. Masukan-masukan dari warga dampingan dan para pemangku kepentingan dalam proses ini menjadi hal yang berharga karena menolong tim ADP dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi organisasi dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat dampingan di Cilincing. Hal-hal yang telah berjalan dengan baik yang menjadi kekuatan ADP dalam melaksanakan program dan kegiatannya terus dipertahankan. Adanya peluang-peluang baru baik dalam hal potensi kemitraan atau opsi sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat program dioptimalkan pemanfaatannya. Hal-hal yang berjalan kurang optimal dalam implementasi program sehingga menjadi kelemahan dan ancaman bagi kualitas program dalam mewujudkan perubahan di masyarakat menjadi prioritas untuk diperbaiki. Ini dilakukan juga dengan terus-menerus memperkuat kompetensi dan kapasitas staf lapangan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai agen perubahan masyarakat dalam mendampingi kelompok-kelompok sasaran di lapangan.

Pada sisi warga dampingan, keterlibatan mereka dalam proses evaluasi juga menjadi pembelajaran khususnya bagi komite proyek yang menjadi mitra dari ADP. Dalam kesempatan diskusi saat mengevaluasi pencapaian program dan proyek maupun saat bersama-sama turun ke lapangan memonitor pelaksanaan kegiatan, komite proyek dan staf lapangan dapat mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bila target yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut ternyata tidak bisa dicapai secara optimal. Apakah hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam perencanaan tidak realistis karena terlalu besar target yang ingin dicapai atau dalam perencanaan kegiatan kurang mempertimbangkan situasi lapangan seperti kesiapan warga dampingan atau mitra bahkan kesiapan staf ADP sendiri sehingga persiapan yang buruk mengakibatkan melesetnya pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan. Atau tidak tercapainya target tersebut akibat adanya situasi yang diluar kendali dari

perencana kegiatan seperti misalnya cuaca yang buruk pada hari pelaksanaan kegiatan di mana terjadi banjir sehingga menghalangi kehadiran partisipan dalam kegiatan. Dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dari pemerintah misalnya acapkali undangan yang telah diajukan jauh-jauh hari dan telah dikonfirmasi kesediaan kehadiran dari pihak pejabat pemerintah tersebut, namun pada hari pelaksanaannya ada prioritas lain yang harus dipenuhi para pejabat pemerintah sehingga mereka berhalangan hadir. Hal-hal seperti kurangnya persiapan di lapangan ini menjadi salah satu bagian yang perlu dievaluasi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya bisa diantisipasi terjadinya hal-hal tersebut. Lewat proses evaluasi ini dibangun sistem atau strategi implementasi serta monitoring kegiatan yang sesuai yang bisa juga dipakai oleh warga sendiri maupun komite proyek untuk melakukan pengawasan secara internal.

Saat ini program ADP masih terus berlangsung sampai dengan 2015 sehingga belum memasuki masa terminasi melainkan memasuki tahap transisi untuk bersiap-siap meninggalkan wilayah pendampingan. Dalam masa transisi ini, peran staf ADP sebagai pelaku perubahan mulai berangsur-angsur dikurangi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi komite proyek maupun mitra lainnya untuk ambil bagian dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan di lapangan. Secara bertahap juga intensitas proyek mulai dikurangi baik dari sisi besaran frekuensi kegiatan maupun wilayah pendampingan. Informasi tentang proses transisi ini juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait maupun warga dampingan sehingga pada waktunya program ADP diterminasi maka mereka diharapkan telah siap untuk meneruskan proses pemberdayaan yang telah dibangun di lapangan. Adapun seluruh proses pengelolaan program ADP tersebut merujuk kepada siklus manajemen program dan proyek WVI sebagaimana tertera pada bab 3 hal 75.

Berdasarkan pembahasan di atas maka tahapan kegiatan program yang dilakukan ADP tersebut mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Adi pada bab 2 hal 36 tentang pemberdayaan sebagai program yang melalui beberapa tahapan kegiatan.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Hambatan

Ife menyebutkan bahwa partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuh kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya maka semakin ideal kepemilikan masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan (bab 2 hal 46)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program, ADP Cilincing telah melibatkan warga dampingan mulai dari proses sosialisasi program dengan turut sertanya para kader memobilisasi warga untuk hadir dalam pertemuan (bab 4 hal 80). Pembentukan komite proyek yang anggotanya adalah perwakilan warga dari tiap Rw (bab 4 hal 84) yang terlibat secara aktif dalam melaksanakan baseline survey (bab 4 hal 87) maupun proses assessment (bab 4 hal 89). Demikian juga dalam tahapan penyusunan rencana intervensi program, tim ADP duduk bersama dengan komite proyek, warga dampingan dan para pemangku kepentingan merumuskan rencana program dan kegiatan proyek bersama-sama (bab 4 hal 91,95). Dalam tahapan implementasi (bab 4 hal 97), warga dampingan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik sebagai partisipan maupun pengelola kegiatan dan dalam tahap evaluasi (bab 4 hal 120), tim ADP juga memberikan ruang bagi warga untuk memberikan usulan dan masukan bagi ADP untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan agar kegiatan di masa mendatang bisa memberikan pencapaian yang lebih baik lagi.

Tim ADP nampaknya sangat menyadari pentingnya partisipasi warga dampingan dalam proses pemberdayaan sehingga secara sengaja dalam seluruh tahapan-tahapan programnya warga dampingan selalu diundang untuk turut ambil bagian. Sekalipun demikian tingkatan partisipasi dari warga dampingan sendiri menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda antara masing-masing kelompok. Pada kelompok kader PKK, kesediaan mereka di awal program untuk ambil bagian memobilisasi warga menghadiri pertemuan sosialisasi program dikarenakan mereka memahami bahwa tujuan dari program ADP adalah untuk menolong warga mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupannya ke arah yang lebih baik. Pemahaman ini membangun kesadaran para kader bahwa tanpa warga turut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan ADP maka tentu saja warga tersebut tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari

keberadaan program ADP tersebut. Hal ini yang mendorong para kader untuk memberikan informasi kepada warga tentang apa yang mau dilakukan oleh ADP maupun mengajak warga untuk hadir dalam pertemuan sosialisasi program ADP karena mereka menginginkan agar lebih banyak warga dapat ambil bagian menikmati manfaat dari keberadaan program ADP. Kader-kader tersebut mengalokasikan waktunya untuk mengumpulkan ibu-ibu agar dapat menjelaskan tentang program ADP di luar waktu pertemuan sosialisasi program yang dijadwalkan oleh tim ADP. Hal itu mereka lakukan tanpa mendapatkan imbalan apapun dari tim ADP. Dalam hal ini kesadaran para kader bahwa program ADP dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat melahirkan partisipasi aktif mereka.

Sementara pada warga sendiri, di awal program umumnya partisipasi mereka bersifat pasif dimana mereka datang ke pertemuan sosialisasi program untuk mendengarkan pemaparan dari tim ADP tentang rencana program dan kegiatan ADP. Ada yang datang mungkin karena sekedar memenuhi undangan, ada juga karena memang ingin tahu lebih jauh tentang apa yang akan dilakukan dalam program ADP terutama mereka yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari para kader. Bahkan ada juga yang datang ke pertemuan karena berharap dapat memperoleh barang atau uang karena beranggapan program ADP adalah semacam program bantuan sosial karitatif yang akan membagi-bagi sesuatu kepada masyarakat.

Saat pembentukan komite proyek, warga diminta untuk mengusulkan calon-calon pengurus dan anggota komite proyek. Dalam proses ini warga juga diminta oleh tim ADP untuk bersama-sama menetapkan kriteria bagi calon pengurus dan anggota komite proyek tersebut dan dalam hal ini partisipasi warga sudah mulai beranjak dari partisipasi pasif yang hanya menengarkan pemberitahuan atau partisipasi informatif yang menjawab pertanyaan untuk proyek menjadi lebih interaktif karena warga mulai memberikan masukan-masukan dan membahas bersama-sama kriteria yang dimaksud dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk memilih siapa di antara calon tersebut yang paling memenuhi kriteria sebagai anggota dan pengurus komite proyek. Dalam perjalanan waktu berikutnya dimana komite proyek sebagai mitra ADP juga turut berperan dalam merumuskan

rencana intervensi program dan ambil bagian dalam implementasi dan memonitoring pelaksanaan kegiatan memperlihatkan bahwa kemandirian mulai terbentuk pada komite proyek seperti pada contoh dimana komite proyek mengambil inisiatif untuk membangun gedung pertemuan Srikandi. Dalam proses pembangun gedung Srikandi ini terlihat dari bagaimana komite proyek melakukan perencanaan pembangunan, melakukan negosiasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan lahan dan memperoleh izin membangun pada lahan tersebut. Selanjutnya mereka mengupayakan tersedianya sumberdaya keuangan dan tenaga dengan mengajukan proposal kepada berbagai pihak sehingga akhirnya dapat mewujudkan berdirinya gedung pertemuan tersebut. Sekalipun mungkin dalam proses tersebut pihak ADP turut memberikan dukungan, namun terlihat bahwa kemandirian dan keberdayaan pada komite proyek terbentuk karena partisipasi aktif komite proyek dalam berbagai kegiatan pemberdayaan ADP dimana mereka bisa belajar bagaimana melakukan perencanaan, melaksanakan rencana-rencana tersebut dan penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan, membangun hubungan dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan lain-lain.

Pada kelompok kader kesehatan nampaknya memiliki intensitas partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan pemberdayaan ADP bila dibandingkan dengan kelompok dampingan pengembangan ekonomi. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kelompok kader kesehatan yang lebih besar dibandingkan kelompok dampingan ekonomi. Kader memiliki kegiatan yang sifatnya rutin seperti kegiatan posyandu maupun kelas ibu hamil yang disertai juga dengan pertemuan regular kader sebulan sekali. Hal ini barangkali juga dikarenakan isu kesehatan ibu dan anak tersebut sangat dekat dengan kepentingan Wahana Visi Indonesia yang fokus kepada anak sehingga ADP Cilincing memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan.

Sekalipun demikian, baik pada kelompok kader kesehatan maupun kelompok pengembangan ekonomi menunjukkan bahwa partisipasi warga dampingan yang terbangun sudah berada pada tingkatan partisipasi fungsional. Prety menyebutkan bahwa pada partisipasi fungsional, masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek dimana pada tahap awal masyarakat tergantung

kepada pihak luar tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya (bab 2 hal 49). Pada kelompok pengembangan ekonomi, hal ini terlihat dari awalnya keberadaan kelompok yang pembentukannya merupakan inisiatif tim ADP untuk mempermudah pendampingan setelah warga dampingan memperoleh kegiatan pelatihan keterampilan usaha. Setelah mereka dilatih, maka tim ADP menyediakan modal kerja awal berupa bahan baku sebagai stimulan untuk kelompok memulai usahanya. Dukungan berupa pelatihan lanjutan untuk pengembangan usaha turut difasilitasi tim ADP untuk membangun kapasitas kelompok dalam mengembangkan usahanya demikian juga akses kepada bantuan permodalan. Selain itu kesempatan pameran untuk menjajakan produk kelompok usaha diupayakan juga oleh ADP untuk keperluan pemasaran. Pada perjalanan waktu berikutnya, kelompok usaha yang harus mengusahakan sendiri modal kerja berupa bahan baku maupun tambahan peralatan dan permodalan. Anggota kelompok usaha juga secara aktif berusaha memasarkan produk-produknya kepada konsumen dengan menjual produk tersebut tidak saja melalui media standar seperti warung dan pasar tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan warga seperti arisan dan majelis taklim. Selain itu anggota kelompok juga secara aktif mencari kesempatan-kesempatan pameran UMKM yang difasilitasi pemerintah, korporasi maupun lembaga lainnya sebagai sarana pemasaran. Upaya yang dilakukan oleh anggota kelompok ini menunjukkan bahwa mereka secara bertahap mulai membangun kemandiriannya dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak ADP.

Sementara pada kelompok kader kesehatan, sesungguhnya keberadaan mereka sudah terlebih dahulu ada sebelum program ADP dimulai karena umumnya mereka adalah kader-kader PKK yang banyak terlibat dalam pelayanan posyandu. Melalui upaya penguatan kapasitas yang difasilitasi ADP membangun kemampuan dan keterampilan kader-kader tersebut sehingga kiprah mereka tidak sekedar dalam kegiatan posyandu tetapi para kader tersebut akhirnya menjadi rujukan warga dampingan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah-sakit dan mereka mampu melakukannya dengan baik. Partisipasi kader dalam kegiatan pemberdayaan ADP telah membangun kapasitas kader semakin terampil dalam merencanakan dan mengelola kegiatan posyandu sehingga beberapa di

antara kader tersebut akhirnya dipercayakan untuk melatih kader-kader lainnya maupun memfasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas. Masyarakat menjadikan kader sebagai tempat bertanya untuk hal-hal terkait kesehatan ibu anak serta kader juga dipercaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang menjadi hak warga Mereka mampu untuk membangun komunikasi maupun bernegosiasi dengan pihak-pihak yang menyediakan layanan kesehatan sehingga dapat menolong sesama warga yang membutuhkan. Di sini terlihat dengan semakin besarnya kapasitas yang dimiliki oleh kelompok kader mengakibatkan kemandirian mereka juga terus berkembang.

Kelompok kader kesehatan dalam hal ini kader PKK sudah eksis keberadaannya di wilayah dampingan sebelum program dimulai dan kelompok ini secara intens dilibatkan dalam seluruh kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP Cilincing di wilayah dampingan. Kader-kader kesehatan ini juga yang terlibat menjadi bagian dari komite proyek yang dibentuk di awal program ADP Hal ini menunjukkan bahwa ADP Cilincing telah mengupayakan untuk mengoptimalkan potensi maupun struktur kelembagaan yang sudah tersedia di lapangan, dalam hal ini adalah para kader kesehatan PKK untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan bahkan sejak program dimulai. Dengan melibatkan struktur yang sudah ada di masyarakat maka hal ini akan mendorong pula keterlibatan warga dalam kegiatan ADP, sebagaimana yang dikatakan oleh Ife bahwa masyarakat akan berpartisipasi bila didukung oleh struktur dan prosedur setempat (bab 2 hal 50). Keberadaan kader PKK diakui peran dan fungsinya di masyarakat oleh ADP sebagai agen penggerak masyarakat. ADP Cilincing menyadari keberadaannya sebagai tamu atau pendatang di wilayah Cilincing, sehingga sejak awal berusaha aktif melibatkan elemen masyarakat yang sudah ada seperti kader PKK.

Mengingat pentingnya partisipasi sebagai komponen membangun kesadaran dan pemberdayaan masyarakat maka penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor hambatan yang mempengaruhi warga untuk berpartisipasi. Faktor pendukung tersebut perlu terus diperkuat dan pada saat yang sama faktor hambatan diupayakan untuk diminimalisir sehingga partisipasi

masyarakat untuk mewujudkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dapat lebih dioptimalkan.

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Menurut Ife masyarakat akan berpartisipasi jika merasa kegiatan tersebut bermanfaat bagi mereka serta membuat perubahan dalam kehidupan mereka (bab 2 hal 50). Dari temuan pada bab 4 hal 136-138 menunjukkan bahwa pada kader kesehatan maupun anggota kelompok usaha yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ADP mengalami perubahan yang lebih baik pada kehidupan mereka yang ditandai dengan meningkatnya rasa percaya diri sehingga mereka mampu berkomunikasi dengan lebih baik di muka umum. Mereka menjadi lebih dihargai oleh warga lainnya karena kemampuan mereka menolong warga lainnya maupun karena pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Demikian juga terjadi perbaikan pada kondisi ekonomi anggota kelompok usaha, dimana yang bersangkutan sebelumnya menganggur dan saat ini telah memiliki usaha. Hasil dari kegiatan memberikan manfaat bagi warga dampingan.

Agar kegiatan ADP bermanfaat bagi warga dampingan, maka kegiatan tersebut harus dirancang untuk dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk merumuskan intervensi yang tepat atas permasalahan yang terjadi, maka perlu diidentifikasi dulu secara akurat apa permasalahan yang terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat. Untuk itu sumber utama informasi tentang apa sebenarnya masalah yang terjadi tentu saja harus berasal dari warga sendiri yang menghadapi masalah tersebut dan dikonfirmasi oleh pihak-pihak lain yang mengetahui yang dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan terkait.

Tim ADP nampaknya memahami akan pentingnya hal ini, sehingga informasi-informasi tentang permasalahan tersebut diupayakan diperoleh langsung dari warga dampingan melalui proses assesment yang melibatkan orang dewasa dan anak-anak. Informasi yang diperoleh dalam pertemuan tersebut menolong ADP dalam menyusun rencana intervensi program yang sesuai dengan permasalahan masyarakat yang ada sehingga hasilnya akan lebih tepat sasaran dan optimal memberikan manfaat. Akibat manfaat yang bisa dirasakan oleh warga dampingan tersebut akan mendorong mereka aktif terlibat dalam kegiatan ADP.

Disamping itu ADP selalu memberi ruang bagi warga dampingan maupun para pemangku kepentingan terkait untuk terlibat dan bisa memberikan masukan terhadap rencana intervensi tersebut, baik pada proses penyusunan rencana operasional tiga tahunan dan tahunan, pada pertemuan rutin kader membahas implementasi kegiatan kesehatan dan juga pada saat evaluasi. Diakomodirnya masukan-masukan dari warga dan para pemangku kepentingan tersebut oleh ADP membuat intervensi kegiatan di lapangan dapat terus disesuaikan dengan permasalahan aktual di masyarakat. Hal ini ditunjukkan juga dengan dokumen rancangan program dan proyek yang selalu diperbaharui setiap tiga tahun sekali. Melalui proses ini diharapkan intervensi program dapat bermanfaat maksimal bagi masyarakat dan mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik hal sehingga akan mendorong warga dampingan untuk lebih aktif berpartisipasi. Oleh karena itu upaya melibatkan warga dampingan dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam seluruh tahapan program serta kesediaan tim ADP untuk menerima masukan dari pihak-pihak tersebut menjadi faktor pendukung utama terjadinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ADP. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ite bahwa masyarakat akan berpartisipasi bila diberikan kesempatan dan didukung untuk berpartisipasi (bab 2 hal 50). Kesempatan berpartisipasi itu dibuka juga oleh ADP melalui komite proyek yang selanjutnya berkembang menjadi Program Masyarakat Cilincing dimana lembaga ini menjadi sarana atau media lokal yang mawadahi aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media partisipasi.

Adanya manfaat dan perubahan yang dilihat oleh para pemangku kepentingan pada kelompok dampingan ADP juga menyebabkan dukungan diberikan oleh pihak Rt dan Rw pada pelaksanaan kegiatan ADP dalam bentuk mendorong warga untuk terlibat dan mengoptimalkan manfaat dari kegiatan-kegiatan ADP sebagaimana tercantum dalam bab 4 hal 138. Apa yang dilakukan oleh para ketua Rt dan Rw ini turut menjadi faktor pendukung partisipasi eksternal yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo bahwa adanya pemimpin dan kualitas kepemimpinan yang mendukung menjadi faktor yang mendukung partisipasi (bab 2 hal 51). Para pemimpin masyarakat baik formal maupun non-formal memiliki pengaruh dalam

menggerakkan masyarakat di wilayahnya. Upaya tim ADP untuk selalu membuat pimpinan masyarakat seperti ketua Rt dan Rw ini terpapar dengan informasi kegiatan maupun pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan serta memberikan kesempatan juga bagi pimpinan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan atas kegiatan program menunjukkan bahwa ADP menghargai keberadaan struktur yang ada di masyarakat dan menyadari bahwa dukungan struktur ini akan mendorong partisipasi dari masyarakat. Sebagaimana Ife menyatakan bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika didukung oleh struktur dan prosedur (bab 2 hal 51). Dari sisi warga dampingan sendiri, kesediaan mereka untuk terlibat dalam kegiatan salah satunya oleh karena merasakan adanya manfaat yang bisa diperoleh dari keterlibatan mereka dalam kegiatan pemberdayaan ADP. Watson dalam Adi menyebutkan bahwa seseorang akan cenderung mengulangi suatu tindakan apabila tindakan itu memberikan hasil yang memuaskan bagi dirinya (bab 2 hal 43). Faktor mentalitas individu ini sangat mempengaruhi kemauan seseorang dalam melakukan tindakan-tindakannya. Apalagi pada masyarakat perkotaan yang sibuk dan cenderung untuk selalu mempergunakan prinsip ekonomi dalam menetapkan tindakan-tindakan yang dilakukannya, maka sebelum memutuskan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu hal maka dia akan mempertimbangkan apa untung-ruginya kegiatan tersebut bagi dia. Tanpa adanya keuntungan atau manfaat yang bisa dirasakan baik itu berupa materi, kesenangan atau perubahan kehidupan yang lebih baik, maka kecil kemungkinan dia akan bersedia mengalokasikan waktunya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Mengingat kondisi antara warga dampingan yang satu berbeda dengan lainnya, Ife juga menyatakan bahwa akan ada perbedaan tingkat partisipasi di antara warga terhadap kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di wilayahnya (bab 2 hal 50). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, minat maupun keterampilan yang dimiliki warga tersebut. Pada bab 4 hal 108 ditemukan adanya warga yang terlibat aktif tidak hanya di kegiatan kesehatan tetapi juga di kegiatan pengembangan ekonomi. Partisipasi aktif yang bersangkutan dimungkinkan misalnya oleh karena ketersediaan waktu yang memadai sehingga dia dapat mengikuti seluruh kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi oleh ADP. Atau yang bersangkutan memang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar demi

meningkatkan kapasitas dirinya. Hal ini juga berlaku untuk kondisi sebaliknya, dimana karena kesibukan urusan rumah-tangga atau pekerjaan, sementara waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang dimiliki warga atau warga tidak ingin kehilangan pendapatannya menyebabkan warga yang bersangkutan tidak bisa terlibat aktif dalam kegiatan.

Tim ADP juga secara aktif selalu menyampaikan rencana kegiatan maupun pencapaian-pencapaiannya kepada warga dampingan dalam berbagai kesempatan sembari mengajak warga untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Adanya penyampaian yang terus menerus ini mengakibatkan warga menjadi paham dan mengerti tentang apa yang akan dilakukan oleh ADP melalui kegiatan pemberdayaannya yakni tersedianya akses, kesempatan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri dan kelompoknya. Adanya akses kepada sumberdaya yang diperlukan, terbukanya kesempatan dan peluang serta tersedianya sarana yang memadai ini akan menolong warga dalam upaya mewujudkan perubahan-perubahan yang diinginkannya. Hal ini turut juga menjadi faktor yang mendukung warga untuk terlibat dan pada saat yang sama menjadi faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari upaya pemberdayaan sebagaimana disampaikan oleh Suharto bahwa pemberdayaan masyarakat meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses dan sarana mengembangkan diri dan kelompoknya dan hal itu hanya bisa dicapai lewat keterlibatan dalam upaya pemberdayaan (bab 2 hal 41)

4.2.2.2 Faktor Penghambat

Di masa awal kegiatan ADP dimulai, disebutkan juga bahwa isu kristenisasi turut mempengaruhi kesediaan warga untuk berpartisipasi. Isu ini muncul terkait dengan identitas organisasi sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang berbasis nilai-nilai kristiani. Ada kekhawatiran dan kecurigaan dari warga bahwa program ADP ini memiliki misi dakwah apalagi dalam program ADP ada kegiatan perekrutan anak dampingan atau wakil anak (bab 4 hal 140). Kondisi ini yang disebutkan Watson dalam Adi menjadi salah satu faktor hambatan yang berasal dari sistem sosial di mana terjadi penolakan kepada orang luar karena merasa terganggu atau curiga kepada orang asing yang menjadi agen perubahan

(bab2 hal 43). Hal ini menjadi faktor hambatan eksternal yang berasal dari warga dampingan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ADP.

Tim ADP sebagai orang luar yang masuk dalam suatu komunitas maka konsekwensi yang harus siap dihadapi adalah semua yang dilakukannya akan diamat-amati oleh warga. Warga sendiri berkepentingan agar kehadiran orang asing dalam komunitasnya tidak memberikan dampak buruk. Karena itu kejelasan tentang identitas, apa yang mau dilakukan, bagaimana melakukannya harus sampai dengan baik kepada warga sebagai tuan rumah. Demikian juga bila ada kesalahpahaman yang terjadi mesti segera diluruskan sebagaimana isu kristenisasi ini. Hubungan yang baik dengan tokoh kunci di masyarakat, apakah itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat dapat menjadi mediator bila hal-hal seperti ini terjadi. Terkait dengan isu ini maka tim ADP melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat sehingga akhirnya kesalahpahaman tersebut dapat diselesaikan. Dengan berjalannya waktu, warga dampingan dapat melihat bahwa tidak ada misi agama dalam kegiatan yang dilakukan oleh ADP sehingga kecurigaan akan adanya misi agama dapat terkikis dan warga bersedia untuk ambil bagian dalam program pemberdayaan yang berlangsung di lapangan.

Sebagaimana disebutkan dalam bab 4 hal 141, masih ada warga yang mengharapkan program ADP ini menyediakan bantuan yang sifatnya langsung dalam bentuk barang ataupun uang. Tetapi hal ini tidak bisa dipenuhi oleh ADP karena pendekatan pemberdayaan yang menjadi acuan dalam implementasi program ADP bukan pendekatan karitatif. Hal ini dikarenakan masih adanya pemahaman di masyarakat bahwa program bantuan tersebut selalu bersifat karitatif di mana pihak penyelenggara program akan membagi-bagikan sesuatu kepada masyarakat sasaran. Di samping itu juga masih adanya praktek-praktek pemberian uang 'duduk' atau uang transport bila mengikuti kegiatan-kegiatan di lembaga pemerintahan, menyebabkan adanya warga yang menuntut imbalan untuk kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan yang difasilitasi ADP. Kegiatan-kegiatan ADP sendiri lebih banyak berfokus kepada upaya penguatan kapasitas dan dalam implementasi tindak-lanjut pelatihanpun sangat membatasi pemberian bantuan yang berbentuk barang apalagi uang. Khususnya dalam

kegiatan pengembangan ekonomi, dukungan yang disediakan ADP dalam bentuk barang modal lebih bersifat sebagai pemicu saja untuk kelompok bisa memulai usahanya dan mendorong warga sendiri mengupayakan penyediaan kebutuhan lainnya. Kondisi ini menyebabkan ada warga masyarakat yang akhirnya tidak meneruskan partisipasinya dalam kegiatan karena merasa dukungan yang disediakan oleh ADP tidak seperti yang diharapkannya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ife bahwa adanya aturan dari organisasi yang menyebabkan perbedaan antara apa yang mau dicapai oleh organisasi dengan harapan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap partisipasi warga (bab 2 hal 51). Dari uraian di atas ini ada dua hal yang kiranya menjadi faktor hambatan berpartisipasi yakni yang berasal dari warga dampingan yaitu adanya harapan dari warga dampingan untuk mendapatkan bantuan langsung dari organisasi sebagai imbalan atas keterlibatannya dan faktor hambatan dari internal organisasi yakni adanya aturan organisasi yang tidak bisa memenuhi harapan warga di atas tersebut.

Dari sisi warga dampingan sendiri, maka faktor yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemberdayaan adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam bab 4 hal 141 yakni keterbatasan waktu warga dampingan untuk bisa mengikuti kegiatan ADP karena kesibukan urusan rumah tangga dan pekerjaan. Kebanyakan anggota kelompok kader dan pengembangan ekonomi terdiri dari ibu-ibu maka kesibukan rumah tangga dan mengurus anak sering menjadi alasan warga untuk tidak bisa ambil bagian dalam kegiatan ADP. Ada juga ibu-ibu warga dampingan yang juga harus terlibat mencari nafkah bagi keluarganya, maka bila mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh ADP menyebabkan yang bersangkutan tidak bekerja dan sebagai akibatnya tidak mendapatkan penghasilan di hari tersebut. Sementara pada saat yang sama ADP tidak memberikan penggantian biaya untuk menutup kehilangan pendapatan karena mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Alasan ibu-ibu tersebut dapat dipahami karena dengan kondisi rumah tangga mereka yang berkekurangan, maka mereka harus turut juga mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan hal ini menjadi prioritas bagi mereka dibandingkan mengikuti kegiatan ADP. Dalam situasi ini kembali lagi adanya aturan organisasi yang menyebabkan perbedaan

antara apa yang mau dicapai oleh organisasi dengan harapan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap partisipasi warga sebagaimana yang disampaikan oleh Iffendi dalam bab 2 hal 51.

Selain itu ada juga kondisi mentalitas individu yang turut mempengaruhi kesediaan mereka berpartisipasi yakni merasa tidak yakin bisa mengikuti kegiatan karena dirasakan terlalu rumit (bab 4 hal 141). Hal ini kebanyakan terjadi pada kegiatan pelatihan pengembangan ekonomi dimana warga dampeding diajar untuk melakukan analisa kelayakan usaha, pembukuan sederhana dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Kondisi mentalitas berupa rasa tidak percaya diri ini yang membuat seseorang tidak meyakini akan potensi dan kemampuan dirinya dan akhirnya menghambat dirinya berkembang atau berubah ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat yang berasal dari mentalitas individu sebagaimana yang disampaikan oleh Watson dalam Adi pada bab 2 hal 43 maupun yang disampaikan Lewis dalam Suparlan pada bab 2 hal 24 bahwa salah satu ciri-ciri utama pada individu yang mengalami kemiskinan kultural di perkotaan adalah kuatnya perasaan tak berharga dan tak berdaya yang mengakibatkan rasa rendah diri.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan, Studi Deskriptif Program Pengembangan Wilayah (ADP) Wahana Visi Indonesia di kelurahan Cilincing Jakarta Utara ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana proses pemberdayaan dilaksanakan kepada warga sasaran khususnya kepada kelompok dampingan (di bidang kesehatan dan peningkatan ekonomi) serta mendeskripsikan dan menganalisis hal apa saja yang mendukung dan menghambat keterlibatan kelompok dampingan tersebut dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, berikut adalah beberapa hal yang menjadi kesimpulan yakni :

5.1.1 Upaya Pemberdayaan kepada Kelompok Dampingan

ADP Cilincing dalam melakukan proses pemberdayaan kepada kelompok dampingan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut yakni

- a. Tahap persiapan program yang terdiri atas proses penyampaian identitas organisasi Wahana Visi Indonesia dan rencana program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah dampingan serta pembentukan komite proyek. Proses penyampaian informasi ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan diri organisasi serta membangun hubungan antara Wahana Visi Indonesia dengan warga dampingan serta para pemangku kepentingan di wilayah dampingan. Dalam proses ini tim ADP sudah melibatkan kader-kader PKK untuk memobilisasi kehadiran warga dalam pertemuan sosialisasi tersebut. Tim ADP melihat keberadaan kader PKK tersebut sebagai potensi untuk keberlanjutan program setelah ADP selesai dan meninggalkan wilayah dampingan. Langkah berikutnya adalah memfasilitasi pembentukan komite proyek yang beranggotakan tokoh masyarakat setempat, kader maupun warga biasa dari setiap Rw dampingan. Komite proyek ini mewedahi aspirasi dan masukan warga dampingan

terhadap program ADP dan kegiatannya berperan sebagai mitra ADP Cilincing dalam melakukan proses pemberdayaan di lapangan sekaligus kelak akan meneruskan apa yang sudah dibangun bersama-sama dengan warga dampingan selama ini agar manfaat dari pemberdayaan serta perubahan yang terjadi akibat pemberdayaan tersebut bisa terus berkelanjutan.

- b. Tahap assessment atau kajian terhadap permasalahan dan potensi sumber daya warga dampingan dilakukan setelah tahap persiapan lapangan. Tim ADP melakukan survey kondisi awal (baseline survey) bersama-sama dengan komite proyek untuk mendapatkan gambaran awal dari kondisi masyarakat kelurahan Cilincing terkait dengan isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hasil survey ini kemudian didalami dengan melakukan pemetaan masalah dan potensi sumberdaya masyarakat yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak sebagai narasumbernya dan dilakukan di setiap Rw dengan metode PLA. Hasil assessment ini menjadi input bagi tahap perumusan rencana intervensi.
- c. Tahap perumusan rencana intervensi yang dilakukan tim ADP terdiri atas dua bagian yakni pertama menyusun rancangan program tiga tahunan yang disebut sebagai dokumen desain program / proyek (*Program / project design document – PPDD*). Perumusan PPDD ini dilakukan bersama-sama dengan komite proyek dan perwakilan pemangku kepentingan setempat. PPDD tersebut berisikan logframe dari setiap kegiatan proyek yang akan dilakukan oleh tim ADP dalam periode tiga tahun. Kedua, berdasarkan PPDD tersebut selanjutnya disusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional tahunan dirumuskan bersama-sama warga dampingan pada setiap pertengahan tahun setelah tim ADP menyelesaikan implementasi lapangan pada semester pertama.
- d. Tahap implementasi merupakan tahap dimana rencana operasional tahunan diimplementasikan di lapangan oleh tim ADP. Umumnya kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas warga dampingan dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun kegiatan pendampingan untuk menindaklanjuti pelatihan-pelatihan tersebut. Dalam tahap implementasi ini tim ADP turut

melibatkan ketua Rw atau Rt setempat untuk merekomendasikan para peserta kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan tersebut. Selain memperkuat potensi dan sumberdaya yang dimiliki warga dampingan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, tim ADP juga menghubungkan mereka dengan pihak-pihak lainnya yang dapat mendukung terciptanya peluang-peluang maupun mewujudkan perubahan pada kehidupan mereka. Upaya pemberdayaan ADP dengan pendekatan kelompok menolong warga dampingan untuk bisa saling menolong dan bekerjasama untuk membangun daya dan potensi yang ada pada mereka dalam rangka mewujudkan perubahan. Saling berbagi pengalaman maupun peran dalam kelompok menolong warga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam implementasi kegiatan di lapangan. Pada kelompok kader kesehatan, tim ADP bekerjasama erat dengan pihak puskesmas maupun PKK setempat dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut. Melalui proyek CVA (Citizen Voice and Action) yang merupakan proyek advokasi kesehatan, tim ADP juga memperlengkapi warga dampingan untuk dapat memperjuangkan hak-haknya memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Hal ini menjadi upaya ADP untuk melindungi kelompok yang lemah yakni masyarakat miskin di kelurahan Cilincing agar mereka dapat menikmati akses pada layanan kesehatan yang seharusnya disediakan oleh pihak pemerintah. Sementara pada kelompok usaha pengembangan ekonomi: tim ADP memulai pemberdayaan pada warga dampingan dengan melakukan survey pasar untuk menetapkan jenis usaha yang akan dikembangkan. Selanjutnya warga diikutsertakan dalam pelatihan keterampilan usaha dan pengembangannya sesuai dengan jenis usaha yang diminati. Untuk memudahkan pemberian dukungan kepada warga dampingan tersebut maka mereka dikelompokkan berdasarkan jenis usaha maupun kedekatan lokasi tempat tinggal anggota. Akses terhadap bantuan permodalan untuk pengembangan usaha kelompok juga difasilitasi oleh tim ADP dengan menghubungkan anggota kelompok usaha dengan PT Vision Fund maupun lewat mekanisme kelompok simpan pinjam ASCA. Adapun produk dari

kelompok usaha saat ini masih dipasarkan di lingkungan sekitar kelompok dampingan dan tim ADP membantu pemasarannya lewat kegiatan-kegiatan pameran yang diikuti oleh kelompok usaha tersebut.

- e. Dalam proses perencanaan dan implementasi kegiatan ADP, temuan penelitian menunjukkan bahwa tim ADP telah mengupayakan terciptanya suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan diakomodirnya pendapat dan masukan warga terhadap rencana dan implementasi kegiatan ADP. Warga didorong untuk berani menyatakan pandangan-pandangannya dalam pertemuan-pertemuan yang difasilitasi ADP sehingga memberikan ruang bagi potensi diri maupun kelompoknya dimunculkan. Pada saat yang sama, warga dampingan disadarkan akan potensi yang dimilikinya yang bisa dikembangkan bersama-sama untuk mewujudkan perubahan pada diri mereka.
- f. Tahap evaluasi, dimana secara berkala tim ADP melakukan evaluasi atas pencapaian yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional tahunan dilaksanakan pada setiap akhir semester sementara untuk rancangan program tiga tahunan dilakukan setiap tiga tahun sekali. Dalam hal ini ADP telah melakukan evaluasi atas rancangan program tiga tahunan pada tahun 2006, 2009 dan 2012. Saat ini ADP bersiap memasuki periode tiga tahun terakhir dalam implementasi programnya di Cilincing sebelum pada akhir 2015 mengakhiri programnya.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Warga

Dari hasil temuan lapangan maka faktor-faktor yang mendukung keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan ADP Cilincing berasal dari internal dan eksternal organisasi yakni :

- a. Internal organisasi
 - o Upaya ADP untuk mengusahakan keterlibatan warga dampingan dengan sengaja dalam seluruh tahapan program pemberdayaan. Ini dilakukan dengan mengundang semua pihak terlibat dan bekerjasama dengan kader PKK maupun para ketua Rt dan Rw untuk memobilisasi

kehadiran warga dampingan dalam pertemuan-pertemuan kegiatan ADP.

- Adanya kebijakan organisasi yang mengarahkan tim ADP untuk memberi ruang bagi warga dampingan memberikan pendapat dan masukan-masukannya atas rencana kegiatan dan implementasinya di lapangan. Pendapat dan masukan-masukan tersebut diakomodir oleh ADP untuk terus meningkatkan kualitas program dan pendampingannya di lapangan.
 - Adanya upaya penyampaian informasi tentang program dan kegiatan ADP kepada warga dampingan secara terus-menerus oleh tim ADP baik melalui pertemuan formal maupun informal.
- b. Eksternal organisasi
- Upaya penyampaian informasi sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan warga dampingan memperoleh pemahaman dan kejelasan tentang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP. Adanya kejelasan tentang tujuan program, serta manfaat yang dirasakan warga dampingan dari mengikuti kegiatan tersebut membuat mereka bersedia untuk terlibat aktif dalam kegiatan ADP.
 - Adanya dukungan dari ketua Rt dan Rw dalam menentukan partisipan dari kegiatan-kegiatan ADP maupun memonitor keterlibatan warganya dalam kegiatan tersebut juga menjadi faktor yang mendorong warga dampingan untuk bersedia terlibat.

Adapun faktor yang dianggap menghambat keterlibatan warga dalam kegiatan ADP adalah sebagai berikut:

- a. Internal organisasi
- Adanya kegiatan ADP yang menuntut peserta untuk mengikuti proses yang cukup rumit seperti mengolah data dan kalkulasi, misalnya pada pelatihan analisa kelayakan usaha, pembukuan atau pengelolaan ekonomi rumah tangga membuat warga dampingan ada yang enggan untuk terlibat.

- Adanya aturan yang berlaku di dalam organisasi yang tidak dapat memberikan bantuan langsung dari program dalam bentuk uang maupun barang sebagai imbalan atas keterlibatan warga dalam kegiatan ADP membuat sejumlah warga tidak bersedia terlibat.
- b. Eksternal organisasi
- Adanya kekhawatiran warga bahwa program ADP memiliki agenda misi dakwah sempat membuat warga tidak bersedia untuk ambil bagian dalam kegiatan ADP khususnya pada saat awal program ADP dimulai.
 - Kesibukan warga dampingan dalam melakukan urusan rumah-tangga maupun pekerjaannya sehari-hari menjadi kendala bagi mereka untuk bisa terlibat dalam kegiatan ADP.

5.2 Saran

Adapun saran untuk ADP Cilincing dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan kepada kelompok dampingan serta mengurangi hambatan bagi warga untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ADP adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan temuan penelitian pada hal 132, tim ADP sejauh ini sudah selalu berupaya untuk melibatkan warga masyarakat, komite proyek dan para pemangku kepentingan setempat dalam memberikan masukan-masukan maupun ambil bagian dalam implementasi program dan kegiatan ADP. Khususnya komite proyek yang sekarang telah menjadi Program Masyarakat Cilincing (PMC), sedari awal sudah terlibat dalam berbagai proses di lapangan seperti menyampaikan informasi program dan kegiatan kepada warga masyarakat, memobilisasi warga untuk ambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan sampai dengan duduk bersama tim ADP dalam merumuskan rencana kegiatan ADP. Mempertimbangkan ADP saat ini sedang memasuki fase transisi dimana dalam tiga tahun mendatang akan menyelesaikan pendampingannya di Cilincing, maka di fase transisi ini peran dan porsi keterlibatan PMC di dalam ADP dapat lebih ditingkatkan dari fase sebelumnya dengan cara:

- PMC diberi kepercayaan untuk mengelola sepenuhnya suatu kegiatan di lapangan, sebagai contoh kegiatan pelatihan kader posyandu.
- Mulai dari menetapkan kebutuhan materi pelatihan, mencari tenaga fasilitator dari puskesmas setempat, mencari tempat untuk pelaksanaan kegiatan, sampai dengan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan oleh PMC sendiri. Dalam seluruh proses ini staf lapangan ADP akan bertindak sebagai pendamping teknis mendukung langkah-langkah yang dilakukan PMC.
- Secara bertahap dukungan kontribusi dana dari program ADP untuk kegiatan yang dikelola PMC tersebut mulai dikurangi dan PMC mengupayakan pendanaan tersebut baik secara swadaya antar warga dampingan dan tokoh masyarakat setempat ataupun mengajukan proposal kepada pihak pemangku kepentingan setempat baik dari pemerintah ataupun dunia usaha yang beroperasi di sekitar wilayah Cilincing.
- Tim ADP sendiri dapat lebih intensif menghubungkan PMC dengan korporasi yang beroperasi di sekitar wilayah dampingan agar fungsi tanggungjawab sosial korporasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh PMC untuk mendukung kegiatan yang dikelola oleh PMC.
- Selama ini PMC sudah cukup dikenal oleh pemerintahan lokal pada tingkatan kelurahan dan kecamatan Cilincing sebagai salah satu kelompok swadaya masyarakat yang peduli terhadap kondisi warga kurang mampu di Cilincing. Untuk itu PMC juga difasilitasi oleh tim ADP untuk lebih intensif membangun hubungan dengan pihak pemerintah lokal di tingkat pemerintah administrative kota administrasi Jakarta Utara maupun dengan suku dinas terkait agar mampu mengakses dukungan sumberdaya dari program pemerintah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan warga di wilayah Cilincing. Hal ini dilakukan dalam rangka memandirikan PMC dan memampukan PMC untuk menjadi pelaku perubahan di masyarakat.

- b. Mempertimbangkan kondisi kelompok usaha dampingan ADP yang belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana tercantum dalam hal 117, maka hal-hal berikut disarankan untuk dilakukan yaitu:
- Tim ADP perlu lebih intensif melakukan pendampingannya kepada kelompok usaha tersebut. Staf lapangan ADP perlu melakukan pertemuan dan kunjungan rutin kepada kelompok usaha dampingan tersebut untuk memberikan dukungan teknis dan motivasi kepada para pelaku usaha kecil tersebut untuk terus mengembangkan usahanya.
 - Para pelaku usaha kecil tersebut dapat dipertemukan dengan pelaku usaha kecil lainnya yang telah berhasil mengembangkan usahanya sehingga menginspirasi para pelaku usaha dampingan ADP tersebut.
 - Produk makanan ringan maupun kerajinan tangan dari kelompok usaha difasilitasi sedemikian rupa oleh tim ADP untuk memenuhi standar industri rumah tangga yang berlaku sehingga pemasaran produknya bisa masuk ke dalam jaringan retail pemasaran seperti Alfamart, Indomart atau Carefour
 - Staf lapangan ADP yang mendampingi kelompok usaha tersebut tentu saja harus memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam hal pengelolaan dan pengembangan usaha sehingga dapat optimal menolong kelompok mengembangkan usahanya.
- c. Untuk meminimalkan faktor penghambat partisipasi warga dampingan maka dalam perencanaan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam hal 134-135 maka:
- Tim ADP dapat mempertimbangkan tentang kesesuaian waktu penyelenggaraan kegiatan dengan kesibukan warga. Misalnya kegiatan dengan target partisipan adalah ibu-ibu rumah tangga, maka waktu penyelenggaraan kegiatan ADP dilakukan pada siang atau sore hari setelah ibu-ibu tersebut menyelesaikan tugas rumah-tangganya.
 - Sementara untuk warga dampingan yang berminat untuk ambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan ADP namun sulit untuk bisa mengikutinya karena harus mencari nafkah, maka tim ADP dapat mempertimbangkan waktu penyelenggaraan kegiatan dilakukan pada sore atau malam hari.

- Kegiatan pelatihan yang difasilitasi ADP dirancang sedemikian rupa metode pelaksanaannya sehingga warga dengan pendidikan terbatas juga masih bisa mengikutinya dan tidak merasakan kegiatan ADP terlalu rumit untuk diikuti.

Adapun saran bagi Wahana Visi Indonesia adalah membangun upaya kemitraan dengan lembaga setempat sejak awal program dimulai, sebagaimana ADP Cilincing yang sedari awal program telah menggandeng kader PKK dapat menjadi model bagi program pemberdayaan lainnya yang akan berlangsung di wilayah layanan Wahana Visi Indonesia lainnya. Sejak organisasi berencana untuk memasuki suatu wilayah dampingan baru, maka pemetaan dan analisa terhadap profil lembaga-lembaga lokal yang sudah bekerja di wilayah dampingan baru sudah dilakukan. Lembaga lokal yang potensial sebagai mitra tersebut sudah digandeng bersama saat Wahana Visi Indonesia mulai memperkenalkan diri dan rencana programnya. Dalam hal ini, misalnya bila PKK cukup aktif melakukan kegiatannya di wilayah tersebut, maka kader-kader PKK menjadi prioritas pilihan untuk bekerjasama, terlebih lagi bila isu kesehatan ibu dan anak yang akan diusung oleh program WVI tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Alston, M. &. (1998). *Research for Sosial Workers ; An Introduction to Methods* . NSW: Allen & Unwin

Freire, P. (1973). *Education for Critical Consciousness*. New York: Continuum Publishing Company.

Friedmann, J. (1992). *Empowerment ; The Politic of Alternatif Development* . Cambridge: Blackwel.

Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat ; Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.

Hutchison, E. (2003). *Dimension of Human Behaviour ; Person and Environment 2nd edition*. Thousand Oaks: Sage.

Ife, J. (2006). *Community Development; community based alternatif in age of globalisation 3rd ed*. NSW: New Pearson.

Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat ; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

Kirst-Ashman, K. (2008). *Human Behavior, Communities, Organization and Groups in the Macro Sosial Environment, 2nd edition* . Belmont, CA: Thomson.

Korten, D. C. (2001). *Menuju Abad ke 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global (terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Maning, C. & Noor, T. (1985). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1989). *Designing Qualittative Research*. Newbury Park California: Sage.

Midgley, J. (1995). *Sosial Development: The Development Perspective in Sosial Welfare*. London: Sage Publikation Ltd.

Mikkelsen, B. (2005). *Methods for Development Workd and Research 2nd ed*.

- Mikkelsen, B.(2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan ; sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan (penterjemah : Matheos Nalle) ed 3*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Neuman, W. L. (2006). *Sosial Research Methods; Quantitative and Qualitative Approaches 6th ed*. Boston: Pearson International Edition.
- Pretty, J. N. (1995). *Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance*. London: Earthscan.
- Prijono, O.P.& Pranarka, A.W. (1996). *Pemberdayaan ; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rubin, A., & Babbie, E. (2001). *Research Method for The Sosial Work*. Toronto: Wad Sworth Thompson Learning.
- Sastropoetro, S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi ; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial ; Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shera, W., & Wells, L. M. (1999). *Empowerment practice in Sosial Work ; Developing Richer Conceptual Frameworks*. Toronto: Canadian Scholars Press Inc.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spicker, P., Leguizamon, S. A., & Gordon, D. (2006). *Poverty, An International Glossary*. Zed Books.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G., Santoso, B., & Maiwan, M. (1999). *Kemiskinan ; Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC.
- Suparlan, P. (1993). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjokroamidjojo, B. (1993). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta.
- Walgito, B. (2007). *Psikologi Kelompok*. Yogyakarta: Andi.
- Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Zastrow, C. (2006). *Social Works With Groups ; A Comprehensive Workbook, 6th edition*. Belmont, CA: Thomson Brooks / Cole.

Dokumen Lembaga :

Wahana Visi Indonesia. (2003). *Laporan Kuartal II ADP Cilincing FY03*. Jakarta: WVI

Wahana Visi Indonesia. (2005). *Transformational Development Index (TDI) Survey Cilincing*. Jakarta: WVI.

Wahana Visi Indonesia. (2008). *Transformational Development Index (TDI) Survey Cilincing*. Jakarta: WVI

Wahana Visi Indonesia (2012). *Laporan Tengah Tahun ADP Cilincing FY12*. Jakarta: WVI

Jurnal, Artikel, Laporan :

BAPPEDA DKI Jakarta. (2011). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2012 Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta.

Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Administratif Jakarta Utara (2012) *Cilincing dalam Angka 2011*. Jakarta : BPS Jakarta Utara

Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jaya. (2012, April 1). *Informasi Statistik DKI Jaya Maret 2012*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jaya.

Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jaya. (2010, June 30). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah DKI Jakarta*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jaya.

INFID. (2012). *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pembangunan Fisik?*. Jakarta; INFID

Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. *American Journal of Occupational Therapy* , 214-222.

Markum, E. (2009). Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial . *Jurnal Psikobuana Vol I ISSN 2085 - 4242* , 1-12.

Mercy Corps. (2008). *Urban Poverty Reduction Strategy*. Jakarta: Mercy Corps.

Mirah Sakethi. (2010). *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Mirah Sakethi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2010). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2010*. Jakarta.

Satterthwaite. (2001). Reducing Urban Poverty: Constrains on the Effectiveness of Aid Agencies and Development Banks and Suggestion for Change” . *Environment & Urbanization*, vol 13 , 137-157.

SMERU. (2011). *Monitoring Rumah Tangga Sasaran Penerima Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat / Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.

UKM Center FE-UI (2006). *Laporan Akhir Evaluasi PPMK Provinsi DKI Jakarta 2001 – 2005*. Jakarta

United Nations, P. D. (2005). *World Urbanization Prospects : The 2003 Revisions*. New York: UN.

Website :

Yustiana, N.I. (2006, Mei). *Biar bopeng dan kejam, Jakarta tetap magnet*. 18 November 2011. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/18/Fokus/1823142.html>

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (n.d). *Instrument Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 18 November 2011. <http://www.tnp2k.org/kebijakan/instrument-percepatan.html>

Lampiran 1. Panduan Wawancara Informan

- A. Informasi tentang program dan kegiatan ADP Cilincing
1. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan informan di dalamnya ?
 2. Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP (mulai tahap persiapan, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi) dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.
- B. Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga sasaran dalam program ADP Cilincing
1. Hal-hal apa yang membuat warga sasaran bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ADP dan mengapa ?
 2. Apa saja kondisi internal dan eksternal ADP yang mempengaruhi kesediaan warga berpartisipasi ?
 3. Hal-hal apa yang membuat warga sasaran tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan ADP dan mengapa ?
 4. Apa saja kondisi internal dan eksternal ADP yang membuat warga tidak dapat berpartisipasi ?

Lampiran 2. Ringkasan Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : Yac, Program Manager ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
<p>Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?</p>	<p>Saya bergabung dengan ADP Cilincing Oktober 2010 sebagai program manager. Ada 4 project yang kita lakukan, pertama nutrisi, kedua hiv aids, ketiga pengembangan ekonomi, project dari wvi sendiri sponsorship.</p> <p>Masing-masing proyek memiliki target dampingan seperti kesehatan ibu dan anak maka khususnya anak balita serta ibu-ibunya atau pengasuh menjadi target dampingan selain kepada para kader PKK di posyandu atau kader yang mendampingi kelas ibu hamil. Kalo bicara tentang nutrisi itu, memang isunya adalah bagaimana meningkatkan nutrisi anak balita, jadi memang target usianya 0-5 tahun, proyek ini sendiri targetnya penguatan kapasitas posyandu juga ada kelas ibu hamil, juga ada peningkatan kapasitas kader.</p> <p>Kalau bicara proyek pengembangan ekonomi, kita ada 2 sasaran; yang pertama adalah bagaimana masyarakat memberi kesempatan untuk bisa mengakses ke pekerjaan, yang kedua bagaimana masyarakat bisa melakukan usaha sendiri atau wiraswasta. Kalau bicara tentang bagaimana mengakses ke pekerjaan, selain lewat peningkatan kapasitas, itu juga ada pemberian beasiswa dengan program diploma 1, terus kalau seandainya bicara kesempatan membuka usaha itu kita memakai survey pasar untuk menentukan jenis usaha yang akan didampingi ADP. Hasil survey pasar waktu itu menyebutkan produk makanan dan kerajinan tangan. Ada pelatihan-pelatihannya untuk pengembangan kapasitas juga dengan pendampingan masyarakat khusus untuk memulai bisnis.</p> <p>Terus kalau yang ketiga, proyek hiv aids itu sebenarnya preventif ke anak-anak supaya tidak terpapar dengan hiv adis dan juga narkoba. Kalau kegiatannya sendiri dilakukan dengan kegiatan-kegiatan positif lewat anak, itu kegiatan kelompok belajar anak (KBA) juga ada pembentukan forum anak, dan juga isu-isu tentang hiv aids termasuk narkoba terpapar gak cuma di anak-anak tapi juga di orang dewasa lewat sumber sahabat informasi. Jadi ssi ini merupakan program peer education, jadi anak diharapkan punya knowledge supaya</p>

	<p>bisa menyampaikan kepada teman-temannya juga kepada orang-orang dewasa, gak cuma ke anak-anaknya juga bisa ke orang dewasa yang lain.</p> <p>Sedangkan proyek sponsorship sebenarnya ini management dr wvi sendiri, karena memang program adp sumber pendanaannya secara sponsorship dimana program penyantunan anak lewat wakil anak, dan dimanage lewat project kita bilanganya csmp, project sponsorship kayak surat perkenalan anak, sba, dan juga lebih fokus kepada anak yang memang secara langsung terdaftar sebagai anak sponsor</p>
<p>Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?</p>	<p>Biasanya mekanisme wvi dalam mengeset program awal kita pasti akan ada pertemuan dengan masyarakat maupun para stakeholder atau pemangku kepentingan dari tingkat Rt/Rw sampai ke sudin di walikota. Sosialisasi di awal program menjadi proses memperkenalkan organisasi beserta identitasnya kepada warga dampingan dan para pemangku kepentingan, apa yang mau dilakukan di masyarakat dan kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan bersama-sama.</p> <p>Kemudian ada baseline dilakukan juga di awal program oleh teman-teman monev dibantu NO agar diperoleh data primer situasi lapangan dan dari baseline survei, kita bisa dapatkan gambaran lebih rinci tentang kondisi warga dampingan saat itu seperti berapa angka gizi buruk balitanya, angka putus sekolah, dan lain-lain.</p> <p>Dilanjutkan kemudian dengan bersama warga masyarakat untuk mencari yang namanya pohon masalah dan pohon tujuan, apa sih sebenarnya akar permasalahan dari wilayah ini dan tujuannya mau kemana nih. Apa masalah yang dihadapi anak-anak seperti pendidikannya atau kesehatan. Ada kesulitan ekonomi seperti apa yang dihadapi warga seperti pengangguran, tidak punya keterampilan kerja. Baru dari situlah dibikin besaran perencanaan kira-kira mana yang akan menjadi fokus utama dari project atau menjadi program design untuk satu periode waktu pelayanan di lapangan. Biasanya sekitar 3 tahunan untuk satu periode tahapan tersebut.</p> <p>Sampai saat ini setidaknya ADP sudah menjalani sekitar 3 periode project atau program desain yakni 2004 – 2006, 2007 – 2009, 2009 – 2012 dan periode berikutnya masuk periode transisi yakni 2013 – 2015. Mengawali suatu periode desain tersebut dilakukan perencanaan bersama masyarakat yang akhirnya menjadi logframe desain program. Untuk perencanaan ADP ada yang bersifat jangka panjang untuk suatu periode desain program, seperti yang terakhir adalah periode 2010 – 2012 dan saat ini kita sedang menunggu persetujuan dari donor untuk</p>

	<p>PPDD periode transisi 2013 – 2015. Dari PPDD tersebut menjadi acuan untuk AOP (<i>annual operation plan</i>) setiap tahunnya. Usulan dari warga juga dibicarakan dan menjadi pertimbangan dalam membuat AOP, bila memang ada di desain program, maka dimasukkan dalam daftar kegiatan. Karena bicara bekerja di masyarakat kan ada dinamis, jadi setiap tahun akan ada penyesuaian. Kita juga akan sosialisasikan ke masyarakat lebih dulu bila ada kegiatan atau proyek baru yang akan dilaksanakan di lapangan agar warga mengerti maksud dan tujuannya serta bagaimana warga bisa terlibat di dalamnya.</p> <p>Pertemuan untuk menyusun rencana operasional tahunan ini dilakukan setelah tim ADP menyelesaikan kegiatan lapangannya di semester pertama dengan mengundang perwakilan warga dan komite proyek atau pmc, disampaikan kepada yang hadir apa yang sudah dilakukan oleh ADP selama Oktober tahun lalu sampai dengan Maret. Biasanya pertemuan AOP ini dilakukan sekitar bulan April dan Juni dokumen AOP tersebut sudah harus dikirim ke NO untuk direview dan selanjutnya dikirim ke kantor donor yakni World Vision Canada untuk meminta persetujuan</p> <p>Menggunakan AOP itu dilakukan implementasi di lapangan oleh tim ADP dan tiap enam bulanan dibuat laporan pencapaian untuk dikirim kepada donor. Disitu dilaporkan apa yang dilakukan tim ADP kepada wakil anak untuk proyek sponsorshipnya. Kegiatan-kegiatan pendampingan, pelatihan atau kampanye penyuluhan untuk kelompok-kelompok dampingan seperti untuk kader, petugas kesehatan, ibu hamil atau balita yang di posyandu. Juga yang untuk kelompok usaha di kegiatan ekonomi atau ssi pada kegiatan hiv dan aids.</p> <p>Pertemuan di akhir tahun fiskal juga menjadi kesempatan bagi kami mensosialisasikan pencapaian-pencapaian yang terjadi dari implementasi program dan juga menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan pada tahun fiskal berikutnya.</p> <p>ADP juga memiliki mekanisme evaluasi atas implementasi proyeknya di lapangan. Setiap semester kita melakukan laporan, kita juga evaluasi karena laporannya wvi itu kan bukan cuma menyampaikan pencapaian apa yang dianggap baik oleh organisasi tapi juga dianggap baik yang dikonfirmasi di masyarakat, apa saja pembelajaran yang ada dalam pelaksanaan sepanjang satu semester tersebut. itu biasanya dilakukan tiap 1 semester sama-sama masyarakat juga kasih input. Di bulan terakhir dari tahun fiskal program yakni bulan September, kita lakukan lagi proses refleksi bersama staf</p>
--	---

	<p>dan warga juga mengundang perwakilan dari kelurahan dan kecamatan untuk mengevaluasi pencapaian proyek sepanjang tahun sekaligus menginformasikan kepada warga tentang rencana kegiatan tahun berikutnya yang telah sama-sama disusun di pertengahan tahun.</p>
<p>Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP</p>	<p>Keberadaan ADP diharapkan bisa menolong masyarakat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dan melakukan perubahan terhadap kehidupan mereka. Untuk itu ADP tidak bisa kerja sendiri melakukan programnya. Kita selalu upayakan agar seluruh pemangku kepentingan terlibat, baik yang dari pemerintah seperti dinas terkait kayak dari puskesmas dan kesehatan, terus juga dari pihak kecamatan sama kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat dan agamanya juga kader-kader dengan PKKnya. Khan kita tidak selamanya ada di sini, makanya kita gandeng para kader dari PKK yang sudah ada berkegiatan di wilayah untuk kerja bareng, ntar kalau proyek sudah selesai, ada mereka yang bisa meneruskan. Jadi harapannya seluruh sistem di wilayah sasaran dapat mendukung program dalam mengupayakan perubahan yang lebih baik dari masyarakat. Memang begitu kebijakannya. Semua dilakukan untuk mendorong warga terlibat dalam kegiatan ADP. Ada pendekatan informal yang menjadikan warga dampingan sebagai mitra, rekan kerja sejajar ADP. Kita mendengarkan apa maunya masyarakat dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Mengingat kegiatan ADP ini berbasis masyarakat maka masukan masyarakat menjadi poin penting bagi Wahana Visi dalam seluruh tahapan kegiatan programnya, karena khan yang mau dikerjakan di lapangan harus bersumberkan dari kondisi masyarakat layanan sendiri. Apa itu masalahnya, potensinya, harapan-harapannya ke depan, itu yang dicoba diakomodir oleh program dan diterjemahkan dalam implementasi proyeknya. Ini memang arahannya organisasi</p> <p>Kalo faktor penghambat di awal seperti yang saya sampaikan di awal adalah identitas organisasi Kristen salah satunya, walaupun sebenarnya sih pada akhirnya tidak menghambat organisasi untuk bekerja di masyarakat. Dengan lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat dan lebih transparan lagi karena ketika semakin berusaha menutup, semakin pula kita dicurigai. Pada kelompok dampingan ekonomi, waktu itu kan mereka mereka membentuk kelompok itu kadang-kadang ekspektasinya mendapat keuntungan besar langsung di awal-awal dan akhirnya jadi nyerah begitu ternyata hasilnya gak seperti dibayangin.</p>

Informan 2

Nama : Is, Staf monev ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
<p>Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?</p>	<p>Bergabung di ADP Cilincing sejak tahun 2002 bertugas sebagai petugas monitoring dan evaluasi. Dulu awal-awal aku ingetnya penanganan kebersihan lingkungan, pendidikan, nutrisi dan pencegahan bahaya narkoba. Dalam perjalanan waktu ada empat proyek yang dilakukan ADP yaitu sponsorship, kesehatan ibu dan anak, pengembangan ekonomi dan pencegahan bahaya hiv dan aids serta narkoba. Masyarakat sangat menerima karena apalagi waktu itu awal-awal programnya adp karena ada krisis moneter, jadi programnya seperti bantu spp, seragam, dan pengadaan buku. Ada kader-kader yang antusias ikut adp serta rekrut anak gak susah. Mungkin karena dari programnya banyak benefit waktu itu seperti penyediaan seragam sekolah dan spp buat anak dampingan.</p>
<p>Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?</p>	<p>Waktu itu kalo gak salah kak Adr yang awalnya waktu mensosialisasi programnya ADP selalu barengan sama kadernya TAP, jadi barengan memperkenalkan diri sebagai suatu organisasi yang sama walaupun namanya berbeda mungkin, tapi masyarakat nganggepnya sama. Saat itu tim ADP membentuk komite proyek atau biasa disebut KP yang isinya adalah perwakilan dari warga dampingan dari tiap Rw, bisa dia kader, tokoh masyarakat setempat atau warga biasa, warga sendiri yang menetapkan siapa yg jadi wakilnya duduk di KP. KP ini dibentuk dengan tujuan kelak keberlanjutan program, maksudnya saat WVI sudah tidak ada, KP yang akan meneruskan program yang telah dilakukan di tengah-tengah warga dampingan. KP juga yang akan menerima usulan-usulan kegiatan dari masyarakat yang akan diajukan dalam bentuk proposal kegiatan kepada ADP, nantinya bila usulan tersebut diakomodir oleh ADP maka KP yang akan mengkoordinasikannya di lapangan sementara staf lebih berperan memonitor. Paska pembentukan komite proyek, ADP melakukan baseline survey. Terus di baselinenyapun ada masyarakat yang kita libatkan, ada project committee yang kita libatkan juga disitu. Waktu itu sebagai ketua baseline tapi mensupport kita kayak nyusun kuisisioner, dia juga ikutan terlibat dalam diskusi-diskusi sampe dibawa ke NO untuk diskusi dengan pak Arn, terus proses di lapangan juga dia yang aku support dari belakang. Kalo utk di awal di tahun 2003 itu kan kita udah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, mulai dari</p>

	<p>situ kita sebagai staf juga belajar, staf juga cuman 5 orang. Jadi kita juga belajar proses bagaimana masyarakat bikin pohon tujuan abis pohon masalah, jadilah logframe. Proses ini menghasilkan dokumen program design atau PPDD dimana dalam PPDD tersebut ada logframe untuk setiap proyek seperti yang sekarang ada proyek nutrisi, hiv, sponsorship dan pengembangan ekonomi, dalam masing-masing logframe tersebut dijabarkan apa yang menjadi goal program dan masing-masing proyek serta apa yang mau dicapai di outcome dan output lewat pelaksanaan aktivitas di lapangan.</p> <p>Selama ADP Cilincing ada, sudah beberapa kali menyusun program desain itu bersama warga untuk buat logframe, seperti di tahun 2003 buat periode 2004 sampai dengan 2006, terus juga untuk periode berikutnya sampai yang terakhir tahun ini untuk persiapan transisi.</p> <p>Ya dari logframe yang ada di desain program, terus disusun AOPnya untuk pelaksanaannya di lapangan. Dalam AOP itu ditetapkan daftar kegiatan yang mau dilakukan baik sektor kesehatan atau ekonomi, misalnya ada pelatihan kader atau kelompok usaha di kuartal pertama, terus ada penyuluhan misalnya di bulan berikutnya, berapa kali mau diadakan dan siapa saja yang ikut serta berapa banyak budgetnya, terus usulan dari warga juga bisa diakomodir di sini.</p> <p>Saat pertemuan penyusunan AOP biasanya ada paparan pencapaian selama semester pertama dan juga disampaikan juga apa yg mau ADP lakukan di semester kedua merujuk kepada project design yang ada, selanjutnya kita rumuskan bersama rencana kerja tahun berikutnya, disini juga ADP bisa mempertimbangkan usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat</p> <p>Kita mengundang perwakilan masyarakat, dari Rt, Rw, kader, dari KSM maupun dari kelurahan, lalu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung bersama dengan hasilnya. Di akhir periode project design biasanya kita melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat berdasarkan intervensi yang dilakukan ADP. Evaluasi dilakukan oleh pihak luar WVI, biasanya menggandeng universitas untuk melakukannya. Hasil evaluasi tsb kemudian disosialisasikan lagi ke warga dan stakeholder untuk selanjutnya kita sama-sama susun project design untuk tahapan periode berikutnya berdasarkan data temuan hasil evaluasi.</p>
<p>Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga</p>	<p>Memang dalam setiap tahapan kegiatan program, kita selalu didorong oleh pimpinan untuk mendengarkan setiap masukan-masukan yang diberikan warga dan</p>

<p>dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP</p>	<p>masukannya itu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan. Hambatan-hambatan seperti ada masyarakat yang sibuk dengan kerjanya, otomatis gak aktif ya. Terus anak kali ya, karena kader kita banyakan perempuan, kalo gak jaga anak ya jaga cucu. Makanya kadang-kadang mereka gak bisa ikut pergi atau ngikutin kegiatan kita yang benar-benar mereka harus focus atau kegiatan yang mereka harus rutin ikutin. Kadang banyak juga diantara ibu-ibu itu sebenarnya agak susah untuk memahami materi pelatihan yang diberikan, jadi mereka juga kadang agak gak pede ikut kegiatan karena terlalu berat atau kalau pede juga saat kita tes atau tanya sebenarnya mereka gak paham. Makanya suka sia-sia materi yang kita kasih kayaknya mereka gak nangkap apapun.</p>
--	---

Informan 3

Nama : Hdr, staf monev ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
<p>Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?</p>	<p>Saya bergabung dengan ADP Cilincing sejak 2003 sebagai staf lapangan dan selanjutnya bertugas sebagai staf monev. ADP melakukan pendampingan awalnya dulu di bidang pendidikan. Sementara sponsorship memang basis programnya. Berikutnya kita ada kegiatan pencegahan narkoba yang berkembang menjadi pencegahan hiv dan aids dengan pendekatan peer educator lewat ssi anak dan dewasa. Juga ada proyek kesehatan dimana kita bekerjasama dengan puskesmas untuk kegiatan phbs dan posyandu yang lebih ke arah imunisasinya, bagaimana mendorong ibu-ibu membawa anak balitanya tertarik hadir ke posyandu. Lalu di ekonomi dengan kelompok usaha dengan penguatan kelompok.</p>
<p>Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?</p>	<p>Di awal ketika kita masuk di sana, kita sosialisasi dengan semua elemen baik pemerintah, tokoh masyarakat atau tokoh agamanya. Itu cara kita memperkenalkan Wahana Visi dan program ADP. Disanalah terbentuk komite proyek yang sekarang berkembang menjadi PMC, artinya sebagai wadah untuk membangun program, disitu terbentuk satu kesepakatan bersama menetapkan tujuan apa serta visi misi yang mau dilakukan di adp cilincing bersama masyarakat. Saat proses identifikasi permasalahan serta pemetaan potensi sumberdaya kita melakukan PLA dengan masyarakat di setiap Rw, sebanyak 10 Rw di Cilincing. Yang kita dapatkan dari PLA di wilayah kita analisa. Mulai dari pohon</p>

	<p>masalahnya dan kemudian tujuan yang ingin dicapai bersama. Misalnya masalah sampah, apa sih sebenarnya yang menjadi akar masalahnya. Lantas dari apa yang diharapkan masyarakat dan potensi masyarakat yang ada, sama-sama merumuskan apa pohon tujuan yang mau dicapai bersama-sama dengan ADP, dari situ nantinya dibuat logframe untuk tiap sector. Logframe ini merupakan bagian dari project design. Project design inilah yg akan menjadi rujukan untuk kegiatan ADP setiap tahunnya. Saat menyusun project design seperti untuk periode 2004 sampai dengan 2006 tersebut maka tim ADP bersama warga dampingan juga membuat AOP (<i>annual operation plan</i>) 2004 sehingga rencana tahunan tersebut sinkron dengan project designnya, demikian juga untuk periode berikutnya. Nantinya juga akan ada evaluasi dengan pihak konsultan di akhir satu periode untuk melihat progress yang terjadi di masyarakat akibat program kemudian hasil evaluasi didiskusikan lagi dengan warga dan pemerintah untuk menyusun project design berikutnya.</p>
<p>Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP</p>	<p>Hal yang menghambat partisipasi masyarakat di awal ADP itu seperti ada bantuan sembako, yang jelas nyata ada barangnya, sementara di satu sisi kita juga baru transisi dari proyek TAP yang masyarakatnya dimanjakan dengan program kerja bakti, bikin sarana umum. Sementara kita mensosialisasikan benefitnya tidak seperti yang sebelumnya. Itu sih yang agak menyulitkan. Lalu masyarakat mulai antusias ikut program ADP ketika sudah berjalan kegiatan pendidikan dimana anak yang direkrut mendapatkan bantuan yang masyarakat bilang beasiswa. Dari awal Rw sudah terlibat dengan kita dan kebetulan dia ada waktu. Ada juga yang tidak bisa ikut karena harus bekerja, seperti ibu-ibu yang umumnya jadi buruh cuci gosok atau laki-laki yang menjadi kuli panggul.</p>

Informan 4

Nama : Win, staf Lapangan ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
<p>Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?</p>	<p>Saya bertugas di Cilincing pada periode 2002 sampai dengan 2010 dan bertugas sebagai fasilitator lapangan. Kegiatan yang dilakukan adp ada program pendidikan dulu, terus pengembangan ekonomi dengan penguatan ksm, kegiatan kesehatan awalnya bareng dengan TAP focus di posyandu, kemudian belakangan ada hiv dan aids. Sponsorship merupakan program dasar untuk recruit</p>

<p>Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?</p>	<p>wakil anak.</p> <p>Awal program dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dimana kita jelaskan kepada warga dan stakeholder tentang lembaga Wahana Visi Indonesia yang menjadi mitranya World Vision untuk program pengembangan masyarakat seperti program ADP tersebut. Apa saja rencana kegiatannya yang tentunya berbeda dengan program TAP dari World Vision saat itu. Seperti program ADP dari sisi waktu merupakan program jangka panjang 10 – 15 tahun sementara TAP lebih singkat. ADP akan lebih fokus pada kegiatan pemberdayaan tanpa embel-embel dikasih bantuan khusus berupa barang dan TAP masih menyediakan beras karena sifatnya yang lebih untuk menolong warga yang kena krismon. Waktu dulu kami melakukannya dengan stakeholder kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ustad-ustad, Rt dan Rw melakukan sosialisasi tentang wvi. Hampir tiap malam, staf keliling dari satu Rw ke Rw lainnya buat pertemuan dengan mengundang warga datang ke tempat pak Rt atau ke balai Rw. Waktu mulai merekrut anak untuk program sponsorship ada isu kristenisasi. Ya awal-awal dulu kita mesti jelaskan isu-isu soal kristenisasi ke warga dan tokoh agama. Apalagi program yang ini ada rekrutan anaknya, warga ada yang khawatir. Lalu dilakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang ada dengan bersama-sama mengadakan PLA dengan masyarakat, PLA dulu per Rw, anak kita pisah, ada PLA anak dan PLA dewasa. Jadi ada kolom-kolom apa masalahnya, bagaimana mengatasinya, dan itu per Rw. Digali juga potensi masyarakat di sana, seperti adanya tenaga, tempat dan waktu. Jadi semuanya kita rangkum, kita sudah menemui masalah dan potensi lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini loh hasil dari PLA Rw. Setelah itu dilakukan perencanaan program, pertama kita tahun 2003 kalau tidak salah, kita undang semua stakeholder dari kecamatan, kelurahan, puskesmas maupun komite proyek, kita bawa ke Ciloto untuk menyusun program, disana awal dari program apa saja yang kita lakukan untuk tahun 2004 dan selanjutnya. Hasil perencanaan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan seperti waktu ada program pendidikan masih ada bantuan spp dan seragam untuk anak dampingan, terus ada pelatihan ekonomi dan penyuluhan kesehatan di posyandu atau pelatihan kader serta petugas puskesmas, dan lain-lain. waktu itu kita ada bantuan khusus memberikan buku pelajaran kepada anak. Kita sosialisasikan dulu programnya kepada warga khususnya para orangtua dari keluarga kurang mampu.</p>
--	--

Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	Yang menjadi penghambat warga untuk bisa ikut kegiatan kalau namanya ibu-ibu karena sibuk urusan rumah-tangga maka mungkin itu jadi kendala untuk ikut kegiatan. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak stakeholder karena setiap ada progress kita selalu update ke mereka. Laporan ke Rw itu dibuat oleh ksm. Jadi bila ada kendaladi lapangan maka pihak Rw mengetahuinya
--	--

Informan 5

Nama : Kar, staf lapangan ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Pertama kali di adp cilincing itu tahun 2008, waktu itu perannya pertama kali jadi coordinator pelita project, itu pemulihan gizi balita, kemudian pelita project itu hanya sampe tahun 2010, terus akhirnya dengan struktur yg baru jadi senior fasilitator sff. Kalo utk sector kesehatan sekarang kan sebenarnya lebih banyak ke penguatan pendampingan utk posyandu khususnya, peningkatan kapasitas kadernya dan masih terus dipikirkan pendekatan-pendekatan yg cukup ke masyarakat. Total ada 95 posyandu yang didampingi adp dan goal proyek kesehatan adalah meningkatkan status gizi balita dan ibu menyusui.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	Pasti kan kalo pertama-tama kita mengidentifikasi pasti ada assesment dr masyarakat, terkadang masyarakat itu sendiri juga gak tau potensinya apa, makanya kita lakukan assesment ada fgd juga, seperti itu yg kita lakukan nanti kita bisa liat sebenarnya ada potensi mereka. Semua dilibatkan seperti tokoh masyarakat, kadernya, pkknya, puskesmas, kelurahan. Kalo kita biacara kesehatan itu semua terlibat Kader selalu diikutsertakan oleh ADP dalam kegiatannya di lapangan baik kalau ada pelatihan atau penyuluhan di posyandu, kelas ibu atau seperti di PAUD .. jadi mereka itu seperti juga ibu-ibu balita atau ibu hamil jadi sasaran dampingan program. kader cilincing itu orangnya kritis, kalo gak suka langsung ngomong-itu mungkin kendala distaf juga, sebenarnya nilai positifnya bagus mau menyuarakan pendapatnya mereka cuman terkadang implementasinya yg kita lihat, jadi apa yg diomongin mereka itu tidak dilakukan. kalo kita lihat secara pemukiman sebenarnya pemukiman cilincing ini lebih padet jadi mereka merasa antar mereka berinteraksi sudah terlalu dekat jadi asal bicara.

	<p>biasanya pertemuan kader rutin sebulan sekali di tingkat kelurahan bertempat di puskesmas atau balai Rw. Biasanya agenda pertemuan adalah membicarakan rencana kegiatan kesehatan yang akan berlangsung pada waktu berikutnya sekaligus mengatur persiapannya dengan para kader. Untuk kegiatan rutin seperti posyandu dan kelas ibu hamil biasanya sudah ditangani sendiri oleh kader, nanti kalau ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya disharingkan ke tengah forum untuk mendapatkan solusi dari peserta pertemuan lainnya. Atau kalau ada pembelajaran, ini juga bisa dibagikan dalam pertemuan ini. Sementara pengaturan pelatihan biasanya kita lihat jadwal posyandu kalau mau ada kegiatan pelatihan buat kader. Sekarang kita mengumpulkan kader utk bagaimana mengatur kelas bumilnya, bagaimana mereka meminta petugas kesehatan supaya mereka datang ke kelas bumilnya. Jadi kita sebenarnya memampukan kader utk mengkomunikasikan kepentingan mereka ke petugas kesehatan soalnya kalo kita nanti yg minta mereka, nanti kan itu seakan2 itu kelas bumil nya wvi, sekarang ini kita coba karena kan kita mau minta puskesmas ini kan berbasis masyarakat tapi kan harus dicari bagaimana memonitoring masyarakat, hal itu yg lagi coba kita diskusikan. Kalo utk sekarang mekanisme secara formal belum ada tapi kalo komunikasi di masyarakat aku selalu minta, biasanya aku tanya posyandu mana yg menjadi target, terus apa yg bisa lakukan bersama. Terus karena ada program cva ini kan kalo kita maksudnya ada daerah-daerah contoh yg bisa kita lihat menjadi contoh di semper barat.</p>
<p>Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP</p>	<p>Paling banyak upaya penguatan kapasitas kader posyandu untuk memampukan mereka menjalankan posyandu dengan baik. Kalo sisi kader yg pertama kapasitas mereka meningkat, pengetahuan mereka bertambah...mereka bilang banyak informasi yg mereka dapat dari pelatihan, keterampilan mereka juga dalam mengelola posyandu meningkat, dan kemampuan mereka mengkomunikasikan apa yg mereka butuhkan sudah lebih berani. Dan mereka sudah tau tempat-tempat siapa yg mereka hubungi sehingga mereka butuh seperti ini untuk kapasitas mereka-itu khususnya utk kader. Sementara masalahnya kebanyakan yang ada kasus bgm pada balita itu ditemukan pada anak-anak yg jarang ke posyandu, bisa jadi karena ibunya kurang tahu gunanya posyandu yang bisa untuk memantau perkembangan anaknya.</p>

Informan 6

Nama : Bag, staf lapangan ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Semenjak 2011 saya di FP di kel. Cilincing, peran saya khususnya di sector ekonomi dan merangkap lainnya seperti cms , apr. membantu apr karena jumlahnya lebih dari 100 orang dan kalau 1 wilayah hanya ditangani 1 orang kurang efektif. Sekarang kita sedang bina untuk kelompok usaha dagang dari itu mereka dikasih pelatihan-pelatihan. Dari kelompok ekonomi ada 9 tapi selama ini hanya 5 yang aktif. Selain itu ada kegiatan kesehatan untuk kader-kader PKK dan petugas puskesmas dan sponsorship. Kadernya rata-rata aktif apalagi sejak ada cva. Untuk hiv aids baru dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan anak ssi remajanya belum terlihat keluar. Paling-paling bila ada kegiatan hari besar, diadakan aktivitas penyuluhan.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	Proses yang kalau kemaren kita lakukan. Otomatis kan kita rembukan dengan saya, pak daman, tim. Siapa yang harus kita dampingi untuk kelompok usaha. Kadang-kadang ada yang bisa tapi dia gak ada kemauan. Itu yang menjadi masalah. Kan kita dampingi sekaligus bagaimana untuk usahanya bisa maju dan berkembang. Banyak sih pengen tapi kan kita juga melihat-lihat dulu atau konsultasi dulu. Makanya kita pilih bagaimana caranya kelompok usaha ini bisa maju dan berkembang. Dari semua itu mereka berterimakasih sudah dibekali kayak semacam pemasaran, pembuatan makanan /snack, handicraft, management yang baik. Dukungan untuk kelompok usaha biasanya kita melakukan kunjungan ke tempat warga untuk melihat progress dari usaha mereka, apa yang ADP bisa bantu kalau mereka ada kesulitan. Kalau untuk uang tidak pernah dijanjikan, tapi fokusnya adalah akses untuk pendanaan seperti Vision Fund Sebenarnya Vision Fund sudah terkenal di Cilincing, sudah ada kelompok-kelompok, tinggal mengakses saja dia
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	Proses komunikasi juga dibangun dengan warga. Selain itu juga kalau di lapangan ngobrol dengan warga, sekalian dijelasin tentang kegiatan dan mengajak mereka ikutan kegiatan. Kesulitan untuk ikutan karena mereka itu ada juga yang kerja dan kalau ninggalin kerjaan buat kegiatan khan gak ada pemasukan. Itu menjadi kendala buat aktif di kegiatan

Informan 7

Nama : Sur, staf lapangan ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Di adp cilincing bertugas sejak 2012, saat ada struktur urban Jakarta berubah besar-besaran. Saya menjadi sff. kita ada pendampingan ekonomi dan sudah ada beberapa tahapan mulai dari orang tua RC, keluarga RC, atau kader yg memang mau membangun usahanya atau menambah pendapatan keluarga/suami, tapi memang saat ini baru sampai menjangkau ibu-ibunya.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	Untuk pendampingan ekonomi awalnya memang dilakukan survei pasar untuk melihat produk apa yg paling diminati di sini, waktu itu muncul hasilnya adalah makanan serta kerajinan tangan, berangkat dari situ kita informasikan ke warga yg mau buat usaha kita fasilitasi. Animo besar pak karena alasan utama yang ini mau dapat penghasilan tambahan. Kalau mau ikut les sendiri mesti bayar dan yang ini kan gratis. Masing-masing kelompok usaha dampingan coba didukung oleh ADP melalui aneka pelatihan mulai dari kelayakan usaha, keterampilan produksi, pengelolaan keuangan usaha dan pelaporannya sampai menghubungkan mereka dengan lembaga keuangan mikro untuk menolong permodalan terus dalam pendampingannya diberikan motivasi untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut. Masing-masing kelompok berbeda pola kerjanya, ada yang produksi rutin setiap hari seperti di kelompok bakso ikan, ada juga yang bersifat menerima pesanan sehingga tidak produksi setiap hari. Sementara untuk pemasaran memang masih sebatas mengikutsertakan mereka dalam bazaar atau pameran usaha yang ada di wilayah karena memang pemasarannya belum keluar wilayah layanan ADP, Masih model dititipkan di warung-warung atau dijajakan keliling kalau ada bazar PKK atau arisan ibu majlis taklim, sekalian produknya dijajakan.
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	Seringnya sih alasan kurang modal dijadikan alasan untuk berhenti usahanya. Patah semangat kalau hasilnya hanya segitu-gitu saja. Dimotivasi bahwa kalau order 2 atau 5 bungkus itu juga order, tidak hanya yang besar-besar saja. Tim mencoba terus menerus berikan informasi, ya karena ada informasi yang jelas tentang programnya ADP maka hal tersebut membuat warga menjadi mau terlibat. Caranya bisa dengan kita datengin juga ketua Rt sambil jelasin apa yang mau dilakukan ADP terus minta nama-nama yang direkomendasikan ketua Rt untuk ikut

Informan 8

Nama : Pet, staf lapangan ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Saya join dengan ADP Cilincing sudah 2 tahun sebagai SFF dan lebih banyak menangani sector ekonomi. Kegiatannya menolong anak rc untuk siap memasuki dunia kerja dengan mengikuti program diploma dan kursus keterampilan. Kita juga memfasilitasi kelompok simpan pinjam di rusun Rw 10, yang anggotanya adalah warga di Rw tersebut maupun anggota kelompok usaha..Mekanismenya adalah dua minggu sekali mereka kumpul dan menyetorkan iuran rutin sebesar Rp 10,000 per orang.Uang simpanan tersebut bisa jadi pinjaman bagi anggota yang memerlukan untuk modal usaha atau ada kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan anak. Model di ASCA ini semua aturannya dibuat oleh anggota kelompok sendiri, kita staf hanya memfasilitasi untuk pengadaaan peralatan seperti box penyimpanan uang dan buku catatan tabungan. Boxnya sendiri pakai tiga kunci dan masing-masing dipegang oleh ketua, sekretaris dan bendahara serta box terkunci berisi dana tersebut disimpan di tempat bendahara kelompok. Box tersebut hanya bisa dibuka saat pertemuan dengan memakai kunci yang dipegang oleh ketua, sekretaris dan bendahara..ada dendanya juga seribuan kalau datangnya telat atau tidak hadir dan warga juga ngumpulin dana sosial 2000an kalau ada kemalangan atau anggota yang sakit..besarnya pinjaman dengan cicilannya juga disepakati ama kelompok dan untuk saat ini maksimun pinjaman yang bisa diajukan sebesar tiga kali lipat dari jumlah simpanan yang sudah disetor anggota tersebut.

Informan 9

Nama : Jan, staf lapangan ADP Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Di Cilincing sejak 2008 sebagai cdc waktu itugas dimana sebelumnya bertugas di cipinang melayu. Saat ini menjadi coordinator proyek cva. Secara keseluruhan kita di Cilincing ada 4 proyek yakni pengembangan ekonomi, nutrisi, hiv & aids serta sponsorship. Cva merupakan special project berkaitan dengan advokasi kesehatan. Sudah berjalan masuk tahun kedua di Cilincing dan berikutnya akan masuk ke Semper Barat. kalo sekarang isu yang diangkat CVA adalah tentang posyandu,

	<p>bagaimana masyarakat yang mengakses posyandu sadar akan hak-haknya sebagai warga negara, masyarakat disadarkan supaya bisa menyuarakan pendapat mereka, tapi di sisi lain juga berusaha mengadvokasi juga pemerintah supaya bisa memberikan apa yg seharusnya hak masyarakat, nah bentuknya melalui dialog, melalui pertemuan-pertemuan sehingga ada ruang interaksi antara masyarakat, pengurus posyandu, maupun pemerintah untuk bisa bersama-sama mencari apa masalah dalam layanan posyandu dan apa yang akan dilakukan bersama-sama meningkatkan layanan posyandu</p>
--	---

Informan 10

Nama : Yyt, Ketua Program Masyarakat Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
<p>Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?</p>	<p>Awal masuk tap itu wvi yang pertama itu, tahun 99 kalo gak salah. Waktu itu saya rt, itu awalnya terlibat dengan wvi. Kegiatan di tap saat itu masih sanitasi kebersihan, terus ada pengembangan kelompok. Saat itu zamannya konveksi kaos dan limbahnya kita buat keset kaki. Terus masuk program baru, waktu itu saya belum terlalu ngerti program apa karena saya masih aktif di tap. Lalu ada pendampingan posyandu dari tap saya ikut juga dan sebagai fasilitator memberikan penyuluhan kemana-mana. Saya juga ikut ikut di kp dan sekarang menjadi pmc. Terus paling akhir adalah kegiatan cva. Saya juga ikutan dilatih menjadi kader CVA dan memfasilitasi warga untuk bisa menyampaikan kondisi-kondisi kesehatan yang diharapkan warga kepada pihak puskesmas atau dinas. Kalo ada proyek baru kayak CVA kemaren, warga juga disosialisasikan dulu tentang apa itu advokasi, nantinya mau ngapain dengan posyandu sama orang puskesmas</p>
<p>Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?</p>	<p>PMC yg sekarang itu cikal bakalnya dari komite proyek yg dulu dibuat adp dan komite proyek ini yang akan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam adp bareng staf nya. Ntar kalo adp selesai, komite proyek atau pmc yang bakalan nerusin yang sudah ada. KP ikut terlibat dalam kegiatan adp. Baselinenya juga waktu itu ada pak Wrn dari komite proyek ikutan juga. Komite proyek juga yang terlibat menyampaikan hasil baseline di pertemuan. Warga juga bisa menyampaikan usulan seperti masalah sanitasi atau pendidikan anak lewat KP yang nanti bakal diteruskan ke adp untuk dijadikan program. Saya masih ingat banget waktu itu yang terlibat ada 80-sekian, disitu awalnya. Apa sih masalah yang ada di masyarakat ? itu</p>

	<p>dilist semuanya.Kalo gak salah itu sekitar 24 masalah-waktu itu. Jadi ada 3 kelompok besar disitu setelah kita dapet list kita bikin lagi, mana yang masuk ke sector ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.Itu pertama kali saya bikin PLA di Rw-Rw dan saya salah satu fasilitatornya. kita sampe jam 12 malem nyusun yang namanya pohon masalah dan pohon tujuan...terus kita bikin programnya apa.Dari situ saya belajar banyak, dan saya terkesan lagi waktu melapor ke pak lurah yang lama Pak Bdn: .. pak kita abis bikin program ..saya tunjukkan itu .. kata pak lurah kemudian: waduh saya yg S1 aja baru belajar pohon masalah pohon tujuan hahaha ... kamu kader udah belajar, Saya bilang masa sih pak ? masa S1 belum bikin ginian ? Beneran Yat, suwer, saya S1 mau pensiun jadi lurah baru diajarin pohon masalah-akar masalah-pohon tujuan baru tahu saya. Kamu belum ada S1, belajar dimana ? 3 hari pak sampe budek. Ada otodidak yang secara gak langsung wwi ajarkan kepada warga. Kita diundang setiap tahun bikin program, masyarakat dilibatkan, nah programnya itu yang akan kita kerjakan setahun ini, juga yang sama-sama akan kita lihat pencapaiannya, tidak melenceng dari ini pak. Dalam pertemuan kita sampaikan informasi dan masukan warga untuk ADP misalnya masalah saluran got kita kelompokkan ke kesehatan, ini kita teruskan ke ADP untuk dapat perhatian dan menjadi kegiatan program. ADP untuk kegiatan kesehatannya menggandeng kader posyandu. Ya memang kader posyandu dan PKK sudah ada kegiatannya sebelum ADP masuk dan dibilangin ama staf kalau nanti ADP selesai, kader-kader bisa ngelanjutin. Untuk kegiatan ekonomi, ADP fasilitasi pelatihan ibu-ibu bikin kue, biar bisa nitipin kuenya di warung-warung untuk nambah income mereka..kayak gitu. Produksi dari kelompok usaha makanan memang masih dipasarkan di sekitar Cilincing saja, dititipkan untuk dijual di warung-warung. Hasil dari pendampingan ADP selain kita manfaatkan untuk diri sendiri juga bagi orang lain.Terus kita open sama orang, siapa aja yang mau belajar, silahkan aja gitu ..ya udahlah siapa aja yang datang minta ajarin ya kita ajarin.</p>
<p>Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP</p>	<p>Di wahana visi ini, masukan dari warga selalu diminta bagi proses pemberdayaan yang dilakukan ADP,waktu awal program ADP dimulai sudah dibentuk komite proyek yang salah-satu tugasnya juga memberikan masukan saat ADP menyusun rencana kerjanya. Untuk kegiatan pelatihan karena namanya datang dari ketua Rt atau Rw, biasanya mereka akan ikutan monitor apakah warganya datang atau tidak.</p>

	Di awal-awal adp mulai ada juga warga yang tidak mau ikut dalam kegiatan ADP karena takut dikristenkan. Selain itu emang masih ada warga yang ngarepin dapat bantuan atau sembako kalau ngikutin kegiatan tapi kan di ADP gak ada gituan, apalagi waktu TAP masih jalan, masih ada bagi beras dan kacang, itu bikin warga itung-itungan kalau diajak kegiatan ADP.
--	--

Informan 11

Nama : bd Rum, petugas puskesmas Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Bertugas di puskesmas Cilincing sudah 2 tahun dibagian kia atau kesehatan ibu dan anak sebagai bidan puskesmas. Wahana Visi itu bekerjasama dengan kader, bekerjasama dengan puskesmas, memberikan bantuan kepada posyandu, memberikan support dan pelatihan di posyandu dan pos bumil buat kader, juga ada pelatihan buat bidan-bidan se puskesmas cilincing waktu itu seperti di UI juga pelatihan bagi kader-kader dan ToT buat pos bumil
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	Ada mekanisme pertemuan dimana kita juga diundang hadir untuk ketemu dengan para kader sebulan sekali. Kalau pas saya tidak sedang ada tugas pasti saya hadir atau ada rekan lain yang datang kalau saya berhalangan. Sementara untuk kegiatan pelatihan biasanya pihak wvi datang kepada kita,rembukan dulu, ini ada pelatihan, apa yang disiapkan wahana visi, apa yang disiapkan puskesmas, seperti itu mitra kerja, ada kerjasama. Dengan adanya pelatihan menolong kader-kader agar semuanya memiliki keterampilan yang baik dan memadai dalam menjalankan tugas mereka khususnya dalam kegiatan posyandu..untuk yang jumlahnya kurang atau kadernya tidak aktif, ADP bisa membantu untuk proses kaderisasi

Informan 12

Nama : Mar, TP PKK Cilincing

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana	Di kantor kecamatan Cilincing, saya bertugas di bagian perencanaan sekaligus menjadi sekretaris tp pkk kecamatan. Wvi bekerjasama dengan kita PKK mengenai itu .melatih para kader sampai para kader itu dijadikan sebagai motivator untuk kader lainnya, ada juga lomba

keterlibatan anda di dalamnya ?	kader, kemarin juga ada lomba bumil, dimana saya menjadi juri. Masalah terkait posyandu yakni ada ada juga posyandu yang kadernya tidak semua aktif atau jumlah kader tidak cukup banyak makanya perlu ada kaderisasi dan pelatihan untuk menciptakan kader baru..terus kan kemampuan orang beda-beda, ada kader yang trampil, ada juga yang masih kurang sehingga masih perlu pelatihan untuk memampukan mereka
---------------------------------	--

Informan 13

Nama : Dew, ketua Rt

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Ikut terlibat dalam kegiatan adp sejak 2006 dan saat ini saya sudah tiga periode menjadi ketua Rt. Kegiatan adp yang saya ketahui itu anak sponsor, terus posyandu dan paud ada juga.Mereka melapor waktu masuk kemari dan buat pertemuan di sini saat menginformasikan tentang program dan kegiatan adp. Juga ada pertemuan di sini untuk rekrutan anak. Stafnya ADP kadang datang ke rumah menyampaikan informasi tentang kegiatan ADP, terus nanyain siapa saja di antara warga yang sebaiknya ikutan untuk pertemuan atau pelatihan kalo ibu-ibunya sih kalo ada undangan dari ADP gitu, dia bisa sampaikan pendapatnya sama ADP, yang dia denger juga bisa dia pahami.
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	banyak sekarang ibu-ibu yang bawa balitanya ke posyandu karena aktif kader-kadernya dan posyandunya sudah semakin baik dikelola kader. Sekarang warga menghubungi kader kalau ada urusan sktm untuk ke rumah-sakit, senang dan bangga sih katanya bisa menolong orang dan dibutuhkan sama warga. Kita juga ikutan tanggungjawab karena sudah memberikan nama-nama warga yang bisa diikutkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan ADP..kita dorong juga warga untuk aktif mengikuti kegiatan karena toh manfaatnya mereka juga yang nikmatin. Karena dari awal warga selalu diundang, rt ama rw dilibatkan, ada kader-kader diikutkan, disampaikan ke kita apa yang mau dilakukan ADP dan semuanya bertujuan baik, makanya kita jadi yakin kalau program ADP bisa menolong warga untuk mencapai kondisi yang lebih baik

Informan 14

Nama : Ham, Ketua Rw

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Saya menjabat sebagai ketua Rw sekitar setahunan tetapi sebelumnya sudah pernah menjadi ketua Rt. Istri saya yang banyak terlibat di kegiatan adp karena dia juga kader posyandu. Setahu saya ada program untuk anak-anak, untuk pendidikannya juga kesehatan. Yang paling membedakan adp dengan lainnya cuman kalo yang lainnya biasanya yang menanyakan masalah rapat atau kumpul..ada amplopnya gak ? ada sembakonya gak ? tapi di adp gak ada. karena udah tahu mendidiknya ke arah positif gak negative, gak ada unsur misalnya..ooi rapat ada sembako..ooi rapat ada amplop ...ADP gak gini..terasa ada manfaatnya.
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	tetapi saya salut karena kegigihan ..kesabaran wvi..orang-orang di lapangan..saya salut sedikit demi sedikit menanamkan apa yang wvi programkan oleh pihak wvi ya

Informan 15

Nama : Sup, kader kesehatan

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Ikutan pertama kali waktu ada rekrutan anak ada pertemuan, terus kegiatan pertamanya tentang bantuan pendidikan buat anak-anak. Ada dana pendidikan saat itu diberikan setiap bulannya. Sekitar tahun 2002 atau 2003, terus ada kegiatan buat anak-anak kurang gizi. Setelah rekrutan anak waktu itu bikin kub,cuma terhambat terus. Terus pakai cara arisan, karena waktu itu hanya diberikan modal separu, eh baru modal sedikit udah dipnjam sama warga lain juga sehingga akhirnya gak jadi. Tapi sekarang ada asca yang alhamdulillah lancer.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	Biasanya bila ada kegiatan wvi, diinformasikan saat ada pertemuan kader..Di pertemuan itu juga membicarakan masalah yang terjadi di warga seperti soal kebersihan, sumberdaya manusia yang kurang, tempaat sampah yang sudah disediakan cumin kesadaran manusiannya yang susah
Faktor pendukung dan penghambat	hal positif saya ya sekarang bisa berani ngomong kita senang ada banyak ibu-ibu yang rajin bawa anaknya

keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	ke posyandu..rutin tiap bulan, tapi ada juga yang jarang bawa saat dikunjungi katanya sih anaknya sehat-sehat saja tapi kalau dilihat anaknya kurus kalau gak sakit gak perlu ikutan posyandu katanya seperti ini biasanya karena kurang pengetahuannya
--	---

Informan 16

Nama : Mus, kader kesehatan

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	wvi itu pertama kali emang infonya dari ibu Lli salah seorang kader waktu itu, kita ibu-ibu dikumpulin lalu diceritakan tentang program ADP, apa yang mau dikerjakan bareng warga, tentang rekrutan anak. Saat itu masih ada tap dan kita taunya TAP ama ADP sama aja sama-sama wvi, yang satu bicara program kebersihan dan ada berasnya, sementara yang satu lagi mau ada rekrutan anak ke pendidikan, apalagi waktu itu kantornya sama di kebantenan, jadi kita sih open aja, apalagi toh untuk kebaikan anak-anak kita
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	saat ada pertemuan kader, kita dapat informasi tentang kegiatan ADP dan disitu ditanyakan oleh staf ADP kegiatan pelatihan apa yang diperlukan atau kita mau lakukan penyuluhan apa di masyarakat
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	banyaklah, satu ..dapet ilmu, terus kita bisa tahu yang tadinya tidak tahu, cara menyusui yang baik, cara merawat bayi, ah pokoknya banyaklah, kita tahu karena kita ikut pelatihan. ya mungkin karena sekolahannya gak tinggi makanya ibu-ibu tersebut gak tahu kalau jajanan seperti itu gak bagus untuk anak-anaknya..jadi tugas kami memang untuk menolong mereka itu supaya sadar dan paham

Informan 17

Nama : Har, kader kesehatan

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana	Waktu itu seingat saya tahun 2003. Perekrutan awal di cilincing ini. saat itu kan masih belum ada pandangan atau gambaran yg luas lah, artinya hanya sebatas tau ajah, dateng-direkrut-terus dapet manfaat. Pada saat itu kan kita dapat manfaat tas, baju seragam, sepatu.

keterlibatan anda di dalamnya ?	Berangsurnya waktu-berjalan, akhirnya pembentukan ksm segala macam, terus kita juga didampingi, kalo saya sempet ngalamin hal-hal seperti itu ksm saya, karena di cilincing ini ksm saya paling awal itu yang dapat pendampingan seperti itu, dibandingkan ksm-ksm yang lain. Kalau saya sendiri ke kesehatan ok, mau di ekonomi juga oke karena saya juga kader posyandu di tingkat Rw. sebelumnya memang sudah di posyandu yah..kalo posyandu sebelum wvi masuk , artinya aktif di posyandu.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	ya kita ketemuan kader-kader sebulan sekali, biasanya mbak Kart hadir juga ama bidan puskesmas. ya pas pertemuan kader itu mbak Kart suka tanyain ada masalah gak bu dalam kegiatan posyandu atau di kelas ibu hamil, terus yang lain juga bisa menimpali bagi pengalaman kalau juga menghadapi hal yang sama, sama-sama belajar gitu. Kalau pelatihan itu seringkali dari puskesmas yang menyediakan fasilitatornya dan materinya diperbanyak oleh ADP waktunya juga dipastikan tidak tabrakan dengan jadwal posyandu supaya kader bisa ikut semua
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	Akhirnya mereka hadir kumpul ...ternyata manfaatnya itu ada, yaitu kalo WVI ngundang ada manfaatnya, kan pasti juga tali silaturahmi kita lebih diperpanjang lagi, kita makin kenal satu dengan yang lain. Selain itu peran kita semakin luas, apalagi contohnya kayak sekarang orang cari kader, kalo pembuatan sktm harus ada tandatangan kader..jadi kalo untuk saya hidup ini jadi berarti kalau kita berarti untuk orang lain, kita rasanya bangga karena dibutuhkan orang lain dan puas bisa membantu orang lain. ya, kalo hambatannya di ibu-ibu kadang-kadang sibuk sama pekerjaan di rumah,jadi gak bisa kumpul semua. Sementara hambatan kalo yang usaha sih emang suka terbentur ama modal, terus pingin segera kelihatan hasilnya, usahanya berkembang, begitu mentok terus jadi malas buat nerusin. Selain itu ada juga warga yang sekalipun pingin ikut tapi pekerjaannya gak bisa ditinggal, soalnya ada juga yang kerja jadi buruh cuci atau jualan, jarang bisa kumpul semua. Ada juga yang merasa ikut kegiatan ADP banyak mikirnya jadi enggan untuk ikut lagi.

Informan 18

Nama : Nur, kader dan anggota kelompok usaha

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja	Saya terlibat udah lama, udah dari anak saya yang umur

<p>yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?</p>	<p>16 th pertama itu perekrutan pertama mungkin yah! awalnya wakil anak kebetulan butuh seorang kader dan temen saya waktu itu bu si namanya sekarang dia udah pindah. Dia tuh yg perintis pertama di rw 01 lah, waktu zamannya beras, nyapu, kan dulu sudah ada ya yg nyapu-nyapu itu saya udah masuk kesitu tapi masih anggota. waktu itu ada sosialisasi program ADP ke Rt/Rw dan kita dikumpulin, dikasih tahu bakal ada kegiatan wvi yg baru</p>
<p>Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?</p>	<p>Biasanya setahun sekali, kita diundang ke pertemuan oleh ADP, terus disosialisasikan hasil kegiatan yang sudah terlaksana demikian juga rencana kegiatan untuk tahun berikut.apa aja yang dikerjakan di kesehatan, di HIV&AIDS, sponsorship dan juga ekonomi. Jadi kita ada pertemuan rencana tahunan,nah di situ kita bikin program nih,di wvi khan ada 4 program sponsorship, hiv aids, kesehatan sama ekonomi..bagi-bagi nah tu disana nanti yang nutrisi apa sih maunya, terus hiv aids apa maunya, sponsorship juga apa maunya, ekonomi juga apa maunya, nanti di situ di list, kita di sana rapat tahunan itu udah langsung bikin program sendiri, misalnya kegiatan ini maunya bulan apa, maunya warga sendiri karena kan waktunya juga jangan sampai bentrok yang lain gitu, warga sendiri yang sesuaikan.</p> <p>Kebanyakan kelompoknya buat usaha makanan ringan,seperti saya buat rempeyek lalu kelompok bu Har bikin kacang disko, ada juga kue-kue dan lain-lain. Kebetulan rw 1 waktu itu minta bikin peyek rengginang, terus kita bikin kelompok, anggotanya ya dari rw 1 semua. Kita bikin peyek tidak setiap hari, biasanya 4 hari sekali dan langsung banyak terus dititip di warung-warung,ada yang kebagian masak dan ada yang antar ke warung, tapi ada juga yang system pesanan dan biasanya kebanyakan saat lebaran.</p> <p>Kunjungan staf ADP biasanya setelah selesai pelatihan, terus kalau ada kegiatan pelatihan lainnya ada yang datang dan kita diberi-tahu,belum ada forum kelompok usaha atau pertemuan rutin seperti untuk kader. Ya kita diinformasikan juga sama staf tentang adanya pinjaman untuk modal usaha lewat Vision Fund. Ada juga kegiatan sector ekonomi yang baru tahun ini dimulai namanya ASCA warganya dikumpulin juga yang dari kelompok usaha yang sudah jalan.modelnya simpan-pinjam gitu, anggotanya kasih iuran 10,000-an terus dari uang tersebut bisa dipinjam juga balik kalau ada yg perlu buat modal usaha gitu. Kalau yang di ASCA ini memang peraturannya disepakati oleh sesama anggota kelompok, ada pengurusnya juga seperti koperasi, ada aturannya</p>

	<p>juga untuk membuat kita disiplin hadir dengan denda kalau telat atau tidak datang</p> <p>Kalo ketemuan ama staf ADP, bisa sekalian tanya-tanya soal kegiatan terus disitu juga biasanya diingetkan dan sekalian diajak ikutan.</p>
<p>Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP</p>	<p>sekarang juga kita jadi ngerti tentang apa sih yang seharusnya kita dapetin dari pemerintah...seperti di layanan posyandu mestinya puskesmas mesti menyediakan tenaga untuk imunisasi atau kalau pas tidak ada di posyandu, layanan itu bisa didapatkan di puskesmas kapan saja ibu-ibu datang ke sana bawa anaknya, warga juga dilatih untuk menjadi fasilitator CVA ini .</p> <p>Banyak pelatihan-pelatihan yg saya ikuti, pelatihan macem-macem kayak hiv, sponsorship, pokoknya segala macam sampe ke usaha snack gitu. Nah untuk pelatihan kayak snack contohnya, usaha itu sangat berguna karena setelah mendapat pelatihan itu saya jadi punya usaha sendiri sekarang, nambah ekonomi keluarga ya untuk bantu-bantu. Kita pelatihan di rawasari bikin mie pangsit, sekarang sudah jualan mie pangsit, nah itukan jadi manfaatnya ada yang diambil keluarga wakil anak, yang bapaknya ngganggu sekarang jualan pangsit gara-gara istrinya ikut pelatihan. Memang wvi tidak memberikan fee, tapi memberikan pengalaman dan juga ilmu, karena setelah saya masuk ke banyak pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, pelatihan macem-macem kayak hiv, sponsorship sampe ke usaha snack gitu, saya jadi pede, maksudnya saya yang tadinya tidak bisa ngomong di depan ibu-ibu, karena disini kan suka ada pertemuan bulanan, nah itu saya menjadi pembicara, fasilitator, itu saya sudah bisa memberikan. Karena kita dapat ilmunya juga gratis ya kita bagikan juga sama yang lain, biar yang ibu lainnya juga jadi belajar. Kalau dibilang sosial itu saya rasa dari wvi dibilang sosial karena memang wvi tidak memberikan fee, orang ini mau untuk diajak kerja mengurus wilayahnya tanpa kasih imbalan, karena dia rasa ada manfaatnya.</p> <p>Awalnya ada isu agama tapi akhirnya warga mengerti juga kalau ADP tidak bawa-bawa agama..hanya untuk menolong anak-anak dan keluarga..buktinya programnya bisa terus berjalan sampai sekarang</p>

Informan19

Nama : Ros, anggota kelompok usaha

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Saya ikutan adp saat gabung dengan kelompok yang buat kerajinan assesoris wanita seperti ini. Sudah jalan setahun lebih deh. Tahunya juga selain kegiatan ekonomi ini, ada juga adp membuat kegiatan kesehatan yang berhubungan dengan ibu dan anak yang di posyandu juga ada pos bumil karena ada tetangga saya yang ikutan juga. Yang lainnya adalah kegiatan kelompok belajar anak buat anak-anak yang direkrut wvi.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	kalau gak salah waktu itu yang ikut pelatihan ada 10 orang, abis pelatihan, kita gabung aja berkelompok yang deketan rumah. Kalau untuk kerajinan tangan kayak asesoris manik-manik itu biasanya berdasarkan pesanan, jadi tidak kumpul setiap hari anggota kelompoknya..ada yg tugasnya juga mencari tahu kapan ada bazaar atau pameran sehingga bisa menitipkan produk di sana. Stafnya ADP memang sekali-sekali berkunjung untuk lihat, bagaimana keadaan usahanya sekarang sekalian menyampaikan informasi kalau ada kegiatan pelatihan atau mungkin ada pameran yang mau diikutsertakan oleh kelompok
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	Ya lumayanlah buat tambah-tambah pendapatan keluarga pak. Karena bisa ikutan pelatihan, makanya bisa banyak tahu terus lebih bisa ngomong dengan orang lain, lebih percaya diri jadinya. Tapi ada juga warga yang enggan ikut karena repot ngikutin ADP karena harus ikutan mikir-mikir, mungkin karena bukan orang sekolahan

Informan 20

Nama : Rn, kader pendamping anak

Pertanyaan	Jawaban
Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ADP di wilayah layanan dan bagaimana keterlibatan anda di dalamnya ?	Karena kebetulan adik saya yang paling kecil adalah anak dampingan wahana visi dan saya sering menghadiri pertemuan orangtua wakil anak. Saya kemudian diajak untuk mengajar di kba, mulai dari situ lalu diajak terlibat di ksm dan posyandu juga. Saya juga terlibat di kegiatan ppmk dan pnpmAwalnya karena memang saya suka aja terlibat dalam kegiatan anak-anak karena ada anak-anak ngumpul tetapi gak ada yang mengkoordinir. Kebetulan saya punya pengetahuan sedikit dan bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman, awalnya memang rasa

	senang saja berkegiatan dengan anak-anak karena biasanya kader-kader yang selalu diajak terlibat.
Bagaimana proses yang berlangsung dalam tiap tahapan program ADP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya ?	Kalau di kba, karena latar-belakang saya dari ikip maka tiap kali mau mengajar kba maka saya diminta membuat rpp (rencana pengajaran) jadi hari ini mau ngajar ini ini,lalu di setiap bulan ada pertemuan tutor kba dan disitu kita saling bagi informasi, fp yg mengkoordinir apa yg menjadi kesulitan di satu kba dengan kba lainnya. Lalu pernah juga dilibatkan dalam penyusunan aop. Biasanya dari semua kelurahan diundang sekitar 40 orang..disitu kita mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan dibagi per sector...awalnya saya tidak tahu kalau ada sector HIV..ada CSMP (community sponsorship management project) dan kegiatan KBA (kelompok belajar anak) masuk ke sector HIV karena kegiatan ini masuk sebagai kegiatan positif anak untuk membentengi anak dari hal-hal negative seperti pengaruh narkoba dll..disitu kita mendapatkan pembelajaran dari kegiatan yang sudah terlaksana...apa sudah berjalan sesuai rencanakah dan memenuhi target .. kalau belum apa yang mau diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya seperti apa gitu. emudian kita kumpul lagi bareng staf pas akhir tahun untuk sama-sama lihat lagi apa yang sudah dicapai, mana yang berjalan baik mana yang tidak dan apa yang mau dikerjakan di masing-masing sector untuk tahun berikutnya dari pencapaian tersebut
Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan warga dampingan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ADP	pas kita ngumpul kita jadi tahu kalo di Rw dua misalnya ada ibu Sup yang sering jadi rujukan warga kalau mau urus surat keterangan di kelurahan untuk warga yang perlu bantuan ke rumah sakit atau sama ibu Has kalau di Rw enam. Ya kalau terus menerus dikunjungi akhirnya lama-lama warga ikutan juga..mungkin awalnya gak enak hati karena ditanyai kenapa tidak datang ke pertemuan,tapi setelah ngerti manfaatnya jadi terus ikut,memang yang paling berperan sekali di awal adalah kader-kader yang mendorong warga untuk datang. Warga yang tidak bisa ikutan mungkin karena waktunya gak cocok dengan kegiatan warga sehingga mereka tidak bisa ikut,.ada juga yang karena faktor anak atau kerjaan rumah yang belum selesai